



BUPATI TANAH DATAR

Nomor : 000.8.6.3/ ~~240~~ /Org-2025 Batusangkar, Maret 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Dokumen LKjIP
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2024

Kepada
Yth. Deputy Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
Kementerian PAN dan RB
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 7 Januari 2025 perihal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2024. Berkenaan dengan hal tersebut disampaikan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 yang menjadi satu kesatuan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) beserta Dokumen Akuntabilitas Kinerja lainnya melalui aplikasi ESR Kementerian PAN dan RB.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Telp. (0752) 71128 – 71552
BATUSANGKAR 27281

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Batusangkar, 21 Maret 2025

Inspektur Daerah,



Desi Rima, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19651212 199403 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR (LKJIP) TAHUN 2024



PEMEMRINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, Batusangkar Provinsi Sumatera Barat Kode Pos 27281
Telepon (0752) 71301 – 71201, Faksimile 71201

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Tahun 2024 untuk pencapaian sasaran strategis RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 – 2026. Laporan Kinerja ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 ini telah direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Informasi yang disajikan dinyatakan telah akurat, andal dan valid.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar diukur atas dasar Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target karena pencapaian seluruh sasaran strategis pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Penyusunan laporan kinerja merupakan bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki sistem tata kelola, dan mewujudkan visi serta misi daerah yang telah ditetapkan. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan objektif tentang kinerja dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari bahwa meskipun telah banyak capaian yang diperoleh, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan sebagai masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Demikian laporan ini disampaikan, semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta menjadi gambaran atas kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 yang telah dilaksanakan.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, dengan 15 sasaran strategis dan 26 indikator kinerja yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 – 2026 dan Indikator Kinerja Utama dengan rincian sebagai berikut :

1. Misi pertama terdiri dari 2 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja;
2. Misi kedua terdiri dari 3 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja;
3. Misi ketiga terdiri dari 3 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja;
4. Misi keempat terdiri dari 1 sasaran strategis dan 2 indikator kinerja;
5. Misi kelima terdiri dari 3 sasaran strategis dan 8 indikator kinerja, dan
6. Misi keenam terdiri dari 3 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja.

Dari hasil pengukuran terhadap 26 indikator kinerja tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% dengan kategori “Sangat Memuaskan” sebanyak 12 indikator (46,15%).
2. Capaian realisasi sampai dengan 100% dengan kategori “Sangat Baik” sebanyak 12 indikator (46,15%).
3. Capaian realisasi sampai dengan 70% dengan kategori “Sedang” sebanyak 1 indikator (3,85%).
4. Capaian realiasi sampai dengan 55% dengan kategori “Kurang Baik” sebanyak 1 indikator (3,85%)

Rincian realisasi masing-masing indikator per sasaran strategis sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis			Indikator	Target 2024	Target Perubahan 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian
MISI I : MENINGKATKAN KEHIDUPAN BERAGAMA, BERADAT DAN BERBUDAYA							
1.	Meningkatnya pembangunan keagamaan masyarakat	1.	Jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda	10.000	10.000	10.174	101,74%
		2.	Jumlah peningkatan nilai zakat yang diterima oleh amil zakat	11.540.322.486	11.540.322.486	12.266.406.140	106,29%

MISI II : MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN TANAH DATAR DAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA YANG BERBASIS PERTANIAN, INDUSTRI DAN UMKM							
2.	Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS SBK	3.	Persentase peningkatan lembaga adat dan budaya yang Aktif	95%	95%	96.39%	101.46 %
3.	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor penggerak utama perekonomian	4.	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	30,19%	30,19%	27,18%	90.03 %
		5.	Nilai Tukar Petani/NTP	> 100	> 100	102,96	102,96 %
4.	Meningkatnya daya saing UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif	6.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	14%	14%	10,38%	74,14%
		7.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	13,95%	13,95%	14,21%	101,86 %
5.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	8.	Jumlah wirausaha baru	1.000	1.000	1061	106,1 %
MISI III : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING							
6.	Meningkatnya mutu pendidikan	9.	Rata-rata lama sekolah	9,02	9,02	9,29	102,99 %
7.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	10.	Umur harapan hidup	74,19	74,19	74,26	100.09 %
		11.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14%	14%	14%*	100%
8.	Meningkatnya kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	12.	Angka kemiskinan	4,06	4,06	4,28	94,85%
		13.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60	60	59.46*	99.10%
		14.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,9	98,9	97.73*	98.82%
MISI IV : PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN YANG BERBASIS ADAT, BUDAYA DAN SUMBER DAYA ALAM							
9.	Peningkatan daya saing pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi potensial	15.	Jumlah kunjungan wisatawan	1.200.000	1.200.000	1.205.853	100,49 %

		16.	Lama tinggal wisatawan (hari)	2	2	1	50%
MISI V : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIEN							
10.	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	17.	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	100%
		18.	Indeks Pengawasan Kearsipan	B	B	BB	150%
		19.	Nilai SAKIP	71 (BB)	71 (BB)	67,60 (B)	95,21%
11.	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	20.	Indeks SPBE	3,22	3,22	2,81	87,27%
		21.	Indeks Profesionalitas ASN	79,8	79,8	84,56	105,96 %
		22.	Skor dan status kinerja pemerintah daerah	3,2	3,2	3,2*	100%
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	23.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	95	95,27	100,28 %
MISI VI : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN							
13.	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	24.	Persentase infrastruktur wilayah yang berkualitas	76,78%	76,78%	73.16%	95.29%
14.	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	25.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72	65,32	90,72%
15.	Meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan menghadapi bencana	26.	Persentase bencana yang ditangani	100%	100%	100%	100%

*data sementara

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 1.365.213.503.621,58 atau 94,53% dari pagu Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.444.187.319.890 ,-

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu dibutuhkan upaya perbaikan manajemen kinerja instansi pemerintah yang dilakukan melalui penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga akan terwujud pemerintahan yang efektif dan efisien berorientasi hasil kepada masyarakat dengan dukungan dan kerjasama semua pihak.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii		
Ikhtisar Eksekutif	iv		
Daftar Isi	vii		
Daftar Tabel	viii		
Daftar Grafik	ix		
BAB I	PENDAHULUAN	1	
	A	UMUM	2
	B	LATAR BELAKANG	3
	C	URUSAN PEMERINTAHAN	4
	D	ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	8
	E	SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	12	
	A	RENCANA STRATEGIS	13
	B	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023	21
	C	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	21
	D	RENCANA ANGGARAN	25
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	34	
	A	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	35
	B	REALISASI ANGGARAN	126
BAB IV	PENUTUP	134	
LAMPIRAN			

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Matrik Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja RPJMD
Tabel 2.2	Tema dan Prioritas Pembangunan
Tabel 2.3	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Tabel 2.4	Program dan Anggaran Pembangunan Tahun 2024
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Tahun 2024
Tabel 3.2	Jumlah Hafiz/Hafizah 2021 – 2024
Tabel 3.3	Produksi Pertanian dan Perikanan Tahun 2021 – 2024
Tabel 3.4	Produksi Tanaman Pangan Tahun 2024
Tabel 3.5	Produksi Tanaman Hortikultura Tahun 2024
Tabel 3.6	Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2024
Tabel 3.7	Produksi Peternakan Tahun 2024
Tabel 3.8	Produksi Perikanan Tahun 2022 – 2024
Tabel 3.9	Produksi Ikan Budidaya 2022 – 2024
Tabel 3.10	Data Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2024
Tabel 3.11	Tabel Jumlah Sekolah dan Akreditasinya
Tabel 3.12	Pendidikan Guru SD dan SMP Tahun 2024
Tabel 3.13	Angka Partisipasi Murni 2021 – 2024
Tabel 3.14	Perbandingan Prevalensi Stunting Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat dan Nasional
Tabel 3.15	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Sumbar Tahun 2022 – 2024
Tabel 3.16	Kunjungan Wisatawan Tahun 2018 – 2024 per Objek Wisata
Tabel 3.17	Indeks Pengawasan Kearsipan Tahun 2022-2024
Tabel 3.18	Aplikasi yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
Tabel 3.19	Aplikasi yang telah terintegrasi
Tabel 3.20	Indikator IKLH 2024
Tabel 3.21	Target dan Realisasi Indeks Kualitas Air
Tabel 3.22	Target dan Realisasi Indeks Kualitas Udara
Tabel 3.23	Target dan Relisasi Indeks Kualitas
Tabel 3.24	Jumlah Bencana yang ditangani tahun 2021-2024
Tabel 3.25	Program dan Realisasi Anggaran Pembangunan Tahun 2024

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Perkembangan jumlah Hafiz/Hafizah 2017 – 2024
Grafik 3.2	Perkembangan Penerimaan Zakat Tahun 2021 – 2024
Grafik 3.3	Persentase Lembaga Adat dan Budaya yang Aktif
Grafik 3.4	Perkembangan Capaian Indikator Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB
Grafik 3.5	Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2024 (dalam ton)
Grafik 3.6	Nilai Tukar Petani tahun 2024
Grafik 3.7	Perkembangan indikator sektor perdagangan
Grafik 3.8	Perbandingan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Tanah Datar tahun 2022-2024
Grafik 3.9	Capaian Indikator Jumlah Wirausaha Baru
Grafik 3.10	Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2021 – 2024
Grafik 3.11	Grafik Perkembangan Data Sekolah Terakreditasi A dan B Tahun 2021 – 2024 (dalam %)
Grafik 3.12	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Bidang Kesehatan
Grafik 3.13	Perbandingan Prevalensi Stunting Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat dan Nasional
Grafik 3.14	Perkembangan Capaian Indikator Angka Kemiskinan
Grafik 3.15	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Pemberdayaan dan Pembangunan Gender
Grafik 3.16	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan
Grafik 3.17	Perkembangan Capaian Indikator Nilai SAKIP
Grafik 3.18	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel
Grafik 3.19	Indeks Profesionalitas ASN
Grafik 3.20	Skor dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
Grafik 3.21	Perkembangan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat
Grafik 3.22	Perkembangan Capaian Indikator Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
Grafik 3.23	Indeks Kualitas Air



BAB I

PENDAHULUAN

- A. Umum**
- B. Latar Belakang**
- C. Urusan Pemerintahan**
- D. Isu Strategis Pembangunan Daerah**
- E. Sistematika Penulisan**

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Kabupaten Tanah Datar dengan ibukota Batusangkar, adalah salah satu Kabupaten yang terletak pada posisi strategis, berada ditengah-tengah Provinsi Sumatera Barat dengan tujuh pintu masuk menuju Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar mempunyai luas wilayah 1.390,85 km² atau 139.085 Ha, atau sekitar 3,16% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat (42.297,30 km²), menjadikan Kabupaten Tanah Datar sebagai Kabupaten dengan wilayah paling kecil kedua di Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Padang Pariaman. Secara administratif, Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14 kecamatan, 75 nagari dan 395 jorong. Kecamatan paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara dengan luas 20.431 Ha atau 15,29% dari luas wilayah Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tanjung Baru dengan luas 4.315 Ha atau 3,23% dari luas wilayah Kabupaten Tanah Datar.

Kabupaten Tanah Datar berada disekitar kaki Gunung Merapi, Gunung Singgalang dan Gunung Sago. Secara topografi Kabupaten Tanah Datar didominasi oleh daerah perbukitan yang memiliki banyak aliran sungai yang berasal dari pegunungan. Disamping itu Kabupaten Tanah Datar memiliki 2/3 dari Danau Singkarak yang juga merupakan potensi ekonomi yang cukup baik yang terletak di Kecamatan Batipuh Selatan dan Kecamatan Rambatan.

Jumlah Penduduk Kabupaten Tanah Datar keadaan 31 Desember 2024 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tercatat sebanyak 382,674 jiwa, terdiri dari 191.513 jiwa berjenis kelamin Laki-Laki dan 191.161 jiwa berjenis kelamin Perempuan. Distribusi Penduduk yang terbesar terdapat pada Kecamatan X Koto dengan jumlah 48,24 juta jiwa dan terkecil Kecamatan Batipuh Selatan dengan jumlah 11.62 juta jiwa.

Potensi penduduk tersebut diharapkan mampu memiliki daya dukung untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam pembangunan, yang ditujukan untuk upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Tanah Datar. Program dan kegiatan prioritas pada setiap bidang atau sektor pembangunan, diharapkan akan mampu mencerminkan adanya kesatuan pembangunan antara aspek pemerintahan dan agama, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek tata ruang dan infrastruktur

Kabupaten Tanah Datar dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

B. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar atas penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar serta sumber dana lainnya dalam rangka mencapai misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan IKU dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2024.

Good Governance adalah pemerintahan yang mengemban dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel yang meliputi, penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif, penerapan pengawasan yang independent, professional dan sinergis, serta peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa setiap organisasi publik harus terbuka dan transparan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) dan Laporan Pertanggung-jawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitasnya. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama ini telah berupaya untuk memenuhi kewajibannya untuk mempertanggung-jawabkan kinerjanya kepada publik melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran dan informasi capaian dari arah dan kebijakan strategis pada RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 secara akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ini adalah (1) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, (2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. URUSAN PEMERINTAHAN

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu daerah otonom dituntut untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 12, dinyatakan bahwa urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial.

Adapun **Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar** meliputi:

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan

10. Komunikasi dan informatika
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan olah raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan, dan
18. Kearsipan

Disamping itu **urusan pilihan** yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah :

1. Pertanian.
2. Kehutanan.
3. Pariwisata.
4. Perikanan dan Kelautan.
5. Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Perdaangan.
7. Industri.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Bupati Tanah Datar dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah tersebut terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat Daerah. Unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah dan unsur pelaksana urusan daerah diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Susunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar membentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah
 - a. Sekretariat Daerah tipe A
 - b. Sekretariat DPRD tipe B
 - c. Inspektorat Daerah tipe A

d. Dinas Daerah, terdiri dari :

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan
- 2) Dinas Kesehatan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
- 3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan
- 4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dan bidang lingkungan hidup
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan polisi pamong praja dan sub urusan kebakaran
- 6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- 9) Dinas Perhubungan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
- 10) Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan persandian
- 11) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal,
- 12) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan

- 13) Dinas Pangan dan Perikanan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan
 - 14) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang pemuda dan bidang olahraga
 - 15) Dinas Pertanian Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian
 - 16) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, dan bidang perdagangan.
 - 17) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, perindustrian, energi dan sumber daya mineral
- e. Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d, ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan politik sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- f. Badan yang menyelenggarakan urusan penunjang terdiri dari :
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan,
 - 3) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan,
 - 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- g. Kecamatan, terdiri dari 14 Kecamatan dengan tipe A terdiri dari:
- 1) Kecamatan X Koto
 - 2) Kecamatan Batipuh
 - 3) Kecamatan Rambatan
 - 4) Kecamatan Lima Kaum
 - 5) Kecamatan Tanjung Emas

- 6) Kecamatan Padang Ganting
- 7) Kecamatan Lintau Buo
- 8) Kecamatan Sungayang
- 9) Kecamatan Sungai Tarab
- 10) Kecamatan Pariangan
- 11) Kecamatan Salimpaung
- 12) Kecamatan Tanjung Baru
- 13) Kecamatan Lintau Buo Utara
- 14) Kecamatan Batipuh Selatan

2. Lembaga Teknis Daerah

Disamping Perangkat Daerah yang diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, masih terdapat Perangkat Daerah lain yang pengaturannya belum dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 yaitu:

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- b. Rumah Sakit Umum Daerah

3. Staf Ahli

Staf Ahli terdiri dari 3 (tiga) orang, bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Datar, yang dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah, sedangkan hubungan kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

D. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Isu-isu strategis adalah merupakan sebuah kondisi/ perkembangan/ peristiwa kondisi terkini dan kecenderungannya di masa depan dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan yang akan mempengaruhi pencapaian misi, program dan kegiatan sehingga harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan. Isu-isu strategis disajikan menurut fokus pembangunan.

Permasalahan Daerah tahun 2024 yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengamalan agama, adat dan budaya

- Belum optimalnya pengamalan agama dan pelestarian adat istiadat serta pengembangan kebudayaan.
 - Belum optimalnya peranan kelambagaan adat dan agama bagi masyarakat.
 - Belum optimalnya peranan kajian-kajian sejarah adat dan budaya Minangkabau.
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi;
 - Masih kurangnya minat generasi muda menjadi usahawan
 - masih terbatasnya ketersediaan formasi lapangan pekerjaan
 - belum optimalnya pemetaan dan kajian potensi investasi di Tanah Datar.
 3. Meningkatnya produksi dan produktivitas serta nilai tambah hasil pertanian”
 - Belum optimalnya metode pemasaran dan produk hasil pertanian serta keterbatasan pemasaran
 - Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pertanian
 - Masih rendahnya penggunaan benih bersertifikat
 4. Meningkatnya daya saing pariwisata unggulan daerah
 - Belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata
 - Belum optimalnya promosi dan sosialisai pariwisata
 - Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia pariwisata
 5. Meningkatkan kualitas SDM
 - Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia di berbagai sektor pembangunan (pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata dan lain sebagainya)
 6. Meningkatkan infrastuktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup
 - Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah
 - Belum optimalnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana
 - Belum optimalnya pemerataan pengelolaan persampahan
 - Masih terdapat pencemaran lingkungan
 7. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas
 - Belum optimalnya tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik

Berdasarkan permasalahan-permasalahan maka isu strategis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas sumber daya manusia yang belum optimal
2. Masih rendahnya Daya Saing, Nilai Tambah Komoditas Unggulan Pertanian dan Produktivitas UMKM
3. Peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan
4. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
6. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2024, dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan kondisi umum daerah serta organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta isu-isu strategis (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KIERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan tabel capaian kinerja Organisasi untuk setiap kinerja Sasaran Strategis Organisasi. Pada Sub Bab ini pula diuraikan analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yang memuat informasi kurang lebih sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.
6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini diuraikan perbandingan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dengan total belanja langsung dari APBD.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta saran langkah yang akan dilakukan oleh organisasi dimasa yang akan datang untuk meningkatkan kinerja Organisasi.

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Prioritas Pembangunan Tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

D. Rencana Anggaran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar ditetapkan melalui Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.

Dalam RPJMD tersebut ditetapkan visi pembangunan daerah adalah *“Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”*, dengan misi:

1. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumberdaya alam.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Visi dan misi yang telah ditetapkan dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran agar pencapaian masing-masing misi dapat terukur secara tahunan maupun lima tahunan. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan konkuren pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Keselarasan hubungan antara misi, tujuan, sasaran serta indikator RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 – 2026 dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 2.1
Matriks Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja RPJMD
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2021 - 2026

Misi 1 : Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya			
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
Meningkatkan aktifitas pembangunan bidang keagamaan, adat dan kebudayaan sesuai nilai-nilai ABS-SBK	Meningkatkan aktivitas bidang keagamaan, adat dan kebudayaan sesuai nilai-nilai ABS-SBK	1. Meningkatnya Pembangunan Keagamaan Masyarakat	1. Jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda
			2. Jumlah peningkatan nilai zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat
		2. Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS-SBK	1. Persentase peningkatan lembaga adat dan budaya yang aktif
Misi 2 : Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM			
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
Meningkatkan pendapatan masyarakat dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM	1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita	1. Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	1. Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB
	2. Angka Pengangguran Terbuka		2. Nilai Tukar Petani/ NTP
	3. Laju Pertumbuhan Ekonomi	2. Meningkatnya Daya Saing UMKM, Koperasi dan ekonomi kreatif	1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
			2. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

		3. Meningkatkan a penyerapan tenaga kerja	1. Jumlah wirausaha baru
Misi 3 : Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing			
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1. Meningkatnya mutu Pendidikan	Rata-rata lama sekolah
		2. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Umur harapan hidup Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
		3. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	1. Angka Kemiskinan 2. Indek Pemberdayaan Gender (IDG) 3. Indek Pembangunan Gender (IPG)
Misi 4 : Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumberdaya alam			
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
Mewujudkan Kabupaten Tanah Datar sebagai Destinasi pariwisata yang unggul berbasis agama, budaya dan sumber daya alam	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (s ektor akomodasi da n makan minum)	1. Peningkatan Daya Saing Pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi potensial	1. Jumlah Kunjung an Wisatawan
			2. Lama Tinggal Wisatawa n
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien			
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel,	Indeks reformasi birokrasi	1. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Opini BPK atas laporan keuangan
			2. Nilai SAKIP

Efektif dan Efisien			3. Indeks Pengawasan Kearsipan
			4. Manajemen resiko level 3
		2. Meningkatnya birokrasi yang kafabel	1. Indeks SPBE
			2. Indeks Profesionalitas ASN
			3. Skor dan status kinerja pemerintah daerah
		3. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Misi 6 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
1. Terwujudnya infrastruktur berkualitas	2. Persentase Infrastruktur Berkualitas	1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	1. Persentase Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas
2. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	2. Persentase Bencana yang ditangani	2. Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	1. Persentase Bencana yang ditangani

RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 – 2026 menetapkan 10 Program Unggulan sebagai berikut:

1. Menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja per tahun

Perkembangan ekonomi suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Beberapa permasalahan dalam ketenagakerjaan yang ditemui masyarakat antara lain terkait dengan

tingginya tingkat pengangguran, penyediaan lapangan kerja yang terbatas, serta produktivitas tenaga kerja yang relatif masih rendah. Penyelesaian dari permasalahan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu barometer keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga tingkat pengangguran dapat berkurang.

Dengan adanya program unggulan Menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja per tahun kedepannya diharapkan akan terbuka lapangan kerja baru baik dengan pola pemberdayaan usahawan itu sendiri maupun mendatangkan investor untuk menghidupkan industri yang cocok dengan alam dan potensi Tanah Datar. Investor yang akan menanamkan investasinya di Tanah Datar diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru dalam rangka mengurangi pengangguran dan juga menjaga kestabilan harga komoditi dari hulu sampai hilir di Kabupaten Tanah Datar.

2. Mengefisienkan biaya produksi pertanian melalui bantuan pembajakan sawah

Kinerja di sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar. Kinerja ini perlu peningkatan dari tahun ketahun. Salah satu yang mempengaruhi kinerja pertanian adalah biaya produksi, untuk menekan biaya produksi ini akan dilakukan efisiensi dalam pengelolaan alsintan, khususnya dalam proses pembajakan sawah. Dengan mengefisienkan biaya produksi pertanian melalui bantuan pembajakan sawah diharapkan biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh petani tidak terlalu besar tetapi mendapatkan keuntungan yang meningkat.

3. Meningkatkan kuota asuransi tani, asuransi ternak dan pupuk bersubsidi Beberapa hal lain yang juga mempengaruhi pendapatan petani adalah terjadinya musibah baik berupa gagal panen maupun kematian ternak, selain itu kemudahan mendapatkan pupuk juga menjadi poin penting dalam usaha meningkatkan usaha pertanian. Dengan adanya pemberian kuota asuransi tani dan ternak diharapkan petani yang mengalami musibah gagal panen atau peternak yang hewan ternaknya mati akan dilakukan penggantian melalui mekanisme asuransi. Kemudian pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan kuota kartu tani guna mendapatkan pupuk bersubsidi, bibit dan bantuan pertanian lainnya. Kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk memberikan perlindungan bagi petani/keompok tani yang mengalami gagal panen akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

dan kejadian bencana alam banjir serta kekeringan dengan target 1.000 Ha.

4. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan pada wilayah yang jauh ibukota kabupaten

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Pada era baru ini paradigma pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, kepada masyarakatnya sudah mulai bergeser. Dimana dulunya masyarakat harus hadir di tempat lokasi pelayanan yang diberikan pemerintah, harus berpindah dari satu pelayanan ke pelayanan berikutnya, harus mengantri, memakan waktu yang cukup lama, bahkan juga tenaga dan biaya yang tentunya tidak sedikit bila harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Hal tersebut sekarang sudah mulai di minimalisir dimana salah satu cara dan solusi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar agar masyarakat yang berada cukup jauh dari pusat pelayanan adalah dengan menghadirkan sebuah konsep yang dinamakan:

“Pelayanan Publik Tanah Datar di Ujung Jari”. “Tanah Datar di Ujung Jari” adalah sebuah program kerja yang didesain untuk mendekatkan pelayanan publik Kabupaten Tanah Datar kepada masyarakat diseluruh nagari baik pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan perizinan, sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan yang diberikan pemerintah daerah atau dari kantor wali nagari dari rumah melalui telepon pintar *smartphone*.

5. Meningkatkan kesejahteraan guru TPA dan Tahfiz di Tanah Datar

Dalam rangka mendukung kebijakan strategis menjadikan Kabupaten Tanah Datar sebagai Kabupaten Tahfiz telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan yang merupakan kelanjutan dari RPJMD periode sebelumnya. Salah satu program yang penting dan sangat mendukung keberhasilan kegiatan ini adalah peningkatan kesejahteraan guru TPA dan Tahfiz. Pelaksanaan dari kegiatan ini pemberian insentif sehingga guru TPA dan Tahfiz lebih fokus mengajar anak-anak didiknya menjadi hafiz dan hafizah selain itu hal yang sangat penting adalah peningkatan anggaran untuk operasional rumah tahfiz. Kedepan diharapkan akan lahir satu rumah satu tahfiz.

6. Satu nagari satu event untuk menunjang ekonomi kreatif, pelestarian kebudayaan, memajukan olahraga dan produk nagari

Perkembangan pariwisata masih sangat tergantung pada keberadaan Istano Basa Pagaruyung. yang sampai saat ini masih belum tergantikan posisinya sebagai ikon pariwisata di Kabupaten Tanah Datar, bahkan di Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian, bukan berarti pengembangan pariwisata hanya difokuskan pada Istano Basa Pagaruyung saja.

Pada periode RPJMD ini pemerintah daerah berkomitmen untuk mengembangkan industri ekonomi kreatif dengan merancang event-event pariwisata dan olah raga berbasis kearifan lokal masing-masing nagari dan kecamatan. Dengan adanya event-event ini diharapkan akan memacu aktifnya sanggar-sanggar nagari, klub olah raga dan UMKM yang ada.

7. Peningkatan biaya operasional KAN, LKAAM, Bundo Kanduang dan Organisasi Keagamaan

Kabupaten Tanah Datar adalah tempat asal usul orang Minangkabau atau dikenal sebagai Luhak Nan Tuo. Dengan demikian, upaya untuk melestarikan nilai-nilai adat dan budaya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menjaga identitas sebagai orang Minangkabau. Masyarakat Kabupaten Tanah Datar secara tipikal adalah masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya Minangkabau. Secara empiris kita dapat melihat dari tingkat kepatuhan masyarakat kepada para Ninik Mamak/Penghulu/Pemangku Adat yang masih sangat kuat.

Hal ini juga ditopang oleh keberadaan lembaga-lembaga adat di lingkungan masyarakat, seperti Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Lembaga-lembaga ini mempunyai peran yang sangat penting untuk menjaga dan melestarikan adat dan budaya Minangkabau. Dalam rangka mendukung peran penting lembaga adat maka pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan biaya operasional untuk KAN, LKAAM dan Bundo Kanduang sehingga lebih fokus untuk mendidik anak kamanakan dalam memahami adat dan budaya minangkabau. Hal ini penting untuk mengukuhkan Kabupaten Tanah Datar sebagai pusat kebudayaan minangkabau

8. Membangun jaringan telekomunikasi

Perkembangan dunia teknologi informasi yang sangat cepat telah mendorong kemudahan akses informasi dan komunikasi, bahkan hingga ke daerah yang dulunya tidak terjangkau sekalipun. Hal ini tampak dari

perkembangan jumlah jaringan komunikasi (tower penyedia jasa komunikasi seluler) yang terus meningkat setiap tahun. Rasio wartel/warnet cenderung mengalami stagnan dalam 5 tahun terakhir. Kondisi geografis seringkali menjadi faktor utama minimnya sinyal yang ada di suatu tempat. Bahkan tidak jarang semakin sulit medan dan kondisi geografisnya, sinyal komunikasi hilang sama sekali. Contohnya saja, suatu tempat yang terpencil di tengah hutan atau di wilayah pegunungan. Sinyal akan sulit didapatkan karena tidak adanya sarana pendukung untuk menangkap sinyal yang ada seperti BTS dan kabel optik. Terlebih bagi daerah dengan kondisi geografis terjal, akan sulit untuk dibangun sebuah BTS mengingat sulitnya material yang dibawa menuju tempat tersebut. Dengan kondisi topografi Kabupaten Tanah Datar yang berbukit dan bergelombang tidak semua daerah dapat dijangkau oleh sinyal untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah daerah akan membangun sarana dan prasarana pendukung telekomunikasi guna mengatasi *blank spot* di daerah yang belum mempunyai akses jaringan internet.

9. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas ASN dan tenaga honorer

ASN merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah kesejahteraan dimana penyelenggaraan ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup pegawai ASN. bahwa ASN berhak memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaannya serta berhak memperoleh jaminan sosial untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan. Selain itu untuk meningkatkan pelayanan publik maka diperlukan profesionalisme ASN sesuai dengan bidang tugas, maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan diperlukan diklat ataupun bimtek bagi ASN guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

10. Perbaikan irigasi

Irigasi merupakan usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Manfaat irigasi umumnya digunakan pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian secara luas termasuk di dalamnya kebutuhan, peternakan, dan perikanan. Walaupun demikian kebutuhan irigasi untuk tanaman padi masih mendominasi kebutuhan irigasi secara menyeluruh. Sektor pertanian

di Kabupaten Tanah Datar merupakan sektor terbesar dalam penyumbang PDRB hampir 29%, artinya masyarakat Kabupaten Tanah Datar menggantungkan hidupnya disektor pertanian. Guna meningkatkan hasil pertanian perlu didukung dengan membangun jaringan irigasi yang baik untuk melayani lahan persawahan yang belum terjangkau oleh aliran air maupun lahan sawah tadah hujan sehingga pola tanam dapat lebih ditingkatkan, dengan demikian kesejahteraan petani akan meningkat.

B. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 19 Tahun 2022 memuat tema pembangunan dan prioritas pembangunan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tema dan Prioritas Pembangunan

Tema	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Program Unggulan Daerah
Prioritas 1	Meningkatkan pengamalan agama, adat dan budaya
Prioritas 2	Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi
Prioritas 3	Meningkatkan produksi dan produktivitas serta nilai tambah hasil pertanian
Prioritas 4	Meningkatkan daya saing pariwisata unggulan daerah
Prioritas 5	Meningkatkan kualitas SDM
Prioritas 6	Meningkatkan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup
Prioritas 7	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan berkualitas

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan visi misi dan merealisasikan 10 Program Unggulan yang telah dijanjikan kepada masyarakat, pada tahun 2024 telah disusun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 48 Tahun 2021, dan berdasarkan Perubahan APBD TA 2024 telah disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tanpa mengubah indikator dan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator		Target pada PK 2024	Target pada Perubahan PK 2024
MISI I : MENINGKATKAN KEHIDUPAN BERAGAMA, BERADAT DAN BERBUDAYA					
1.	Meningkatnya pembangunan keagamaan masyarakat	1.	Jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda	10.000	10.000
		2.	Jumlah peningkatan nilai zakat yang diterima oleh amil zakat	11.540.498.673	11.540.498.673
MISI II : MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN TANAH DATAR DAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA YANG BERBASIS PERTANIAN, INDUSTRI DAN UMKM					
2.	Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS SBK	3.	Persentase peningkatan lembaga adat dan budaya yang aktif	95%	95%
3.	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor penggerak utama perekonomian	4.	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	30,19%	30,19%
		5.	Nilai Tukar Petani/NTP	> 100	> 100
4.	Meningkatnya daya saing UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif	6.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	14%	14%
		7.	Kontribusi sektor	13,95%	13,95%

Sasaran Strategis		Indikator		Target pada PK 2024	Target pada Perubahan PK 2024
			perdagangan terhadap PDRB		
5.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	8.	Jumlah wirausaha baru	1.000	1.000
MISI III : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING					
6.	Meningkatnya mutu Pendidikan	9.	Rata-rata lama sekolah	9,02	9,02
7.	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	10.	Umur harapan hidup	74,19	74,19
		11.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14%	14%
8.	Meningkatnya kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	12.	Angka kemiskinan	4,06	4,06
		13.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60	60
		14.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,9	98,9
MISI IV : PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN YANG BERBASIS ADAT, BUDAYA DAN SUMBER DAYA ALAM					
9.	Peningkatan daya saing pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi	15.	Jumlah kunjungan wisatawan	1.200.000 Orang	1.200.000 Orang

Sasaran Strategis		Indikator		Target pada PK 2024	Target pada Perubahan PK 2024
	Potensial				
		16.	Lama tinggal wisatawan (hari)	2 Hari	2 Hari
MISI V : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIEN					
10.	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	17.	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP
		18.	Indeks Pengawasan Kearsipan	B	B
		19.	Nilai SAKIP	71 (BB)	71 (BB)
11.	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	20.	Indeks SPBE	3,22	3,22
		21.	Indeks Profesionalitas ASN	79,8	79,8
		22.	Skor dan status kinerja pemerintah Daerah	3,2	3,2
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	23.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	95
MISI VI : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN					
13.	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	24.	Persentase infrastruktur wilayah yang berkualitas	76,78%	76,78%
14.	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	25.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72

Sasaran Strategis		Indikator		Target pada PK 2024	Target pada Perubahan PK 2024
15.	Meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan menghadapi bencana	26.	Persentase bencana yang ditangani	100%	100%

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Permenpan RB No 53 Tahun 2014, menyesuaikan dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung Prioritas Pembangunan tahun 2024 sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
3. Program penataan bangunan gedung
4. Program Penyelenggaraan Jalan

D. RENCANA ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan untuk mewujudkan 10 Program Unggulan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, telah dialokasikan anggaran pada APBD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Program dan Anggaran Pembangunan Tahun 2024

No.	Program	APDB 2024	APBD-P 2024	+/-
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	79.078.206.452	81.009.046.452	1.930.840.000
2.	Program Pengembangan Kurikulum	33.577.500	33.577.500	0
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.931.379.173	23.938.027.461	4.006.648.288
4.	Program Pengembangan Kebudayaan	885.487.500	865.487.500	(20.000.000)
5.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	553.425.000	850.925.000	297.500.000
6.	Program Pembinaan	21.262.500	21.293.700	31.200

No.	Program	APDB 2024	APBD-P 2024	+/-
	Sejarah			
7.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	50.155.000	50.155.000	0
8.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	53.799.940.821	57.214.600.776	3.414.659.955
9.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	568.329.400	568.329.400	0
10.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.050.930.092	3.600.930.092	550.000.000
11.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	12.593.640.695	14.331.345.595	1.737.704.900
12.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.502.184.308	1.418.184.308	(84.000.000)
13.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	821.597.500	846.597.500	25.000.000
14.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	977.309.700	1.345.309.700	368.000.000
15.	Program Penataan Bangunan Gedung	1.803.793.750	3.262.769.914	1.458.976.164
16.	Program Penyelenggaraan Jalan	69.010.099.770	91.980.158.682	22.970.058.912
17.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	41.192.250	41.192.250	0
18.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	827.793.280	732.809.452	(94.983.828)
19.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	14.595.000	14.595.000	0
20.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	10.300.000	10.300.000	0

No.	Program	APDB 2024	APBD-P 2024	+/-
21.	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	299.618.400	299.618.400	0
22.	Program Penatagunaan Tanah	23.000.000	23.000.000	0
23.	Program Pengembangan Perumahan	62.500.000	62.500.000	0
24.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1.000.000	1.000.000	0
25.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	200.000.000	2.08.000.000	8.000.000
26.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.413.552.500	1.413.552.500	0
27.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	352.042.940	424.442.940	72.400.000
28.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	3.500.000	3.500.000	0
29.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.250.000	1.250.000	0
30.	Program Pengelolaan Persampahan	5.143.402.733	5.984.787.233	841.384.500
31.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	971.992.455	1.023.264.955	51.272.500
32.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.738.213.180	1.570.841.080	(167.372.100)
33.	Program Penanggulangan Bencana	511.465.299	1.492.881.799	981.416.500
34.	Program Penguatan	12.000.000	158.945.000	146.945.000

No.	Program	APDB 2024	APBD-P 2024	+/-
	Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan			
35.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	29.991.233.276	28.039.238.476	(1.951.994.800)
36.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.200.000	26.200.000	25.000.000
37.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.499.500	1.499.500	0
38.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	537.211.520	871.811.520	334.600.000
39.	Program Pemberdayaan Sosial	109.119.600	79.119.600	(30.000.000)
40.	Program Rehabilitasi Sosial	15.035.008.922	18.324.080.552	3.289.071.630
41.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	588.226.600	748.167.298	159.940.698
42.	Program Penanganan Bencana	56.850.000	56.850.000	0
43.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	12.000.000	18.800.000	6.800.000
44.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	453.727.800	523.727.800	70.000.000
45.	Program Perlindungan Perempuan	76.819.800	81.619.800	4.800.000
46.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	7.559.800	7.559.800	0

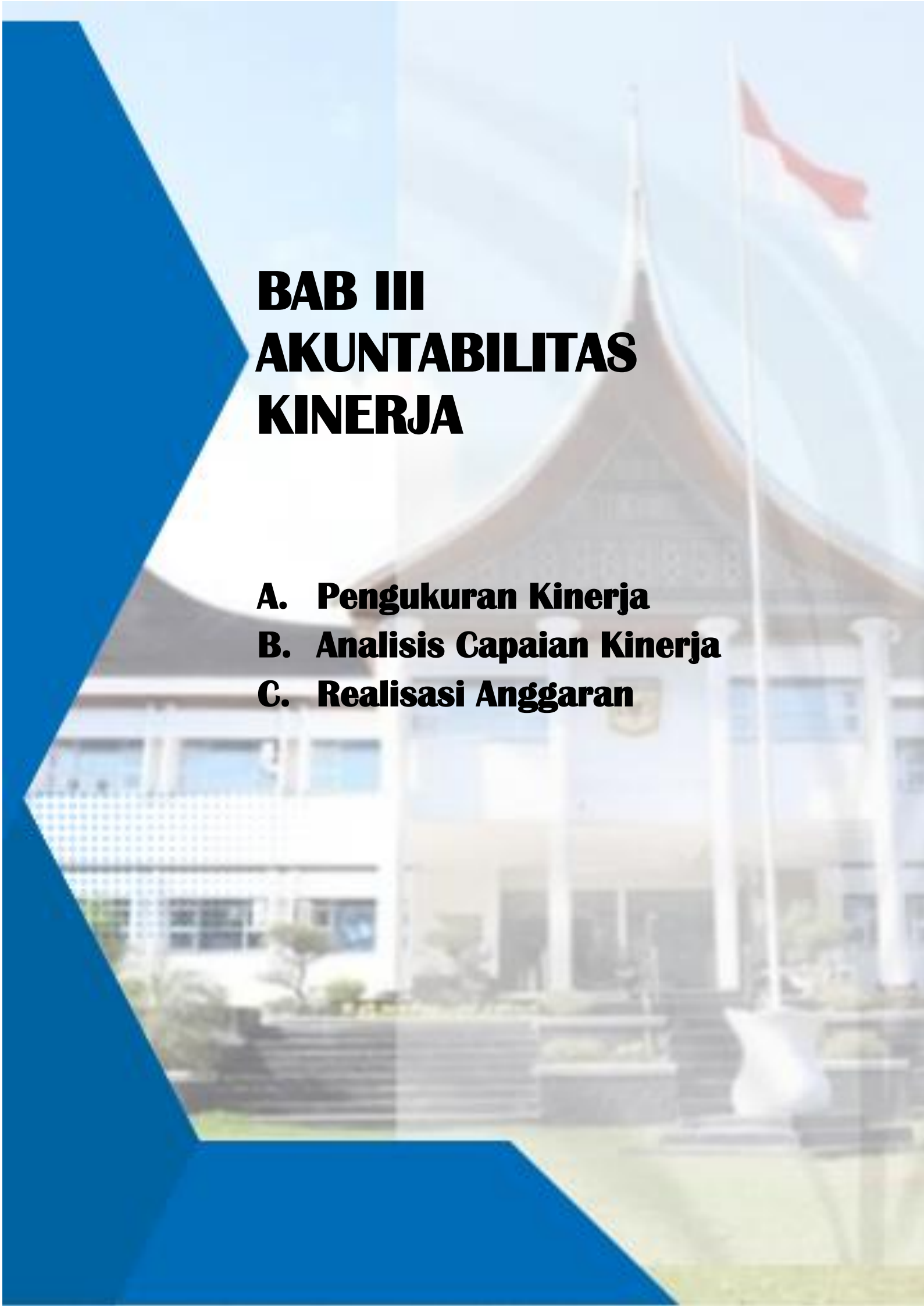
No.	Program	APDB 2024	APBD-P 2024	+/-
47.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	15.089.700	15.089.700	0
48.	Program Perlindungan Khusus Anak	376.564.200	377.866.700	0
49.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	429.190.700	477.294.700	48.104.000
50.	Program Penempatan Tenaga Kerja	52.876.800	52.876.800	0
51.	Program Hubungan Industrial	23.104.000	0,00	0
52.	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	3.000.000	3.000.000	0
53.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	11.566.009.580	11.373.087.080	(192.922.500)
54.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	37.024.000	181.009.000	143.985.000
55.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	33.299.200	33.299.200	0
56.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.462.400	4.462.400	0
57.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	331.385.547	356.385.547	25.000.000
58.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	200.000.000	200.000.000	0
59.	Program Pendaftaran Penduduk	373.330.400	385.090.602	11.760.202
60.	Program Pencatatan Sipil	131.942.000	131.942.000	0
61.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8.200.000	8.200.000	0
62.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	892.000	892.000	0
63.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	1.500.000	1.500.000	0
64.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	41.413.500	151.413.500	110.000.000
65.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,	3.253.230.820	3.660.830.820	407.600.000

No.	Program	APDB 2024	APBD-P 2024	+/-
	Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat			
66.	Program Pengendalian Penduduk	9.408.230	9.408.230	0
67.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.636.034.692	4.700.834.692	64.800.000
68.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.330.438.750	2.330.438.750	0
69.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	13.118.152.160	13.203.952.160	85.800.000
70.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	893.092.584	1.699.092.584	806.000.000
71.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	815.965.682	835.965.682	20.000.000
72.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	61.664.400	71.664.400	10.000.000
73.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	3.000.000	3.000.000	0
74.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	7.275.000	12.275.000	5.000.000
75.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	192.000.000	192.000.000	0
76.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	497.625.236	497.625.236	0
77.	Program Pengembangan UMKM	602.056.820	602.056.820	0
78.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	255.357.819	268.557.819	13.200.000
79.	Program Stabilisasi Harga Barang	54.259.530	80.759.530	26.500.000

No.	Program	APDB 2024	APBD-P 2024	+/-
	Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting			
80.	Program Pengembangan Ekspor	1.500.000	1.500.000	0
81.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	62.028.520	77.028.520	15.000.000
82.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	87.748.800	103.198.800	15.450.000
83.	Program Promosi Penanaman Modal	117.325.000	152.325.000	35.000.000
84.	Program Pelayanan Penanaman Modal	506.692.420	507.932.420	1.2
85.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	791.987.000	791.987.000	0
86.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	15.757.500	15.757.500	0
87.	Program Pembinaan Perpustakaan	323.194.100	324.694.100	1.500.000
88.	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	4.607.500	4.607.500	0
89.	Program Pengelolaan Arsip	21.173.580	50.983.580	29.810.000
90.	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	5.732.500	9.122.500	3.390.000
91.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	30.000.000	45.000.000	15.000.000
92.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.571.741.600	1.941.741.600	370.000.000
93.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	750.000.000	750.000.000	0
94.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	6.412.777.320	6.442.777.320	30.000.000
95.	Program Pemasaran	2.539.000.000	2.449.000.000	(90.000.000)

No.	Program	APDB 2024	APBD-P 2024	+/-
	Pariwisata			
96.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	31.000.000	46.000.000	15.000.000
97.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	15.769.120.210	16.166.620.210	397.500.000
98.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.126.287.550	6.559.114.681	432.827.131
99.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.278.858.350	2.278.858.350	0
100.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	238.263.000	263.263.000	25.000.000
101.	Program Penyuluhan Pertanian	1.429.590.400	1.329.590.400	(100.000.000)
102.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	5.401.049.348	5.691.049.348	290.000.000
103.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	510.765.886	644.215.886	133.450.000
104.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	33.923.436.012	26.098.104.212	(7.825.331.800)
105.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	355.288.700	385.788.700	30.500.000
106.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	210.219.725	362.720.725	152.501.000
107.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	338.727.500	408.727.500	70.000.000
108.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	169.722.536.951	171.748.383.577	2.025.846.626
109.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.061.544.729	1.710.967.903	649.423.174

No.	Program	APDB 2024	APBD-P 2024	+/-
110.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	688.061.150	841.557.127	153.495.97
111.	Program Kepegawaian Daerah	1.112.828.214	1.041.792.614	(71.035.600)
112.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	379.174.751	672.674.751	293.500.000
113.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	10.000.000	90.000.000	80.000.000
114.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	636.674.812	614.455.611	(22.219.201)
115.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	36.745.402	35.845.402	(900.000)
116.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.550.000	1.550.000	0
117.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.392.700.312	1.396.593.912	3.893.600
118.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	485.551.713	515.051.713	29.500.000
	JUMLAH	1.398.919.280.321	1.444.187.319.890	45.268.039.569



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja**
- B. Analisis Capaian Kinerja**
- C. Realisasi Anggaran**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Bupati Tanah Datar Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Tanah Datar merupakan kinerja tahun ke-4 pada periode RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2021-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 98,65% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator	Target 2024	Target Perubahan 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian
MISI I : MENINGKATKAN KEHIDUPAN BERAGAMA, BERADAT DAN BERBUDAYA						
1.	Meningkatnya pembangunan keagamaan masyarakat	1. Jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda	10.000	10.000	10.174	101,74%
		2. Jumlah peningkatan nilai zakat yang diterima oleh amil zakat	11.540.322.486	11.540.322.486	12.266.406.140	106,29%
2.	Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS SBK	3. Persentase peningkatan lembaga adat dan budaya yang aktif	95%	95%	96.39%	101.46%
MISI II : MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN TANAH DATAR DAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA YANG BERBASIS PERTANIAN, INDUSTRI DAN UMKM						
3.	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor penggerak utama perekonomian	4. Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	30,19%	30,19%	27,18%	90.03%
		5. Nilai Tukar Petani/NTP	> 100	> 100	102,96	102,96%
4.	Meningkatnya daya saing	6. Kontribusi sektor industri terhadap	14%	14%	10,38%	74,14%

Sasaran Strategis		Indikator		Target 2024	Target Perubahan 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian
	UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif		PDRB				
		7.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	13,95%	13,95%	14,21%	101,86%
5.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	8.	Jumlah wirausaha baru	1.000	1.000	1061	106,1%
MISI III : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING							
6.	Meningkatnya mutu pendidikan	9.	Rata-rata lama sekolah	9,02	9,02	9,29	102,99%
7.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	10.	Umur harapan hidup	74,19	74,19	74,26	100.09%
		11.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14%	14%		
8.	Meningkatnya kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	12.	Angka kemiskinan	4,06	4,06	4,28	94,85%
		13.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60	60	59.46*	99.10%
		14.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,9	98,9	97.73*	98.82%
MISI IV : PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN YANG BERBASIS ADAT, BUDAYA DAN SUMBER DAYA ALAM							
9.	Peningkatan daya saing pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi potensial	15.	Jumlah kunjungan wisatawan	1.200.000	1.200.000	1.205.853	100,49%
		16.	Lama tinggal wisatawan (hari)	2	2	1	50%
MISI V : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIEN							
10.	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	17.	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	100%

Sasaran Strategis		Indikator	Target 2024	Target Perubahan 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian
		18. Indeks Pengawasan Kearsipan	B	B	BB	150%
		19. Nilai SAKIP	71 (BB)	71 (BB)	67,60 (B)	95,21%
11.	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	20. Indeks SPBE	3,22	3,22	2,81	87,27%
		21. Indeks Profesionalitas ASN	79,8	79,8	84,56	105,96%
		22. Skor dan status kinerja pemerintah daerah	3,2	3,2	3,2*	100%
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	23. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	95	95,27	100,28%
MISI VI : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN						
13.	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	24. Persentase infrastruktur wilayah yang berkualitas	76,78%	76,78%	73.16%	95.29%
14.	Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup	25. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72	65,32	90,72%
15.	Meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan menghadapi bencana	26. Persentase bencana yang ditangani	100%	100%	100%	100%

*data sementara

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel tersebut di atas dapat diketahui:

1. Capaian realisasi di atas 100% dengan kategori “Sangat Memuaskan” sebanyak 12 indikator (46,15%).
2. Capaian realisasi sampai dengan 100% dengan kategori “Sangat Baik” sebanyak 12 indikator (46,15%).
3. Capaian realisasi sampai dengan 70% dengan kategori “Sedang” sebanyak 1 indikator (3,85%).
4. Capaian realiasi sampai dengan 55% dengan kategori “Kurang Baik” sebanyak 1 indikator (3,85%)

Secara rata-rata, capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 98.65% masuk ke dalam kategori “Sangat Baik”, yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran dan indikator kinerja. Berikut ini disajikan analisis capaian kinerja per indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis:

I. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pembangunan Keagamaan Masyarakat

Capaian sasaran strategis “Meningkatnya pembangunan keagamaan masyarakat” diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Jumlah hafiz/hafizah yang Diwisuda	10.000	10.174	101,74%
2.	Jumlah peningkatan nilai zakat yang diterima oleh amil Zakat	11.540.322.486	12.266.406.140	106,29%

I.1 Jumlah Hafiz/Hafizah yang Diwisuda

Dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 – 2026 ditetapkan target hafiz/hafizah yang diwisuda sebanyak 1.000 hafiz/hafizah per tahun. Berdasarkan data Dinas Sosial PPPA, pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 1.000 hafiz/hafizah diwisuda dengan capaian 100%. Berdasarkan formulasi penghitungan indikator kinerja sasaran I.1 yaitu jumlah hafiz/hafizah diwisuda (hafal 1 – 2 juz), pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 1000 Hafiz/Hafizah dengan capaian 100%. Dalam perkembangannya capaian indikator kinerja jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda juga memperhitungkan kategori hafal lebih dari 2 juz. Pada tahun 2024 terdapat sebanyak 336 Orang hafiz/hafizah yang hafal dengan kategori lebih dari 2 juz tersebut.

Secara akumulasi, jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda sampai dengan tahun 2024 sebanyak 10.174 hafiz/hafizah. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD yang diwisuda sampai dengan tahun 2024 sebanyak 9.000 hafiz/hafizah, berdasarkan data capaian kinerja tersebut jumlah ini sudah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 113,04%, namun jika dilihat dari capaian pertahun jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Berikut perkembangan data jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda tahun 2021-2024.

Tabel 3.2
Jumlah Hafiz/Hafizah yang diwisuda 2021 – 2024

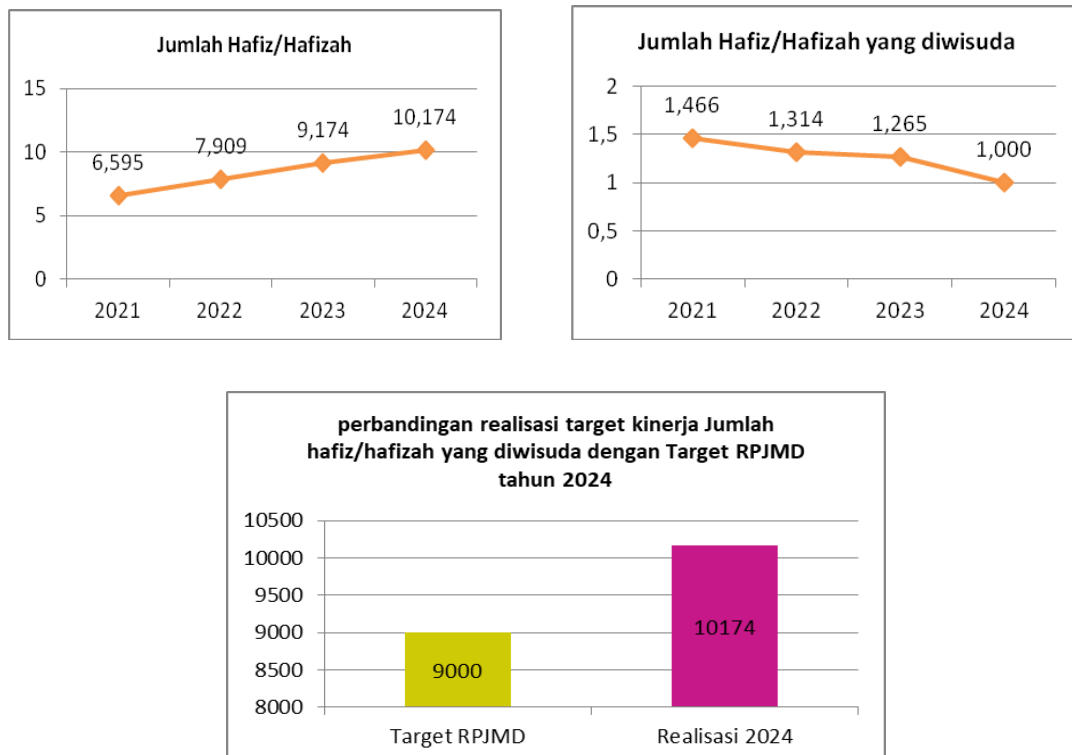
Kategori	2021	2022	2023	2024
1 – 2 Juz	1	956	1	664
3 juz	466*)	206	144	198
4 juz	n/a	73	48	79
5 juz	n/a	68	50	45
10 juz	n/a	9	17	7
15 juz	n/a	2	2	4
20 juz	n/a	n/a	2	2
30 juz	n/a	n/a	2	1
JUMLAH	1.466*)	1.314	1.265	1000

Tahun	Akumulasi Jumlah Hafiz/Hafizah
2021	6.595
2022	7.909
2023	9.174
2024	10.174

Grafik perkembangan jumlah hafiz/hafizah dari tahun ke tahun:

Grafik 3.1

Perkembangan jumlah Hafiz/Hafizah 2021 – 2024



Faktor pendukung capaian kinerja indikator hafiz/hafizah yang diwisuda adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan jumlah Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) dan rumah tahfiz serta jumlah guru tahfiz yang semakin meningkat, sampai dengan tahun 2024 terdapat 240 TPA dan 110 rumah tahfiz binaan Pemerintah Daerah,

dengan jumlah guru tahfiz lebih dari 1.000 orang dengan jumlah siswa mencapai lebih 16.000 orang,

2. Penyelenggaraan Program Gerakan Wakaf 1.000 Hafiz/Hafizah ke IX tahun 2024.
3. Pemberian reward kepada hafiz/hafizah yang hafal Alquran lebih dari 10 juz, sebagai contoh hadiah Umrah untuk hafiz/hafizah yang hafal Alquran 15 juz.
4. Gerakan Pemasangan Stiker “Satu Rumah Satu Hafiz”, sampai dengan tahun 2024 telah memasang stiker sebanyak 6.275 buah, yang berarti jumlah rumah yang telah memiliki Hafiz/Hafizah di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 6.275 rumah.
5. Pembagian Kartu Tanda Anggota (KTA) Guru Tahfiz. Pada tahun 2024 telah disiapkan sebanyak 722 Kartu untuk diserahkan kepada guru-guru tahfiz. Pemegang KTA Guru Tahfiz memperoleh keuntungan atau fasilitas dari pemerintah, di antaranya adalah pemegang KTA dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai pengajar tahfiz, mendapatkan fasilitas kesehatan prioritas bagi yang belum memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah daerah, serta mendapatkan prioritas untuk menerima manfaat dari program-program yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
6. Program “Maghrib Menghantar Berkah”, yaitu mengaji bersama para penghafal Alquran yang dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Tanah Datar, diawali dengan sholat Maghrib berjamaah, Tasmi’ Alquran, dialog dengan Bupati Tanah Datar, dan ditutup dengan sholat Isya’ berjamaah. Sepanjang tahun 2024, sebanyak 55 rumah tahfiz telah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program ini.

Sasaran strategis meningkatnya keagamaan masyarakat dengan indikator Jumlah Hafiz/Hafizah yang diwisuda diharapkan memiliki dampak menciptakan generasi muda yang mencintai Al-Quran dan melakukan aktifitas positif melalui pembelajaran Al-Quran sehingga diharapkan akan memperbaiki akhlak generasi muda dan menjadi benteng terhadap pengaruh negatif perkembangan zaman. Untuk mendukung indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Program Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial dan PPPA dan Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah.



Kegiatan Wakaf 1.000 Hafiz ke-IX Tahun 2024 di Istano Basa Pagaruyung



"Maghrib Menghantar Berkah"



"Maghrib Menghantar Berkah"



"Maghrib Menghantar Berkah"



"Maghrib Menghantar Berkah"

I.2 Jumlah Peningkatan Nilai Zakat

Indikator "Jumlah peningkatan nilai zakat yang diterima oleh amil zakat" pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.11.540.498.673,- berdasarkan data Bagian Kesra Setda Kabupaten Tanah Datar yang bersumber dari Badan Amil Zakat (BAZ) Tanah Datar, zakat yang terkumpul adalah sebesar Rp.12.266.406.140,- berdasarkan data tersebut tingkat capaian kinerja indikator ini sebesar 106,29%.

Berdasarkan hasil survei Baznas RI, potensi zakat di Kabupaten Tanah Datar adalah sebesar 29 miliar rupiah. Dari potensi tersebut, 10,51 miliar rupiah terkumpul di Baznas Tanah Datar dan sisanya diperkirakan disalurkan secara mandiri oleh para muzakki. Upaya yang dilakukan untuk mendukung capaian indikator tersebut antara lain:

1. Menggalakkan pembayaran Zakat oleh Aparatur Sipil Negara (ASN),

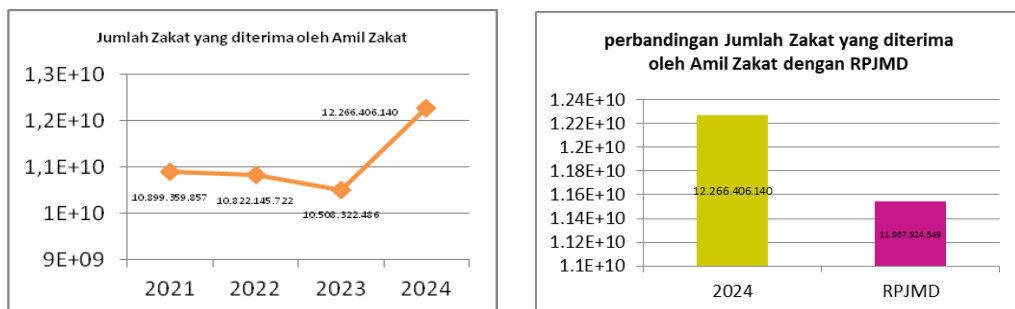
sebagian besar zakat yang terkumpul bersumber dari zakat yang dibayarkan oleh ASN. Di samping itu, zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Tanah Datar juga berasal dari zakat pegawai pada instansi vertikal, badan usaha, dan lainnya.

2. Sosialisasi pengelolaan zakat bagi seluruh Wali Nagari se-Kabupaten Tanah Datar.
3. Pendampingan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di nagari untuk mengoptimalkan pelaksanaan 5 Program Baznas, yaitu bantuan kesehatan bantuan kemanusiaan, bantuan pendidikan, bantuan modal serta bantuan dakwah dan advokasi.
4. Membuka Konter Zakat dan Layanan Muzakki.
5. Membentuk relawan fundraising Zakat

Berikut adalah perkembangan penerimaan zakat tahun 2021 – 2024:

Grafik 3.2

Perkembangan Penerimaan Zakat Tahun 2021 – 2024



Sosialisasi Pengelolaan Zakat untuk Wali Nagari se-Kabupaten Tanah Datar



Penyerahan Zakat Konsumtif Lebaran Tahun 2023

II. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Ketahanan Adat dan Budaya Berlandaskan ABS SBK

Untuk mengukur capaian indikator “Persentase peningkatan lembaga adat dan budaya yang aktif” digunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Lembaga adat dan budaya yang aktif} = \frac{\text{Jumlah lembaga adat dan budaya yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh lembaga adat dan budaya}} \times 100\%$$

Target dan capaian realisasi indikator kinerja Persentase peningkatan lembaga adat dan budaya yang aktif sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
3.	Persentase peningkatan lembaga adat dan budaya yang aktif	95%	96.39%	101,46%

Data Peningkatan Lembaga Adat dan Budaya yang Aktif adalah sebagai berikut:

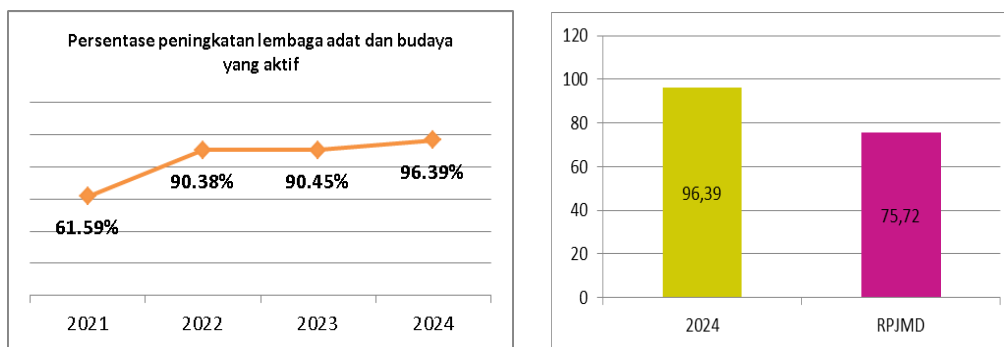
No	Perangkat Daerah	Jumlah Lembaga Budaya	Lembaga Budaya Aktif	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	243 Lembaga budaya/sanggar seni	225 Lembaga budaya/ sanggar seni	seni tari, pagelaran, qasidah, silat, dan kegiatan budaya lainnya
2	Dinas PMD PPKB	90 Lembaga budaya	90 Lembaga budaya	Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kecamatan dan Kabupaten Tanah Datar
3	Dinas Sosial dan PPPA	90 Lembaga budaya	90 Lembaga budaya	Bundo Kandung Kecamatan , Kabupaten dan Nagari
4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	75 Lembaga budaya	75 Lembaga budaya	Sanggar Seni Pertunjukan
	Jumlah	498 Lembaga budaya	480 Lembaga budaya	

Dengan demikian, secara keseluruhan, terdapat 498 lembaga adat dan budaya, dan sebanyak 480 (96,39%) di antaranya masih aktif melaksanakan

kegiatan.

Berikut adalah perkembangan capaian indikator “Persentase peningkatan lembaga adat dan budaya yang aktif” tahun 2021 – 2024:

Grafik 3.3
Persentase Lembaga Adat dan Budaya yang Aktif



Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS-SBK”, yang dilakukan melalui fasilitasi lembaga adat budaya yang ada di Kabupaten Tanah Datar agar aktif dalam melestarikan adat dan budaya. Pada tahun 2024 capaian indikator kinerja ini didukung oleh:

1. Pelaksanaan program unggulan daerah Satu Nagari Satu Event yang bertujuan melestarikan budaya, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Melalui program ini, keberadaan sanggar seni dan budaya menjadi lebih hidup karena mendapatkan tempat untuk mengekspresikan diri melalui pementasan berbagai kesenian dan budaya yang berkembang di masing-masing nagari, seperti seni tari, sholawat dulang, randai, alu katentong, talempong, pasambahan, kesenian Dikia Mundam, dan lain sebagainya. Pada tahun 2024, sebanyak 22 nagari turut serta menyukseskan event ini. Dari 22 nagari tersebut, 9 nagari telah melaksanakan kegiatan tersebut pada tahun 2023 dan kembali berpartisipasi dalam event ini pada tahun 2024. Sebanyak 13 nagari baru mulai berpartisipasi menyemarakkan event tersebut di tahun 2024.
2. Peningkatan kompetensi dan pembinaan lembaga KAN serta Fasilitasi kegiatan LKAAM Kabupaten Tanah Datar oleh Dinas PMD PPKB
3. Pembangunan Balai Adat Nagari Andaleh Kecamatan Sungayang.
4. Program Niniak Mamak turun ke sekolah, pada tahun 2024 dilaksanakan pada empat sekolah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Pembinaan terhadap 8 komunitas budaya oleh Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan.

6. Pembinaan terhadap 20 komunitas kesenian.
7. Pembinaan seni melalui Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) yang pada tahun 2024 dilaksanakan di empat sekolah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Pemberian bantuan peralatan seni dan budaya kepada 18 kelompok seni dan budaya.
9. Penyelenggaraan Atraksi seni budaya (seni kreatif) secara rutin yang dilaksanakan di Lapangan Cindua Mato oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.





III. Sasaran Strategis 3: Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor penggerak utama perekonomian

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
4.	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	30,19%	27,18%	90.03%
5.	Nilai Tukar Petani/NTP	> 100	102.96 ^{*)}	102.96%

^{*)} Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024

III.1 Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB

PDRB Kabupaten Tanah Datar dari Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Berdasarkan harga konstan pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp 3.151,72 milyar, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp 3.140,34 milyar atau tumbuh sebesar 0.36%. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih tercatat sebagai penyokong perekonomian utama di Kabupaten Tanah Datar yaitu sebesar 27,18%.

Capaian indikator “Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB” dan “Nilai Tukar Petani” dihitung dengan cara sebagai berikut:

$\text{Kontribusi sektor pertanian dan perikanan thd PDRB} = \frac{\text{PDRB Sektor pertanian/perikanan}}{\text{PDRB}} \times 100\%$
$\text{Nilai Tukar Petani} = \text{data BPS}$

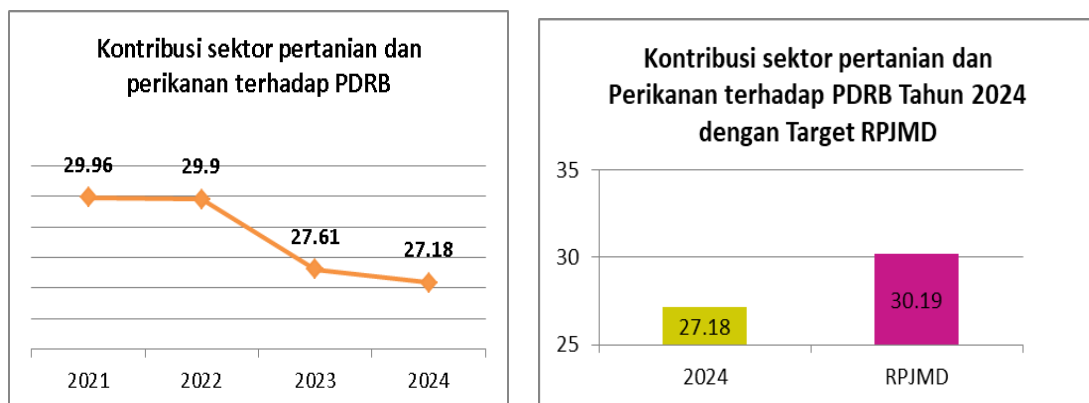
Berdasarkan hasil penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku, total nilai tambah bruto seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2024 sekitar Rp. 17.496,03 miliar. Sebagai salah satu daerah agraris di Sumatera Barat, PDRB Kabupaten Tanah Datar masih didominasi oleh sektor pertanian. Meningkatnya produk pertanian mulai dari tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan memberikan dukungan kuat terhadap meningkatnya nilai tambah sektor Pertanian. Dengan demikian, harapan perekonomian Kabupaten Tanah Datar secara keseluruhan masih tergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. PDRB Tanah Datar masih didominasi oleh sektor pertanian. Pada tahun 2024 target indikator kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB sebesar 30,19% dengan realisasi 27,18% dan tingkat capaian sebesar 90,03%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya pertumbuhan pada sektor perekonomian lainnya di Kabupaten Tanah Datar seperti sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial (8,75%), jasa lainnya (8,37%) dan penyediaan akomodasi makan minum (6,28%).

Berikut ini adalah perkembangan capaian kinerja indikator “Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB” dalam kurun waktu 2021 – 2024:

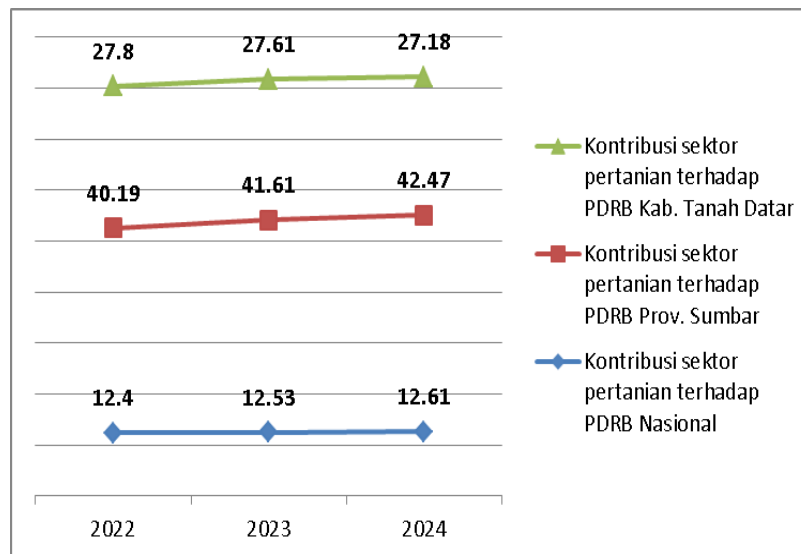
Grafik 3.4

Perkembangan Capaian Indikator Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB



Berdasarkan grafik tersebut di atas, kontribusi sektor pertanian dan perikanan pada tahun 2024 semakin menurun setiap tahunnya. Namun jumlah PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan pada tahun 2024 meningkat dari tahun 2023 sebesar Rp 11,38 miliar.

Berikut perbandingan Kontribusi dan nilai PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Tanah Datar dengan Provinsi dan Nasional tahun 2022-2024.



Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar didukung oleh produksi sektor pertanian dan perikanan, berikut ini adalah data produksi pertanian tahun 2021 – 2024:

Tabel 3.3
Produksi Pertanian dan Perikanan Tahun 2021 – 2024

No.	Komoditi Pertanian	2021	2022	2023	2024
1.	Peningkatan produksi tanaman pangan (ton)	343.120,84	327.777,46	332.146,58	287.516,35
2.	Peningkatan produksi tanaman hortikultura (ton)	48.737,32	52.223,89	47.871,49	42.562,86
3.	Peningkatan produksi tanaman perkebunan (ton)	18.428,55	18.577,69	18.764,52	18.863,75
4.	Peningkatan produksi peternakan (kg)	15.936,07	15.356,07	17.580,53	16.812,94
5.	Peningkatan populasi ternak (ekor)	2.642.918	2.779.006	2.805.268	2.850,182
6.	Peningkatan produksi perikanan (ton)	12.084,50	12.827,81	13.002,81	11.050,70
	a. Perikanan budidaya (ton)	9.782,54	10.062,30	10.131,79	8.119,86
	b. Perikanan tangkap (ton)	2.301,95	2.765,51	2.871,02	2.930,84

Analisa target dan capaian kinerja komoditi pertanian dan perikanan tahun 2024

a. Tanaman Pangan

Peningkatan produksi tanaman pangan dihitung dari jumlah produksi 3 (tiga) komoditi tanaman pangan utama yaitu: padi, jagung, dan kacang tanah. Rata-rata capaian target peningkatan produksi tanaman pangan pada tahun 2024 adalah sebesar 333.872,71 ton dengan realisasi total sebesar 287.516,35 ton (91,71%).

Tabel 3.4
Produksi Tanaman Pangan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Peningkatan produksi tanaman pangan (ton)			
	a. Padi	307.000,00	259.048,21	84,34
	b. Jagung	26.327,71	21.881,22	83,11
	c. Kacang tanah	545,00	586,91	107,69
	T o t a l	333.872,71	281.516,34	91,71

Realisasi produksi padi tahun 2024 sebesar 259.048,21 ton (84,34%) dan produksi jagung sebesar 21.881,22 ton (83,11%) belum mencapai target yang ditetapkan sementara kacang tanah sebesar 586,91 ton (107,69%) sudah mencapai target yang ditetapkan. Capaian peningkatan produksi tanaman pangan pada tahun 2024 281.516,34 ton, lebih rendah dibandingkan dengan capaian produksi pangan tahun 2023 332.146,57 ton atau mengalami penurunan sebesar 15,24%.

Berikut faktor penyebab tidak tercapainya target peningkatan produksi tanaman pangan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024:

1. Penurunan produksi padi disebabkan oleh terjadinya banjir bandang pada tanggal 8 April 2024 di Kecamatan Tanjung Baru dan Banjir Bandang pada tanggal 11 Mei 2024 yang mengakibatkan rusaknya lahan sawah di Kabupaten Tanah Datar seluas 335 Ha. Selain itu adanya serangan hama tikus pada lahan petani di Kabupaten Tanah Datar.
2. Penurunan produksi jagung dipengaruhi adanya penurunan luas tanam yang menyebabkan terjadinya penurunan luas panen. Penurunan luas tanam dipengaruhi adanya kenaikan harga benih jagung dan ketersediaan bantuan benih jagung kepada kelompok tani/ petani. Untuk penanaman jagung, petani masih sangat bergantung kepada bantuan benih yang diberikan.

b. Tanaman Hortikultura

Peningkatan produksi tanaman hortikultura dihitung dari produksi 4 (empat) komoditi hortikultura utama yaitu: cabe, tomat, bawang merah dan Jeruk. Rata-rata capaian target peningkatan produksi tanaman hortikultura pada tahun 2024 adalah sebesar 48.350,21 ton dengan realisasi total belum mencapai target yang ditetapkan dan hanya sebesar 42.562,86 ton (88,70%). Untuk capaian peningkatan produksi tanaman hortikultura tahun 2024 42.562,86 ton, lebih rendah dibandingkan dengan capaian produksi hortikultura tahun 2023 47.871,49 ton mengalami penurunan sebesar 11,09%.

Tabel 3.5
Produksi Tanaman Hortikultura Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Peningkatan produksi tanaman hortikultura (ton)			
	a. Cabe	19.569,50	14.249,31	72,81
	b. Tomat	19.279,81	20.261,50	105,09
	c. Bawang merah	4.118,10	4.784,19	116,17
	d. Jeruk	5.382,80	3.267,86	60,71
	T o t a l	48.350,21	42.562,86	88,70

Realisasi target produksi untuk 3 komoditi cabe sebesar 14.249,31 ton (72,81) belum mencapai target, tomat sebesar 20.261,50 ton (105,09%) dan bawang merah sebesar 4.784,19 ton (116,17%) telah melebihi target yang ditetapkan, sedangkan jeruk sebesar 3.267,86 ton (60,71%) belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Secara umum faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi komoditi pertanian (hortikultura) disebabkan oleh beberapa factor antara lain:

- Adanya erupsi Gunung Merapi pada bulan desember 2023 dan masih berulang sampai akhir tahun 2024 sehingga abu vulkanik yang keluar dari erupsi Gunung Marapi menyebabkan banyak tanaman masyarakat yang mati dan gagal panen terutama tanaman cabe dan jeruk.
- Alih fungsi lahan pertanian terutama sawah untuk pembangunan diluar sector pertanian.
- Terbatasnya kuota pupuk subsidi dan mahalnya harga pupuk non subsidi
- Adanya serangan hama dan penyakit tanaman

c. Tanaman Perkebunan

Peningkatan produksi tanaman perkebunan dihitung dari jumlah produksi 4 (empat) komoditi perkebunan utama yaitu: karet, kakao, tebu, kopi dan casiavera. Rata-rata capaian realisasi produksi komoditi perkebunan pada tahun 2024 sebesar 18.863,75 ton telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan persentase capaian target produksi sebesar 18.858,28 ton (100,05%). Untuk capaian peningkatan produksi tanaman perkebunan tahun 2024 18.863,75 ton, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian produksi tanaman perkebunan tahun 2023 18.764,52 ton mengalami peningkatan sebesar 0,53%.

Tabel 3.6
Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Peningkatan produksi tanaman perkebunan (ton)			
	a. Karet	7.265,22	7.266,75	100,02
	b. Kakao	4.153,54	4.154,00	100,01
	c. Tebu	4.983,90	4.985,00	100,02
	d. Kopi	1.358,56	1.360,00	100,11
	e. Casiavera	1.097,06	1.098,00	100,09
	T o t a l	18.858,28	18.863,75	100,05

Program kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan ini adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya dengan rincian kegiatan Penyediaan pupuk (NPK) untuk sarana produksi perkebunan sebanyak 3.384 Kg dan bantuan sarana pertanian untuk petani tembakau berupa hansprayer, chainsaw dan mesin potong rumput.
2. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Hortikultura dan Perkebunan dengan rincian kegiatan Bantuan pupuk NPK dan Kompos untuk tanaman kopi dan tebu sebanyak 13.000 Kg.

d. Produksi Peternakan

Peningkatan produksi peternakan terdiri dari jumlah produksi 5 (lima) jenis komoditi peternakan yaitu produksi daging sapi, daging kerbau, daging kambing, daging ayam dan telur. Rata-rata capaian realisasi indikator kinerja peningkatan produksi peternakan sebesar 16.812.940 kg belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 17.668.000 kg dengan tingkat capaian 98,08%. Untuk capaian peningkatan produksi peternakan (daging) tahun 2024 16.812.940 Kg, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian produksi peternakan tahun 2023 16.479.912,27 Kg mengalami peningkatan sebesar 1,67%. Untuk capaian peningkatan populasi peternakan (unggas) tahun 2024 2.850.182 ekor, lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan populasi peternakan tahun 2023 2.805.268 ekor atau mengalami peningkatan sebesar 1,60%.

Tabel 3.7
Produksi Peternakan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Peningkatan produksi peternakan (kg)			
	a. Daging sapi	1.428.250	1.461.530	102,33
	b. Daging kerbau	131.030	120.620	92,06
	c. Daging kambing	179.400	190.050	105,94
	d. Daging ayam	5.231.440	5.086.440	96,88
	e. Telur	10.698.230	9.972.290	93,21
	Total	17.668.000	16.812.940	98,08

Program kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Peningkatan Produksi Peternakan ini adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prsarana Pertanian Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan dengan rincian kegiatan Pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong serta pemeliharaan sarana dan prasarana pasar ternak dan RPH.
2. Kegiatan Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah Kabupaten/kota Sub Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan Penyakit hewan Zoonosis dengan uraian kegiatan Pelaksanaan penjaringan/penangkapan hewan penular rabies terutama anjing liar di beberapa lokasi. Dengan anggaran tersedia penjaringan/ penangkapan dan eliminasi HPR hanya terlaksana pada 8 Nagari dari 75 Nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Antara

lain pada Nagari Simabur yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2024, Nagari Batu Basa pada tanggal 7 Februari 2024, Nagari Cubadak pada tanggal 7 Mei 2024, Nagari Batipuh Ateh pada tanggal 8 Mei 2024, Nagari Labuah pada tanggal 4 Juni 2024, Nagari Sawah Tangah pada tanggal 16 Juli 2024 dan Nagari Tabek Patah pada tanggal 17 Juli 2024. Jumlah HPR yang dapat tereliminasi sebanyak 300 ekor.

3. Kegiatan Pengawasan dan Pemasukan dan pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Sub Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Lintas Daerah kabupaten/Kota dengan melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan serta penyemprotan desinfektan pada 6 pintu masuk Kabupaten Tanah Datar yaitu:
 1. Kubu Kerambil, Kecamatan Batipuh
 2. Ombilin, Kecamatan Rambatan
 3. Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting
 4. Sitangkai, Kecamatan Lintau Buo
 5. Simpang Baso, Kecamatan Tanjung Alam
 6. Kecamatan Lintau Buo Utara
4. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan rincian kegiatan Pengambilan, dan pengiriman dan pemeriksaan sampel bahan pangan asal hewan dan terlaksananya pengambilan sampel medis veteriner.
5. Pengambilan dan pemeriksaan sampel bahan pangan asal hewan. Sampel bahan pangan yang diambil berupa daging sapi, daging ayam, telur ayam dan bakso. Pengambilan dilaksanakan pada beberapa pasar, antara lain pasar Batusangkar, pasar Padang Ganting, pasar Balai Tangah, pasar Sungai Tarab, pasar Tabek Patah untuk sampel daging sapi, daging ayam, telur ayam.

Program kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Peningkatan Populasi Ternak ini adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/pakan dengan uraian kegiatan pengadaan

obat- obatan ternak 300 liter, plastik glove 4.000 lembar, plastik sheet 2.500 batang, N2 cair 800 liter dan BOP Petugas IB untuk 1.250 ekor.

2. Sub Kegiatan Pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dengan melaksanakan obat-obatan ternak 6 botol dan pakan ternak 1 paket, Pengadaan konsentrat sebanyak 3.240 Kg.
3. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Sub Kegiatan Pengadaan benih/bibit ternak yang bersumber dari Daerah Kabupaten/Kota lain. Dengan rincian kegiatan pengadaan kambing 48 ekor, itik 160 ekor, ayam 338 ekor, sapi 6 ekor, mesin tetas 2 unit, bahan kandang 1 paket, telur tetas 600 butir, bahan pengolahan pakan kambing, itik dan ayam kampung 3 paket, SL (Kambing, ayam dan itik) 3 paket (60 orang) dan pengadaan obat-obatan 1 paket.
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner kegiatan Pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah Kabupaten/kota sub kegiatan pelayanan jasa medik veteriner dengan uraian kegiatan pelayanan medis.

Adapun penurunan tingkat produksi ini disebabkan antara lain sebagai berikut:

1. Penurunan produksi ternak komoditi daging kerbau dan daging ayam disebabkan dengan kurangnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi daging kerbau.
2. Sementara penurunan produksi ternak komoditi ternak besar dan ternak kecil disebabkan adanya bencana erupsi Gunung Marapi yang mengakibatkan petani kesulitan mendapatkan pakan ternak, sehingga banyak ternak masyarakat yang mati karena kekurangan bahan makanan dan juga termakan abu vulkanik dari erupsi Gunung Marapi, selain itu bencana banjir Bandang yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2024 menyebabkan banyak ternak petani yang hanyut terbawa arus banjir.

e. Produksi Perikanan

Peningkatan kinerja bidang perikanan diukur dari indikator peningkatan produksi perikanan. Tolak ukur capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan berasal dari peningkatan jumlah produksi komoditi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap di danau dan perairan umum lainnya.

Tabel 3.8
Produksi Perikanan Tahun 2022 – 2024

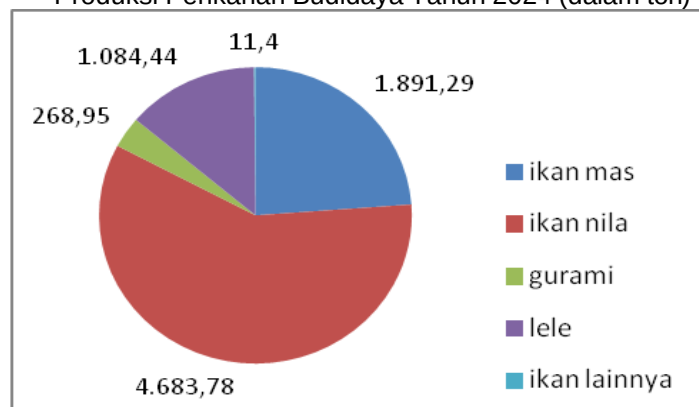
No.	Indikator Kinerja	2022	2023	2024		
				Target	Realisasi	%
1.	Peningkatan produksi perikanan (ton)	12.827,81	13.002,81	11.050,70	11.050,70	100
	a. Perikanan budidaya (ton)	10.062,30	10.131,79	8.125,54	8.119,86	99,93
	b. Perikanan tangkap (ton)	2.765,51	2.871,02	2.925,16	2.930,84	100,19

Produksi perikanan terdiri atas produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Peningkatan produksi perikanan budidaya sebagian besar bersumber dari produksi ikan nila dan ikan mas, dua komoditi yang paling tinggi permintaannya karena tingginya minat masyarakat untuk mengkonsumsi dua jenis ikan tersebut. Sementara, budidaya jenis ikan yang lain tidak begitu tinggi produksinya, sebagai contoh ikan gurami karena masa pembudidayaannya yang lama sehingga masyarakat beralih ke jenis ikan lain yang lebih pendek masa budidayanya. Berikut adalah data produksi ikan budidaya pada tahun 2022 – 2024:

Tabel 3.9
Produksi Ikan Budidaya 2022 – 2024

Uraian	2022	2023	2024
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (dalam ton):			
Ikan Mas	3.315,40	3.282,80	1.891,29
Ikan Nila	4.756,90	5.055,90	4.683,78
Gurami	646,05	478,37	268,95
Lele	1.327,74	1.309,99	1.084,44
Ikan lainnya	16,17	4,76	11,40

Grafik 3.5
Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2024 (dalam ton)



Terlihat bahwa produksi ikan mas, ikan nila, ikan gurame dan ikan lele mengalami penurunan yang disebabkan adanya bencana banjir lahar dingin di Kabupaten Tanah Datar yang mengakibatkan banyak nya kolam masyarakat yang mengalami kerusakan. Hasil perikanan tangkap sebagian besar berasal dari hasil tangkapan ikan bilih. Produksi perikanan tangkap mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023 s/d 2024 terjadi peningkatan produksi ikan bilih karena adanya pelarangan penggunaan alat tangkap bagan dan penggunaan KJA (Keramba Jaring Apung) di Danau Singkarak sehingga meningkatnya populasi ikan bilih di Danau Singkarak. Pembangunan perikanan dilaksanakan melalui 2 (dua) program utama yaitu Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. Program pengelolaan perikanan budidaya dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas usaha perikanan budidaya dengan meningkatkan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi SDM pembudidaya ikan baik teknis dan maupun manajerial serta fasilitasi terhadap akses teknologi. Program pengelolaan perikanan tangkap dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas usaha perikanan budidaya dengan upaya utamanya adalah pemberdayaan nelayan kecil, meningkatkan sarana prasarana serta peningkatan kelestarian sumber daya perikanan.



Peningkatan Produksi Perikanan



Peningkatan Produksi Perikanan



Peningkatan Produksi Perikanan



Peningkatan Produksi Perikanan

Meningkatkan kesejahteraan petani di daerah memerlukan pendekatan yang menyeluruh, yang mencakup berbagai aspek mulai dari dukungan pemerintah, inovasi teknologi, hingga peningkatan akses pasar. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat membantu:

- a. Akses terhadap Modal dan Pembiayaan
 - Memperkenalkan program pinjaman dengan bunga rendah atau hibah untuk petani agar mereka dapat membeli alat pertanian modern, benih unggul, atau bahan bakar yang dibutuhkan dalam produksi.
 - Mendorong lembaga keuangan untuk memberikan pelayanan pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh petani, terutama yang belum bankable.
- b. Peningkatan Akses terhadap Teknologi
 - Menyediakan pelatihan mengenai teknologi pertanian terkini, seperti system irigasi modern, penggunaan drone untuk pemantauan lahan, atau aplikasi untuk manajemen hasil pertanian.
 - Mendorong adopsi pertanian cerdas (*Smart farming*) yang dapat meningkatkan produktivitas dengan menggunakan data dan analisis.
- c. Diversifikasi produk dan penyuluhan
 - Mendorong petani untuk melakukan diversifikasi produk pertanian agar tidak terlalu bergantung pada satu komoditas yang mungkin rentan terhadap fluktuasi harga
 - Menyediakan penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan petani dalam mengelola tanah dan memanfaatkan produk sampingan pertanian (seperti kompos atau produk olahan)
- d. Perbaikan Infrastruktur
 - Meningkatkan infrastruktur pertanian seperti jalan yang baik, penyediaan fasilitas penyimpanan yang memadai, dan jaringan

distribusi yang efisien agar hasil pertanian lebih mudah dijual dengan harga yang lebih tinggi.

- Membangun fasilitas pengolahan produk pertanian lokal agar petani dapat menambah nilai jual dari hasil pertanian mereka.
- e. Akses Pasar yang Lebih Baik
 - Memfasilitasi petani agar dapat menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas dengan menghubungkan mereka dengan distributor atau pemasaran berbasis digital.
 - Menyediakan pelatihan tentang cara mengolah pemasaran produk dan membuat kemasan yang menarik untuk pertanian mereka.
- f. Perlindungan Sosial dan Asuransi
 - Membangun sistem asuransi pertanian yang melindungi petani dari kerugian akibat bencana alam atau gagal panen.
 - Menyediakan program jaminan sosial bagi petani untuk meningkatkan kesejahteraan mereka di luar pendapatan utama mereka.
- b. Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat
 - Mendorong kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan kelompok masyarakat dalam pengembangan agribisnis, misalnya dengan menciptakan kemitraan antara petani dan perusahaan untuk mempermudah pemasaran produk.

Dengan kombinasi pendekatan ini, diharapkan kesejahteraan petani dapat meningkat secara signifikan, menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan di daerah tersebut.

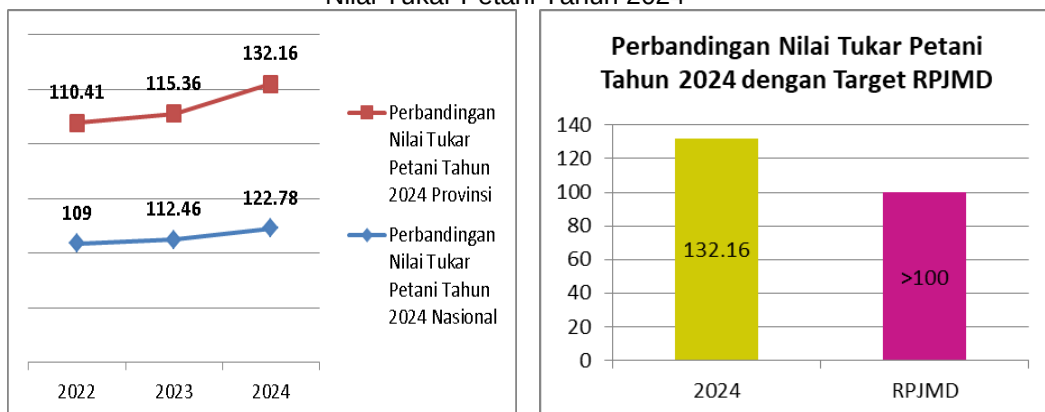
III.2. Nilai Tukar Petani

Capaian indikator NTP diukur dengan menggunakan data yang dirilis oleh BPS Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data BPS, NTP Sumatera Barat tahun 2024 adalah sebesar 132,16 (>100) yang diperoleh dari hasil pemantauan harga-harga di pedesaan seluruh kabupaten di Sumbar (kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai) pada Desember 2024. $NTP > 100$ mengindikasikan Indeks Harga yang Diterima oleh Petani lebih besar daripada Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani. Petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan. Artinya daya beli komoditas/produk pertanian terhadap barang dan jasa yang saat ini dibeli oleh petani baik untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari maupun untuk biaya produksi dan penambahan barang modal telah cukup baik.

Perbandingan Nilai Tukar Petani Nasional pada bulan Desember 2024 sebesar 122,78 dan Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Barat 2024 sebesar 132,16. Berikut tabel perbandingan Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Barat dengan nasional tahun 2022-2024.

NTP	2022	2023	2024
Sumatera Barat	110,41	115,36	132,16
Nasional	109	112,46	122,78

Grafik 3.6
Nilai Tukar Petani Tahun 2024



Upaya yang telah dilakukan Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 untuk mencapai NTP >100 sebagai berikut:

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi, Jagung dan Kacang Tanah), hortikultura (Cabe, Tomat, Bawang dan jeruk), Tanaman Perkebunan (Karet, Tebu, Kopi dan Cassiavera), Produksi Peternakan (Daging Sapi, Daging Kerbau, Daging Kambing, Daging Ayam dan Telur) dan populasi Ternak (Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas)
2. Penerapan dan Pengawasan pupuk bersubsidi berupa pelatihan penyusunan RDK bagi petani dan pengawasan peredaran pupuk bersubsidi.
3. Penerapan Teknologi Tanaman Pangan berupa kajian varietas padi unggul lokal dan pengembangan varietas padi unggul lokal.
4. Penerapan mekanisme pertanian berupa pengadaan alsintan, bimtek penggunaan alsintan, penerapan penggunaan alsintan.
5. Penanganan dan Pengendalian OPT berupa Sarana dan Prasarana pengendalian OPT, kecamatan yang melaksanakan pengendalian OPT, Pertemuan SL-Pengendalian Hama Terpadu.
6. Peningkatan Kapasitas penyuluh pertanian dan petani berupa training penyuluh pertanian, pendampingan penyuluh terhadap kelompok tani, pelatihan kelompok tani, pembinaan kelompok tani.
7. Meningkatnya ketersediaan bibit unggul berupa penangkar yang dibina,

bantuan bibit unggul hortikultura ,pemurnian varietas unggul.

8. Meningkatkan ketersediaan sumber-sumber air berupa pembangunan/rehabilitasi dam parit, pembangunan/rehabilitasi embung, pembangunan irigasi air tanah, pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tersier.
9. Pengendalian alih fungsi LP2B berupa Diseminasi LP2B, kajian LP2B, dan dokumen Penyusunan Naskah Akademik LP2B.

IV. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Daya Saing UMKM, Koperasi dan Ekonomi Kreatif

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
6.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	14%	10,38%	74,14%
7.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	13,95%	14,21%	101,86%

*) Data BPS Tahun 2024

IV.1 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Target indikator *Kontribusi* sektor industri terhadap PDRB tahun 2024 sebesar 14% dengan capaian sebesar sebesar 10,38% dan tingkat capaian sebesar 74,14%. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 sebesar 10,38% atau sebesar Rp. 1.201,10 Miliar menurut PDRB harga berlaku.

Berikut rumus perhitungan capaian indikator Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB dan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB.

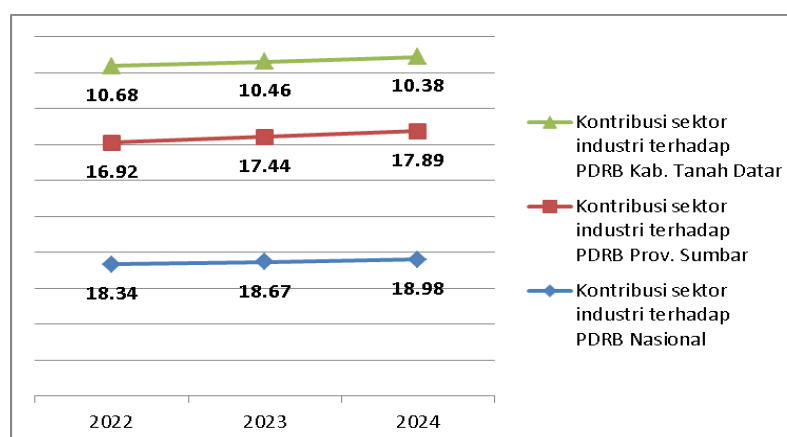
<i>Kontribusi sektor industri thd PDRB</i>	$\frac{PDRB \text{ Sektor } \textit{industri}}{PDRB} \times 100\%$
<i>Kontribusi sektor perdagangan thd PDRB</i>	$\frac{PDRB \text{ Sektor } \textit{perdagangan}}{PDRB} \times 100\%$

Sektor industri berdasarkan data BPS adalah penyumbang PDRB terbesar ketiga setelah sektor pertanian dan sektor perdagangan. Berdasarkan data Dinas KUKMP Tahun 2024, jumlah unit usaha Industri Kecil dan Menengah berdasarkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Data Industri Kecil dan
Menengah 2021 - 2024

No	Jenis Industri	2021	2022	2023	2024
1.	Pangan	1.738	1.882	2.271	3.356
2.	Sandang dan Kulit	754	796	839	1.061
3.	Kerajinan	205	221	318	481
4.	Kimia dan Bangunan	149	149	170	319
5.	Logam, Mesin dan Elektronika	56	56	106	339
	Jumlah	2.902	3.104	3.704	5.556

Berikut perbandingan Kontribusi dan nilai PDRB Sektor Industri Kabupaten Tanah Datar dengan Provinsi dan Nasional tahun 2022-2024.



Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Tanah Datar adalah dengan meningkatkan daya saing industri daerah melalui:

1. Peningkatan SDM dan daya saing IKM dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian antara lain Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Wirausaha, Pelatihan teknis dan/atau pendampingan produksi, Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk, Pendampingan Persiapan Dokumen GMP dan HACCP, Pendampingan Persiapan Dokumen ISO 9001, serta sosialisasi sertifikasi Halal dan TKDN yang diikuti oleh sebanyak 140 IKM.
2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kelembagaan Sentra IKM yang meliputi Pelatihan Manajemen Mutu dan Pengelolaan Sentra IKM dan Layanan Proses Bisnis Sentra IKM yang diikuti 100 IKM.
3. Pelaksanaan Penyusunan Informasi dan Analisis Pasar IKM Ekspor yang

diikuti oleh 15 Pelaku IKM.

4. Fasilitasi Penerbitan Sertifikasi Halal bagi 50 pelaku IKM.
5. Fasilitasi Penerbitan Sertifikasi TKDN bagi 140 pelaku IKM.
6. Fasilitasi Penerbitan HKI bagi 3 Pelaku IKM
7. Jumlah IKM formal pada tahun 2024 sebanyak 291 unit.
8. Fasilitasi penerbitan Nomor Izin Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha oleh Dinas PMPTSP.
9. Penyelenggaraan pelatihan oleh Dinas KUKMP yang diikuti oleh 30 UMKM.
10. Pelaksanaan pembangunan sentra olahan komoditi hortikultura di Kecamatan Salimpaung.
11. Fasilitasi standarisasi produk dan pelaku IKM (Sertifikat halal, Sertifikat TKDN dan HKI merek)
12. Fasilitasi penerbitan NIB bagi pelaku usaha
13. Fasilitasi promosi produk IKM (promosi pameran Dekranasda Provinsi, Inacraft, Bazar Cindua Mato) Bantuan peralatan bagi kelompok IKM)
14. Bantuan peralatan bagi kelompok IKM

Gambar 3.
Kegiatan Pelatihan Teknis dan/atau Pendampingan Produksi dan Pelatihan Pengembangan dan Diversifikasi Produk





Peningkatan industri komoditas unggulan daerah memerlukan strategi yang terpadu, dengan fokus pada penguatan daya saing, pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, serta pengembangan sektor-sektor pendukung. Berikut beberapa rekomendasi untuk meningkatkan industri komoditas unggulan daerah:

c. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

- Pelatihan dan Pendidikan

Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petani, produsen, atau pelaku industri untuk meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan produksi, pemrosesan, dan pemasaran komoditas unggulan.

- Penerapan Teknologi Tepat Guna

Mengadopsi teknologi pertanian atau industri yang lebih efisien untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas, seperti penggunaan alat pertanian modern, teknik pengolahan yang lebih baik, dan penerapan sistem manajemen berbasis data.

- Pemanfaatan Benih atau Bibit Unggul

Mendorong penggunaan benih atau bibit unggul yang memiliki daya tahan yang lebih tinggi terhadap penyakit dan perubahan iklim, serta produktivitas yang lebih baik.

d. Diversifikasi Produk dan Pengolahan

- Pengembangan Produk Olahan

Memanfaatkan hasil komoditas unggulan untuk dikembangkan menjadi produk olahan bernilai tambah, seperti pengolahan pangan, kerajinan, atau produk lainnya yang lebih bervariasi dan siap saji.

- Inovasi Produk

Mendorong inovasi dalam produk turunan, seperti pengembangan varian baru, kemasan yang lebih menarik, serta produk yang ramah lingkungan dan sesuai dengan tren pasar saat ini.

- e. Peningkatan Akses Pasar dan Pemasaran
 - Memperluas Akses Pasar Lokal dan Global
Membantu pelaku industri dalam memasarkan produk mereka, baik di pasar lokal, nasional, maupun internasional melalui pameran, perdagangan daring, atau melalui kerjasama dengan perusahaan besar.
 - Pemasaran Digital
Mendorong penggunaan platform e-commerce atau media sosial untuk memasarkan produk komoditas unggulan secara lebih luas, serta menjangkau konsumen yang lebih banyak, terutama di pasar global.
 - Kemitraan dengan Industri Besar
Membentuk kemitraan dengan perusahaan besar yang memiliki jaringan distribusi yang luas, guna memperkenalkan produk komoditas unggulan ke pasar yang lebih besar.
- f. Perbaikan Infrastruktur dan Logistik
 - Peningkatan Infrastruktur
Membangun atau memperbaiki infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas distribusi lainnya untuk memudahkan proses produksi dan distribusi komoditas unggulan.
 - Sistem Rantai Pasok yang Efisien
Mengembangkan sistem logistik yang lebih efisien agar produk dapat sampai ke konsumen dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang terjaga.
- g. Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Pemerintah
 - Fasilitasi Kemitraan antara Pemerintah dan Swasta
Menyusun kebijakan yang mendukung kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta, misalnya dengan memberikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pengembangan komoditas unggulan.
 - Peningkatan Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung
Pemerintah dapat memperkenalkan kebijakan yang lebih ramah bagi industri komoditas unggulan, seperti insentif pajak, pelatihan, dan program dukungan lainnya.
- h. Pengembangan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
 - Praktik Pertanian atau Industri Ramah Lingkungan
Mendorong penerapan praktik produksi yang ramah lingkungan,

seperti pertanian organik atau penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam industri pengolahan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam.

- Pemeliharaan Keanekaragaman Hayati
Menjaga dan memelihara keanekaragaman hayati untuk memastikan keberlanjutan komoditas unggulan, baik untuk kebutuhan pasar maupun untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem.
- i. Pemberdayaan dan Penguatan Koperasi atau Kelompok Usaha
 - Penguatan Koperasi dan Kelompok Usaha
Mendorong pembentukan dan penguatan koperasi atau kelompok usaha yang mengelola komoditas unggulan agar dapat mengakses sumber daya, pelatihan, serta pasar dengan lebih mudah.
 - Pendampingan dan Dukungan Teknis
Memberikan pendampingan teknis dan bisnis kepada koperasi atau kelompok usaha agar mereka dapat mengelola usaha dengan baik dan berkelanjutan.

Dengan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi tersebut secara komprehensif, diharapkan industri komoditas unggulan daerah dapat berkembang dengan pesat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

IV.2 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2024 adalah sebesar 14,21% angka ini menunjukkan perekonomian Kabupaten Tanah Datar terjadi peningkatan pada sektor perdagangan yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan senilai Rp. 1.599,46 Miliar.

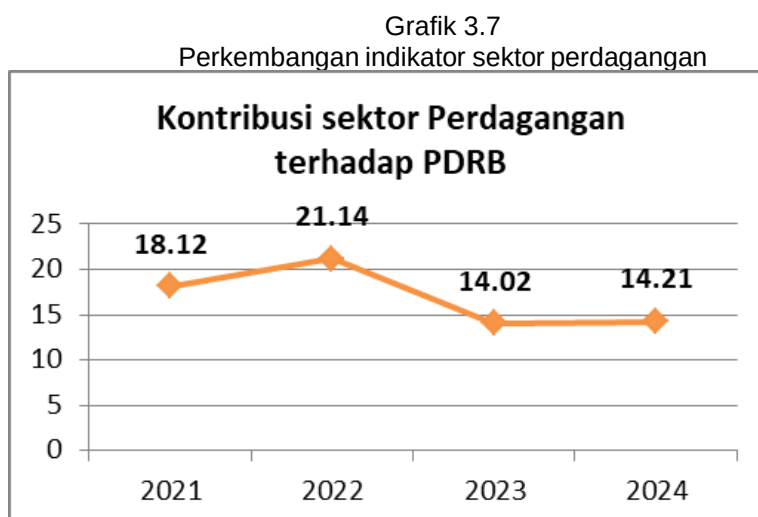
Untuk mendukung peningkatan kontribusi sektor perdagangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan upaya melalui Dinas KUKMP sebagai berikut:

1. Melakukan pengelolaan pasar serikat C Batusangkar yang memfasilitasi 257 pedagang dan pembinaan terhadap Pasar Nagari. Kegiatan ini didukung oleh Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
2. Pemantauan harga 15 bahan pokok dan 9 barang penting pada Pasar Rakyat dan distributor utama untuk menjaga stabilitas harga dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah. Kegiatan ini didukung oleh Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
3. Dalam rangka meningkatkan nilai perdagangan produk dan komoditi

unggulan Daerah melalui pemasaran digital, pada tahun 2024 Dinas KUKMP memfinalisasikan Website Etalase Digital Produk dan komoditi kebanggaan (EPIK) Kabupaten Tanah Datar. Sejalan dengahal tersebut juga dilakukan Fasilitasi dan evaluasi 30 peserta yang sudah mendapatkan pelatihan ekspor pada tahun 2021-2023 dalam rangka penguatan dan pengembangan kapasitas pelaku usaha berorientasi ekspor. Kegiatan ini didukung oleh program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

4. Melaksanakan pengawasan perdagangan sesuai kewenangan daerah yang meliputi pengawassan tertib niaga, pengawasan metrologi legal, barang dan jasa pada Pasar Nagari, Pelaku Usaha SPBU/Pertashop, agen dan pangkalan LPG 3 kg, distributor dan pengecer pupuk dan pestisida bersubsidi, pelaku usaha barang dalam keadaan terbungkus serta edukasi dan literasi peraturan perdagangan kepada siswa SMP dan Pelaku Usaha Mikro. Kegiatan ini didukung oleh program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
5. Penyelenggaraan pelayanan publik wajib daerah berupa tera/tera ulang terhadap 270 alat-alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya (UTTP) di pasar serikat C Batusangkar dan 16 SPBU/Pertashop untuk memastikan terjaminnya kebenaran ukuran bagi konsumen/masyarakat. Kegiatan ini didukung oleh program Kegiatan ini didukung oleh program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Berikut ini adalah perkembangan PDRB sektor sektor perdagangan serta perkembangan kontribusinya pada PDRB Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 – 2024:



Tahun	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Kab. Tanah Datar	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Prov. Sumbar	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Nasional
2022	13.89	30.58	12.85
2023	14.02	32.03	12.94
2024	14.21	33.57	13.07

16 Mei 2024 10.06.28
0.4567827S 100.5932771E
Baringin
Kecamatan Lima Kaum
Kabupaten Tanah Datar
Sumatera Barat

16 Mei 2024 10.20.19
0.4572979S 100.5939144E
Baringin
Kecamatan Lima Kaum
Kabupaten Tanah Datar
Sumatera Barat

16 Mei 2024 10.28.47
0.4569382S 100.5930961E
Baringin
Kecamatan Lima Kaum
Kabupaten Tanah Datar
Sumatera Barat

16 Mei 2024 10.14.43
0.45718833333333336S 100.59368500000001E
Baringin
Kecamatan Lima Kaum
Kabupaten Tanah Datar
Sumatera Barat

V. Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja

Sasaran strategis 5 Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja diukur dengan indikator jumlah wirausaha baru, indikator ini merupakan salah satu program unggulan daerah dimana jumlah yang wirausaha baru yang ditargetkan 1000 orang per tahun. Target dan capaian indikator jumlah wirausaha baru tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
8.	Jumlah wirausaha baru	1.000	1061	106,10%

Capaian indikator “Jumlah wirausaha baru” diukur dengan cara menghitung jumlah wirausaha baru setiap tahunnya:

$$\text{Jumlah wirausaha baru} = \text{jumlah wirausaha baru setiap tahunnya}$$

Jumlah wirausaha baru yang tercipta selama tahun 2024 adalah sebanyak 1061 orang, yang terdiri dari urusan Tenaga Kerja, Urusan Koperasi dan UMKM, Urusan Pertanian dan Urusan Pariwisata dengan rincian sebagai berikut:

a. Urusan Tenaga Kerja	224
b. Urusan Koperasi dan UMKM	90
c. Urusan Pertanian	810
d. Urusan Pariwisata	27
Jumlah	1061

Upaya menumbuhkan wirausaha baru ini tidak lepas dari upaya pemerintah untuk menurunkan jumlah pengangguran, sekaligus upaya untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data dari Dinas KUKMP pada tahun 2024 terdapat 2.971 wirausaha yang diterbitkan Nomor Induk Berusaha menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Perdagangan. Wirausaha baru pada urusan Koperasi dan UMKM difasilitasi dalam bentuk pelatihan sebanyak 3 angkatan yang diberikan terhadap 90 Pelaku Usaha Mikro yang terdiri dari Pelatihan kewirausahaan bagi UMKM untuk 30 orang Pelaku Usaha Mikro, pelatihan manajemen produksi bagi UMKM untuk 30 orang Pelaku Usaha Mikro, pelatihan digitalisasi pemasaran produk UMKM bagi pelaku Usaha Mikro.

Berdasarkan data BPS Tahun 2024, tercatat jumlah angkatan kerja di Kabupaten Tanah Datar sebesar 217,07 ribu jiwa, dengan rincian 205.564 jiwa bekerja dan 11.506 jiwa pengangguran terbuka, dan bukan angkatan kerja 87,66

ribu jiwa. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk dapat menurunkan jumlah pengangguran adalah dengan meningkatkan kompetensi para calon tenaga kerja (pencari kerja) untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja pada lapangan usaha yang tersedia. Kesempatan kerja menurut lapangan usaha didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor industri pengolahan. Salah satu peluang untuk menciptakan wirausaha baru adalah melalui peningkatan kesempatan kerja pada sektor industri pengolahan.

Beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya menumbuhkan wirausaha baru antara lain:

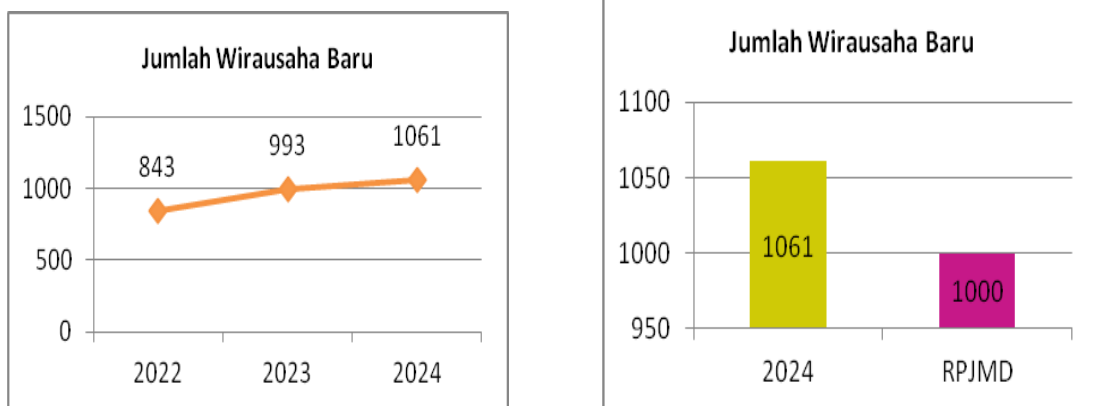
1. Fasilitasi penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri
2. Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan pembuatan souvenir, pembuatan kue dan roti, pemasangan jaringan listrik, Teknik informatika computer, menjahit, digital marketing, servis motor konvensional, manajemen pemasaran dan manajemen usaha yang dilaksanakan oleh Dinas PMPTS Naker. Kegiatan tersebut diikuti oleh sebanyak 304 pencari kerja.

(Tambah tabel peserta pelatihan)

3. Pelatihan kompetensi yang bersumber dari APBN, seperti pelatihan practical office, asisten pembuat pakaian, pembuatan roti dan kue, pemasangan instalasi listrik yang dilaksanakan oleh BLK Batusangkar.
4. Pelatihan keterampilan dasar bagi calon wirausaha baru yang dilaksanakan oleh Dinas PMPTSP Naker.
5. Memfasilitasi pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kemenaker RI di Padang.
6. Pelatihan tenun, menjahit, sulaman, mendesain motif yang dilaksanakan oleh Dinas KUKMP.

Pelatihan berbasis kompetensi secara khusus dilaksanakan untuk mengubah pola pikir generasi muda untuk tidak lagi menjadi pekerja, melainkan menjadi orang yang membuka lapangan kerja.

Grafik 3.9
Capaian Indikator Jumlah Wirausaha Baru



Pelatihan Jumlah Wirausaha Baru Tahun 2024

VI. Sasaran Strategis 6: Meningkatnya mutu pendidikan

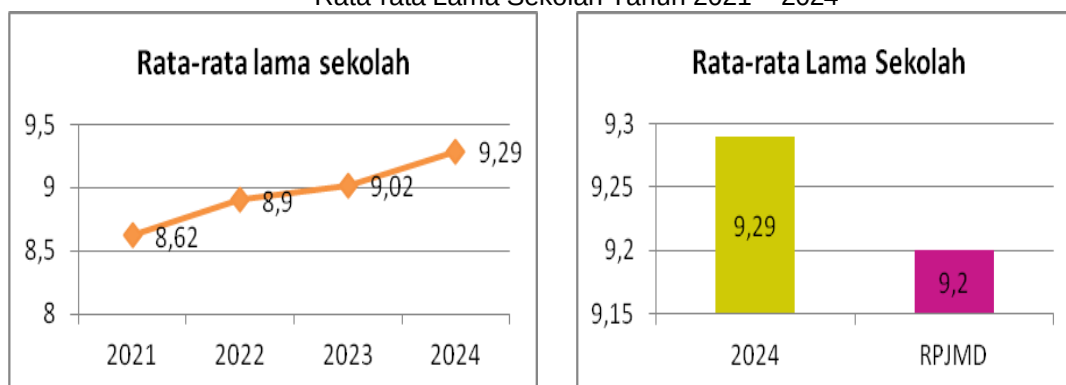
Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tanah Datar adalah “Rata-rata Lama Sekolah”, yaitu rata-rata lamanya pendidikan yang telah ditempuh oleh sekelompok orang dewasa (<25 tahun) di suatu wilayah. Berikut target dan realisasi capaian indikator rata-rata lama sekolah tahun 2024:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
9.	Rata-rata lama sekolah	9,02	9,29	102,99%

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026, Rata-rata lama sekolah juga digunakan untuk melihat sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. Pada tahun 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tanah Datar adalah 9,29 tahun, artinya rata-rata penduduk di Kabupaten Tanah Datar baru bisa menikmati Pendidikan sampai dengan kelas 3 SLTP. Angka tersebut sudah sama dengan

target program wajib belajar 9 tahun dan sudah memenuhi target RPJMD sebesar 9,2 tahun. Jika dilihat dari kurun waktu tahun 2021 hingga 2024, angka ini meningkat setiap tahunnya. Berikut adalah perkembangan capaian indikator rata-rata lama sekolah:

Grafik 3.10
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2021 – 2024



Untuk mendukung capaian target kinerja indikator Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah didukung oleh upaya yang dilakukan, antara lain:

1. Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah merupakan salah satu alat ukur peta mutu Pendidikan pada setiap satuan Pendidikan berdasarkan standar nasional Pendidikan. Hasil akreditasi mencerminkan potret setiap butir standar Pendidikan, yang terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian Pendidikan. Akreditasi ideal adalah “A”, namun demikian pencapaian nilai “B” sudah menunjukkan pencapaian sesuai standar nasional.

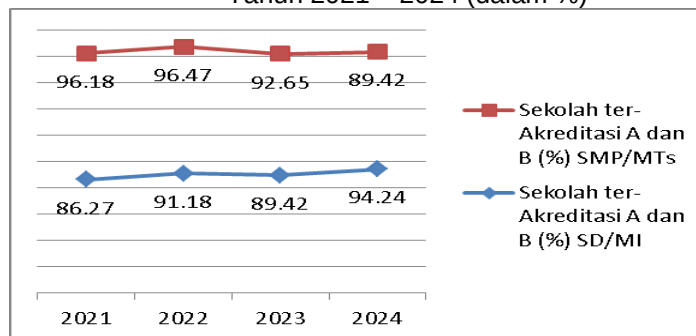
Berikut ini adalah data jumlah SD/MI dan SMP/MTs dan akreditasinya yang bersumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

Tabel 3.11
Tabel Jumlah Sekolah dan Akreditasinya

NO	JENJANG	PERINGKAT AKREDITASI SEKOLAH 2024				BELUM TERAKREDITASI	JUMLAH
		A	B	C	D		
1	SD	106	185	7	0	8	306
2	MI	3	1	3	0	0	7
	JUMLAH	109	186	10	0	8	313
3	SMP	19	32	6	0	1	57
4	MTs	14	28	1	1	3	47
	JUMLAH	33	60	7	1	3	104
	TOTAL	142	246	17	1	11	417

Sumber Data: LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024

Grafik 3.11
Perkembangan Data Sekolah Terakreditasi A dan B
Tahun 2021 – 2024 (dalam %)



2. Tenaga Pendidik (Guru)

Berdasarkan data BPS Tanah Datar Tahun 2024, di Kabupaten Tanah Datar terdapat sebanyak 3.116 guru PNS SD dan 1.210 guru PNS SMP dengan tingkat Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 3.12
Pendidikan Guru SD dan SMP Tahun 2024

Pendidikan Guru PNS SD dan SMP Tahun 2024							
	D1/di bawah D1	D2	D3	D4	S1	S2	Jumlah
SD	-	17	2	5	2.852	60	2.936
SMP	-	4	12	1	933	43	993
Jumlah	-	21	14	6	3.785	103	3.929

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Tabel 3.13
Angka Partisipasi Murni 2021 – 2024

Jenjang	2021	2022	2023	2024
SD	99.62	98.70	98,36	90.65
SMP	76.15	76.22	78,60	82.13

4. Bantuan Pendidikan

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memberikan bantuan pendidikan berupa:

- Bantuan perlengkapan siswa berupa pakaian seragam sekolah untuk siswa SD dan SMP dengan anggaran sebesar Rp.3.287.646.000,-

- b. Bantuan pendidikan yang disalurkan melalui Pokok Pikiran Anggota Dewan, sebanyak 453 siswa/wi SD/MI dan 352 siswa/wi SMP/MTs menerima bantuan pendidikan dengan total nilai Rp. 509.600.000,-.
- 5. Inovasi di bidang pendidikan

Pada tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar mengembangkan 2 (dua) buah inovasi, yaitu :

a. Klinik Kurikulum

Klinik Kurikulum bertujuan untuk memberikan bimbingan, pembinaan dan coaching kepada kepala sekolah dan guru dalam rangka penerapan kurikulum Merdeka. Klinik ini dilayani oleh seluruh pengawas sekolah, baik secara tatap muka maupun secara online.

b. Pendidikan Inklusi

Pendidikan Inklusi merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Pendidikan Inklusi dilaksanakan diseluruh sekolah SDN dan SMPN.



Gambar Partisipasi Siswa Usia 5-6 Tahun

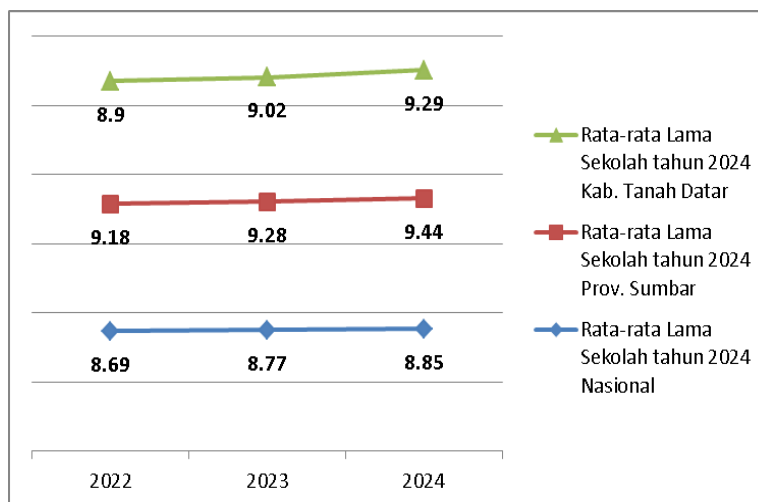


Gambar Partisipasi Siswa Usia 7-12 Tahun



Gambar Partisipasi Siswa Usia 13-15 Tahun

Berikut perbandingan capaian indikator Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tanah Datar dengan Provinsi dan Nasional tahun 2022-2024.



VII. Sasaran Strategis 7: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
10.	Umur harapan hidup	74,19	74,26	100.09%
11.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14%	14 ^{*)}	100%

^{*)}Data sementara

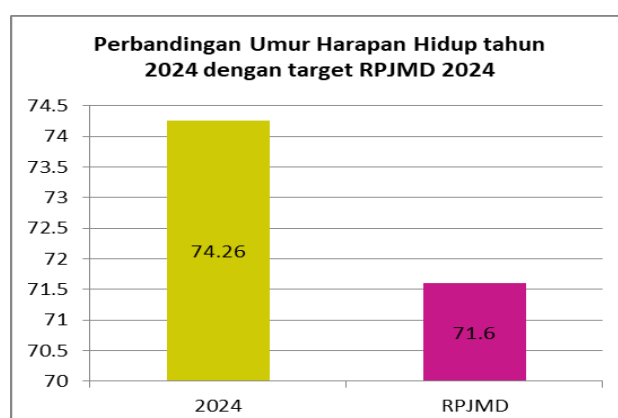
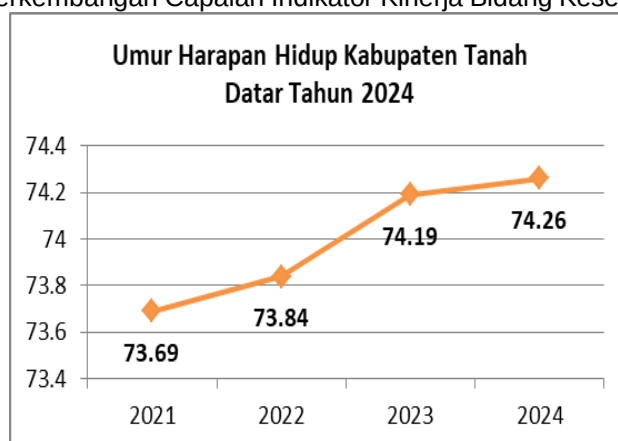
VII.1 Umur Harapan Hidup

Capaian indikator “Umur harapan hidup” diukur dengan menggunakan data sebagai berikut:

<i>Umur Harapan Hidup</i> = perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
<i>Prevalensi Stunting</i> = $\frac{\text{Jumlah balita stunting}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$

Target indikator Umur Harapan Hidup pada tahun 2024 adalah 74,19 realisasi sebesar 74,26 dengan tingkat capaian sebesar 100,09%. Berikut adalah perkembangan capaian indikator Umur Harapan Hidup tahun 2024.

Grafik 3.12
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Bidang Kesehatan



Peningkatan Umur Harapan Hidup dari tahun ke tahun menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam bidang kesehatan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor sosial dan faktor ekonomi. Umur harapan hidup dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ketersediaan pangan, Pendidikan, kebijakan pemerintah, perekonomian masyarakat, dan faktor-faktor lainnya.

Dari sisi ekonomi, semakin sejahtera masyarakat, maka semakin tinggi pula kemungkinan untuk memperpanjang usia hidup. Tingkat kesejahteraan penduduk di suatu tempat dapat dilihat dari besarnya pendapatan dan pengeluaran atau pola konsumsi masyarakatnya. Semakin tinggi pendapatan/pengeluaran, dapat diasumsikan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya.

Dari sisi kesehatan, dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar untuk mendukung capaian indikator Umur harapan hidup, dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Pencapaian UHC pada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar
2. Kegiatan penjangkaran kesehatan pada lansia dengan posyandu lansia
3. Kegiatan aksi bergizi pada anak sekolah kegiatannya berupa makan bersama, olahraga dan makan tablet tambah darah untuk remaja putri
4. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar berupa Kegiatan penjangkaran kesehatan pada anak sekolah



Pencapaian UHC tahun 2024 Kabupaten Tanah Datar



Penjangkaran Kesehatan pada Anak Sekolah



Penyerahan Bantuan Ambulace

VII.2 Prevalensi Stunting

Capaian indikator prevalensi stunting pada tahun 2024 pada saat laporan ini selesai disusun belum bisa diperoleh. Diperkirakan, prevalensi stunting tahun 2024 sama dengan target yang ditetapkan, yaitu 14%.

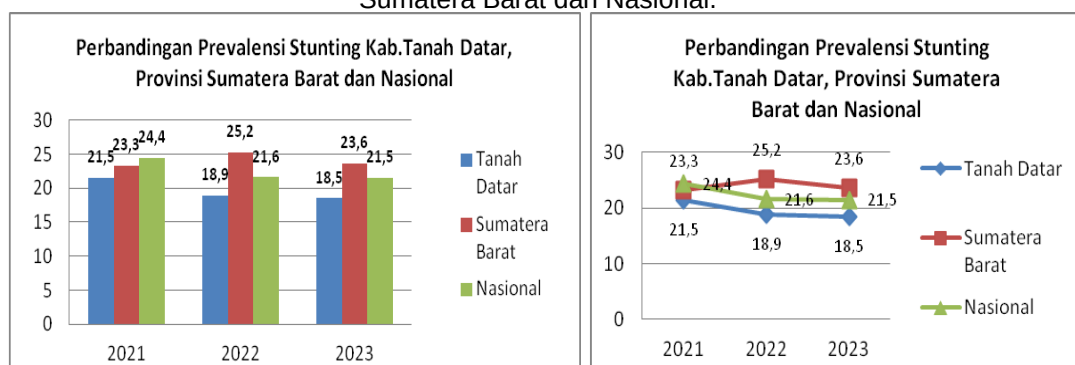
Data yang ditampilkan adalah data perkembangan Prevalensi Stunting tahun 2021-2023. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka kasus stunting di Kabupaten Tanah Datar cenderung terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Tingkat prevelansi stunting di Kabupaten Tanah Datar lebih baik jika dibandingkan dengan provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Tabel 3.14
Perbandingan Prevalensi Stunting Kabupaten Tanah Datar,
Sumatera Barat dan Nasional.

	2021	2022	2023
Tanah Datar	21,5	18,9	18,5
Sumatera Barat	23,3	25,2	23,6
Nasional	24,4	21,6	21,5

*Data Sementara (Data 2024 belum keluar)

Grafik 3.13
Perbandingan Prevalensi Stunting Kabupaten Tanah Datar,
Sumatera Barat dan Nasional.



Dalam rangka mengejar target nasional prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024, berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar antara lain:

1. Kegiatan pemberian tablet tambah darah untuk remaja Putri setiap minggu di sekolah.
2. Screening Anemia berupa pemeriksaan kesehatan termasuk kadar hemoglobin siswi kelas 7 & 10.
3. Pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil yang meliputi pemeriksaan *antenatal care* (ANC) sebanyak 6 kali (2 kali dengan dokter), termasuk penggunaan *USG*
4. Konsumsi tablet tambah darah untuk ibu hamil minimal 90 tablet selama kehamilan.
5. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang mengalami KEK (Kekurangan Energi Kronis)
6. Pemantauan tumbuh kembang balita meliputi kegiatan penimbangan, pengukuran panjang badan dan pemantauan perkembangan balita di Posyandu setiap bulan.
7. Pemberian ASI Eksklusif semenjak lahir sampai bayi berusia 6 bulan.
8. Pemberian makanan tambahan protein hewani bagi balita berupa pemberian protein hewani bagi anak 12-23 bulan berupa telur dan sumber protein lainnya.
9. Tatalaksana balita dengan masalah gizi berupa kegiatan merujuk balita dengan *weight faltering* dan masalah gizi dari posyandu ke puskesmas serta memberikan makanan tambahan untuk *weight faltering* dan gizi kurang, formula 75 dan formula 100 untuk gizi buruk.
10. Peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi meliputi pelayanan rutin kampanye bulan imunisasi dasar dan 3 imunisasi tambahan (PCV, Rotavirus, HPV), imunisasi tambahan PCV mencegah pneumonia dan Rotavirus mencegah diare sehingga mencegah terganggunya pertumbuhan.
11. Audit kasus stunting untuk mencari penyebab terjadinya kasus stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus stunting.
12. Pendataan kasus stunting sampai ke tingkat Nagari, untuk memastikan status masing-masing nagari, mana yang kasus stuntingnya turun atau justru meningkat.



Pemeriksaan HB dan Minum Tablet Tambah Darah Bersama di SMAN 2 LINTAU BUO



Pemantauan tumbuh kembang balita

VIII. Sasaran Strategis 8: Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
12.	Angka kemiskinan	4,06	4,28	94,85%
13.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60	58,53 ^{*)}	99,10%
14.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,9	97,62 ^{*)}	98,82%

^{*)} Data BPS 2023 (data sementara)

VIII.1 Angka Kemiskinan

Pertumbuhan yang berkualitas ditunjukkan salah satunya dengan terjadinya penurunan tingkat kemiskinan. Berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar dalam beberapa tahun terakhir sudah memberikan hasil yang baik. Dimana Tingkat kemiskinan Tanah Datar lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Tingkat kemiskinan Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023

cenderung menurun dan hal ini menunjukkan keberhasilan beberapa program kegiatan yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan, namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan persentase angka kemiskinan, hal ini disebabkan oleh terjadinya bencana banjir bandang pada Bulan Mei 2024 sehingga menyebabkan beberapa sektor mengalami penurunan seperti sektor pertanian, infrastruktur dan pariwisata.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam dokumen Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2024, pada tahun 2024 angka kemiskinan Kabupaten Tanah Datar adalah 4,28 dan menjadikan Tanah Datar daerah dengan tingkat kemiskinan paling rendah ke-6 di Sumatera Barat. Pada tahun 2024 tercatat sebesar 15 ribu orang (4,28% populasi). Diperkirakan butuh peningkatan Rp. 244 ribu (44% nilai Garis Kemiskinan) per individu untuk mengentaskan Kabupaten Tanah Datar dari kemiskinan ekstrim (total sekitar Rp. 93,53 milyar untuk seluruh penduduk), Sementara itu tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat pada 2024 sebesar 5,75%, sedangkan tingkat kemiskinan nasional pada 2024 sebesar 9,03%.

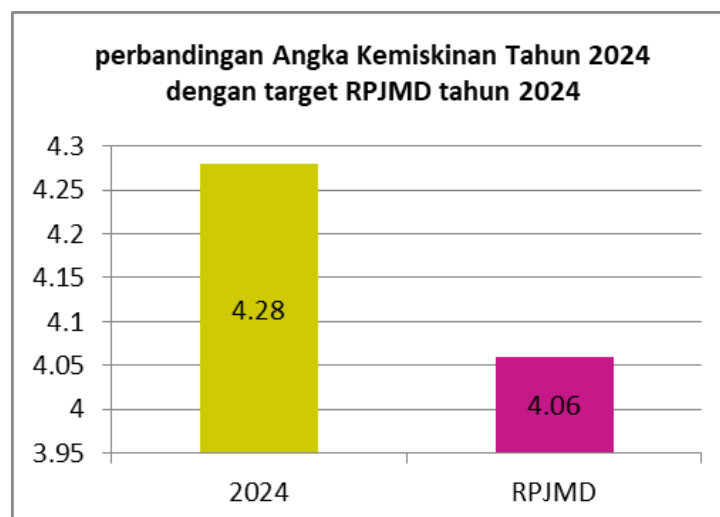
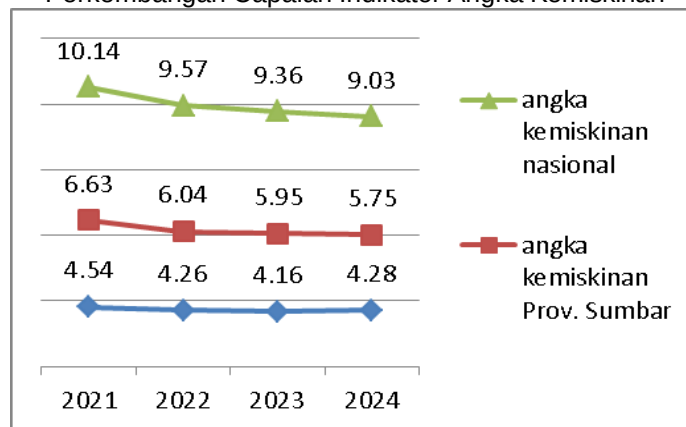
Tabel 3.15
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Sumbar
Tahun 2022 - 2024

No	Kabupaten/Kota	% Penduduk Miskin		
		2022	2023	2024
1	Kota Sawahlunto	2,28	2,27	2,33
2	Kota Solok	7,12	7,13	3,07
3	Kota Padang	4,26	4,17	4,06
4	Kota Bukittinggi	4,46	4,11	4,08
5	Kota Pariaman	4,13	4,20	4,26
6	Kab. Tanah Datar	4,26	4,16	4,28
7	Kota Payakumbuh	5,66	5,44	5,19
8	Kota Padang Panjang	5,14	5,24	5,31
9	Kab. Dharmasraya	5,56	5,56	5,32
10	Kab. Sijunjung	6,00	5,88	5,78
11	Kab. Padang Pariaman	6,25	6,34	6,27
12	Kab. Solok Selatan	6,51	6,45	6,56
13	Kab. Pasaman	6,85	6,8	6,74
14	Kab. Agam	6,22	6,60	6,83
15	Kab. Lima Puluh Kota	6,59	6,8	6,92

No	Kabupaten/Kota	% Penduduk Miskin		
		2022	2023	2024
16	Kab. Pasaman Barat	6,93	6,92	7,00
17	Kab.Solok	3,02	3,05	7,31
18	Kab. Pesisir Selatan	7,11	7,34	7,49
19	Kab. Kepulauan Mentawai	13,97	13,72	13,89
	SUMATERA BARAT	5,92	5,95	5,75
	NASIONAL	9,57	9,36	9,03

Perkembangan persentase penduduk miskin dapat dilihat melalui grafik berikut:

Grafik 3.14
Perkembangan Capaian Indikator Angka Kemiskinan



Dalam rangka menanggulangi kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan daerah, berupa:

1. Perlindungan sosial, baik berupa bantuan langsung maupun bantuan tidak

langsung kepada masyarakat. Bantuan langsung diberikan untuk membantu rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

- a. Bantuan langsung, Bantuan langsung diberikan kepada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berupa Bantuan Sosial uang Rp.2.000.000 per orang sebanyak 167 orang lanjut usia miskin, 162 orang penyandang disabilitas miskin, dan 467 orang anak miskin di luar panti asuhan dan bantuan alat usaha bagi 100 orang pelaku Industri Rumahan (IR) dan 1 (satu) Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
 - b. Bantuan tidak langsung, Bantuan tidak langsung diberikan dalam bentuk jaminan pelayanan kesehatan maupun bantuan pendidikan.
 - c. Bantuan pendidikan berupa bantuan sosial uang yang diberikan kepada 1.433 orang mahasiswa miskin dan siswa SLTA miskin
2. Pemerintah juga melaksanakan program untuk mengurangi beban produksi masyarakat, di antaranya adalah bantuan bajak gratis untuk petani, program Makan Rendang untuk mengatasi masalah rentenir dan bantuan untuk UMKM. Selain itu, mengingat masyarakat miskin adalah kelompok yang paling terdampak inflasi, pemerintah melakukan upaya untuk mengendalikan inflasi dilakukan melalui peningkatan produksi pertanian yang menjadi penyumbang inflasi, seperti cabe merah, beras, bawang merah, tomat dan telur. Untuk menjaga daya beli masyarakat, Dinas Koperindag bersama dengan Bagian Perekonomian Setda melaksanakan operasi pasar untuk beberapa jenis komoditi, seperti gula, minyak goreng, bawang merah, cabe, dll.

Salah satu program perlindungan sosial dan kerawanan pangan adalah penyaluran cadangan pangan berupa beras untuk masyarakat terdampak bencana banjir bandang/galodo yang terjadi pada bulan Mei 2025 sebanyak 25 ton dan penyerahan paket Sembako untuk balita di Kecamatan X Koto pada bulan April 2024 sebanyak 61 paket yang terdiri dari 1 sak telur, susu lactogen sesuai umur, kacang hijau dan beras. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan memberikan akses kepada keluarga miskin, khususnya ibu hamil dan anak, untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan yang disediakan pemerintah. Pada tahun 2024, sebanyak 10,82 persen masyarakat Tanah Datar menerima manfaat program ini



Penyerahan paket Sembako untuk balita di Kecamatan X Koto

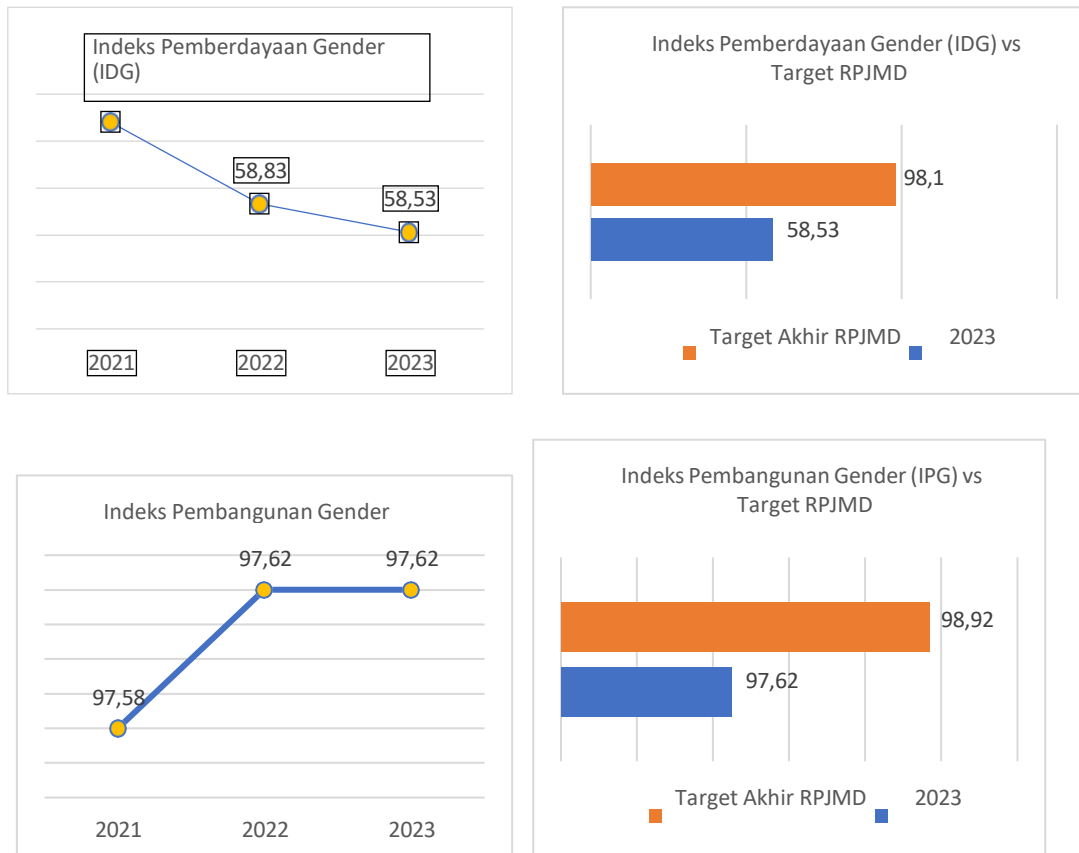


Penyaluran beras untuk masyarakat terdampak bencana banjir bandang

VIII.2 Indeks Pemberdayaan dan Pembangunan Gender

Data capaian IDG dan IPG Kabupaten Tanah Datar diperoleh dari data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Sampai dengan laporan ini selesai disusun, data tahun 2024 belum dapat diperoleh karena belum dirilis oleh BPS. IPG sendiri dihitung dari rasio antara IPM laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, idealnya nilai IPG idealnya mendekati 100. Apabila nilai IPG di bawah 100, hal ini menandakan capaian pembangunan perempuan masih di bawah capaian pembangunan laki-laki. IDG digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta presentase laki-laki dalam posisi profesional, teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan.

Grafik 3.15
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Pemberdayaan dan Pembangunan Gender*



**data sementara*

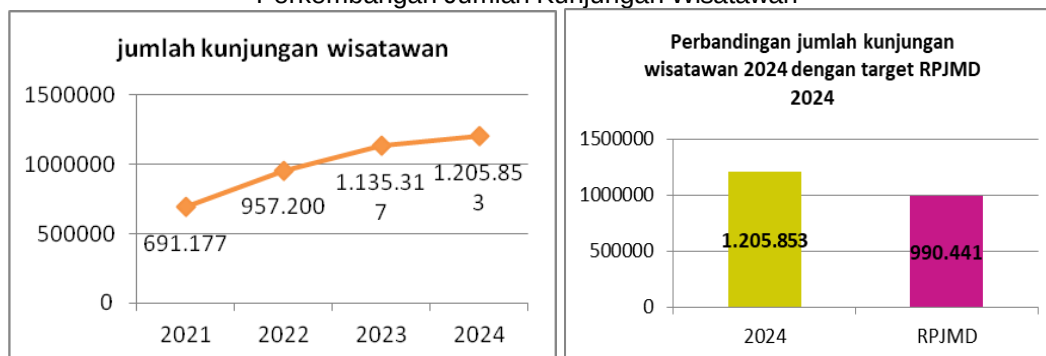
IX. Sasaran Strategis 9: Peningkatan Daya Saing Pariwisata Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Potensial

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
15.	Jumlah kunjungan Wisatawan	1.200.000	1.205.853	100,49%
16.	Lama tinggal wisatawan (hari)	2	1	50,00%

IX.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan

Pada tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tanah Datar sudah melebihi dari target sebesar 100,49% atau sebanyak 1.205.853 orang wisatawan. Berikut adalah perkembangan capaian indikator Jumlah kunjungan wisatawan:

Grafik 3.16
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan



Jumlah kunjungan wisatawan yang ditargetkan sebanyak 1.200.000 terealisasi sebanyak 1.205.853 (100,49%), meningkat bila dibandingkan dengan jumlah wisatawan pada tahun 2023 sebanyak 1.135.317 wisatawan, atau meningkat sebanyak 70.536 wisatawan. Apabila dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2023, maka jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2024 meningkat sebanyak 6,21%. Berikut adalah data kunjungan wisatawan pada objek-objek wisata di Tanah Datar:

Tabel 3.16
Kunjungan Wisatawan Tahun 2018 – 2024 per Objek Wisata

No.	Jumlah Wisatawan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1.297.786	1.218.576	665.780	691.177	957.200	1.135.317	1.205.853
1	Istano Basa Pagaruyung	420.744	395.389	191.754	238.088	322.397	348.624	251.168
2	Lembah Anai	140.598	99.067	74.365	26.021	76.968	96.483	44.044
3	Panorama Tabek Patah	23.755	23.376	75.635	65.366	37.655	12.669	6.557
4	Puncak Pato	33.751	27.358	33.910	16.138	18.491	28.794	35.905
5	Tanjung Mutiara	53.033	51.740	46.659	66.143	64.645	25.239	26.361
6	Batu Angkek-Angkek	12.672	11.832	4.416	6.161	6.607	4.051	6.997
7	Batu Batikam	11.544	11.535	1.807	10.011	1.840	1.677	1.391
8	Batu Basurek	11.044	10.950	1.975	10.285	2.043	1.108	1.392
9	Nagari Tuo Pariangan	245.391	242.009	41.665	57.211	185.387	127.664	110.886
10	Aie Angek Padang Ganting	55.507	50.910	58.319	81.974	62.691	66.408	49.362
11	Kincia Kamba Tigo	33.754	28.610	-	-	-	-	-
12	Tan Kayo	-	-	-	-	-	70.024	35.729
13	Puncak Aua Sarumpun	51.657	50.875	75.841	75.644	35.069	20.161	25.850
14	Pandai Sikek	40.841	40.496	32.540	7.683	2.947	3.470	17.940
15	Pacu Jawi	54.561	58.484	7.430	-	50.300	42.880	67.362
16	Wisata Pendaki	17.525	17.378	12.670	22.732	-	2.107	0

No.	Jumlah Wisatawan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1.297.786	1.218.576	665.780	691.177	957.200	1.135.317	1.205.853
17	Gunung							
18	Event Kepariwisataaan	73.992	52.520	-	7.720	90.160	180.392	128.355
19	Destinasi Digital Pasar Van der Capellen	17.417	46.047	6.794	-	-	1.100	2.045
20	Desa Wisata Pagaruyung Pakarak River Park	-	-	-	-	-	2.637	390
21	Batu Badinding	-	-	-	-	-	1.400	3.834
22	Tanjung Indah	-	-	-	-	-	43.594	37.151
23	Tabek Ganggam	-	-	-	-	-	31.304	32.205
24	Desa Wisata Sumpu	-	-	-	-	-	1.598	890
25	Lubuak Soda	-	-	-	-	-	20.424	0
26	Rumah Tuo Balimbing	-	-	-	-	-	818	4.662
27	Bukit Siduali	-	-	-	-	-	691	1.125
28	TOTAL	1.297.786	1.218.576	665.780	691.177	957.200	1.135.317	1.205.853

Dinas Parpora

Berikut adalah beberapa upaya yang telah dilaksanakan untuk mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tanah Datar:

1. Festival Pesona Minangkabau merupakan agenda tahunan yang beranjak dari program unggulan Satu Nagari Satu Event. Kabupaten Tanah Datar sebagai wilayah tertua dan sebagai tempat asal usul etnis Minangkabau, ikut bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal. Pada tahun 2024 Festival Pesona Minangkabau dilaksanakan di Istano Basa Pagaruyung dan Lapangan Cindua Mato. Adapun rangkaian kegiatan acara Festival Pesona Minangkabau tahun 2024 yaitu acara dibuka oleh Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Fahmy Akmal, mewakili Menteri Pariwisata. Acara menampilkan berbagai sajian, seperti kuliner Minangkabau tempo dulu, kampung kopi, lomba fotografi, makan bajamba, pasar UMKM Minangkabau, dan Paju Jawi. Acara ditutup oleh Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra pada Minggu sore dengan penampilan tari kolosal dari Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Tarab dan Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Tanjung Emas.



2. Pacu Jawi merupakan atraksi budaya anak nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Pacu Jawi merupakan olahraga budaya local yang sudah go international. Pelaksanaan Alek Pacu Jawi di Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan secara bergiliran pada 4 Kecamatan yaitu, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Sungai Tarab dan Kecamatan Rambatan.



3. Gowes Bareng Luhak Nan Tuo 2 yang dihadiri lebih dari 2000 peserta dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 September 2024 dengan start dan finish di depan Lapangan Cindua Mato Batusangkar Kabupaten Tanah Datar.



4. *Launching Calendar of Event 2024* dilaksanakan di Pangeran Beach Hotel, Padang pada tanggal 8 Maret 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 200 orang tamu undangan yang berasal dari dalam dan luarr Kabupaten Tanah Datar. *Launching Calendar of Event 2024* diresmikan oleh Bupati Tanah

Datar, Bapak Eka Putra, SE, MM yang didampingi tamu undangan lainnya. Acara berlangsung meriah dengan menampilkan seni budaya khas Tanah Datar yang berasal dari Kabupaten Tanah Datar. Acara berlangsung secara live di Youtube Tanah Datar TV. Kegiatan ini memuat rencana pelaksanaan 56 event untuk Satu Nagari Satu Event dengan rincian 37 Nagari pelaksanaan baru dan 19 Nagari pelaksana yang lama.

5. Sertifikasi CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability*) untuk dua obyek wisata, yaitu Istano Basa Pagaruyung dan Panorama Puncak Pato.
6. Gowes Bareng Luhak Nan Tuo 2, yang diikuti oleh lebih dari 2.000 peserta dari berbagai provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Jambi) dan Kabupaten/Kota lainnya.
7. Pagaruyung Islamic Art Festival, event Wisata bernuansa religi yang digelar di Istano Basa Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, untuk mendukung Visit Beatifull West Sumatera 2024.
8. Pengembangan Ekonomi Kreatif, salah satu tulang punggung dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Tanah Datar. Subsektor seni pertunjukan berkembang dengan baik di Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar telah dikukuhkan menjadi salah satu Kabupaten Kreatif (KaTa Kreatif) bidang Seni Pertunjukan di Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Hal ini menjadi *platform* dan daya ungkit baru dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Tanah Datar.

IX.2 Lama Tinggal Wisatawan

Capaian indikator Lama tinggal wisatawan dihitung dengan menggunakan sampel data hunian pada Hotel Emersia yang berada di tengah kota Batusangkar. Hotel Emersia diambil sebagai sampel selain sebagai satu-satunya hotel dengan kapasitas hunian yang cukup besar dan representatif, juga hotel dengan tingkat hunian yang cukup tinggi sehingga dipandang cukup untuk dijadikan sebagai sampel. Pada tahun 2024, rata-rata lama tinggal wisatawan adalah satu hari. Hal ini masih belum memenuhi target RPJMD, yaitu dua hari. Secara umum, dari sisi daya tarik fasilitas yang ada di Kota Batusangkar memang masih tertinggal apabila dibandingkan dengan kota/kabupaten tetangga seperti Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh (+/- satu jam perjalanan), bahkan Kota Padang yang jaraknya kurang lebih tiga jam dari Kota Batusangkar. Sementara itu, untuk menarik wisatawan masih sangat tergantung pada keberadaan Istano Basa

Pagaruyung.

Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya capaian kinerja indikator Lama Tinggal wisatawan adalah dari sisi daya tarik fasilitas yang ada di Kota Batusangkar memang masih tertinggal apabila dibandingkan dengan kota/kabupaten tetangga seperti Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh (+/- satu jam perjalanan), bahkan Kota Padang yang jaraknya kurang lebih tiga jam dari Kota Batusangkar. Sementara itu, untuk menarik wisatawan masih sangat tergantung pada keberadaan Istana Basa Pagaruyung.

Peningkatan lama tinggal wisatawan adalah salah satu cara untuk memperpanjang dampak ekonomi dari sektor pariwisata. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan lama tinggal wisatawan di suatu daerah:

a. Pengembangan Atraksi Wisata yang Beragam

- Diversifikasi Destinasi Wisata

Mengembangkan berbagai jenis atraksi wisata yang menarik, seperti wisata alam, budaya, kuliner, dan wisata edukasi. Semakin beragam pilihan wisata yang tersedia, semakin besar peluang wisatawan untuk tinggal lebih lama.

- Peningkatan Wisata Berbasis Budaya dan Sejarah

Mengembangkan dan mempromosikan wisata budaya dan sejarah lokal yang dapat menarik wisatawan untuk lebih lama mengunjungi tempat-tempat bersejarah, situs arkeologi, atau acara budaya yang berkelanjutan.

b. Peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur

- Peningkatan Infrastruktur Transportasi

Memperbaiki aksesibilitas transportasi, baik transportasi umum, jalan, maupun fasilitas bandara untuk mempermudah wisatawan bergerak antar destinasi.

- Fasilitas Wisata yang Nyaman

Menyediakan fasilitas wisata yang lebih lengkap dan nyaman, seperti tempat istirahat yang berkualitas, pusat informasi wisata, dan fasilitas umum yang memadai.

c. Paket Wisata yang Menarik dan Fleksibel

- Paket Wisata Multi-Destinas

Membuat paket wisata yang memungkinkan wisatawan untuk mengunjungi beberapa destinasi dalam satu kunjungan dengan durasi yang lebih lama.

- Paket Wisata Berdurasi Lama
Menyediakan paket wisata jangka panjang yang menawarkan pengalaman mendalam tentang daerah tersebut, seperti paket wisata yang mencakup kursus memasak, workshop seni, atau program tinggal di desa wisata.
 - Wisata Tematik
Mengembangkan paket wisata tematik yang menarik untuk wisatawan dengan minat khusus (misalnya, wisata petualangan, wisata kesehatan, wisata kuliner, atau wisata religi).
- d. Peningkatan Pengalaman Wisata
- Pengalaman Wisata yang Unik dan Interaktif
Meningkatkan pengalaman wisata dengan menawarkan kegiatan interaktif seperti tur lokal bersama penduduk setempat, pengalaman kuliner, atau kegiatan seni dan kerajinan tangan yang memberi kesan mendalam bagi wisatawan.
 - Festival dan *Event* Rutin
Menyelenggarakan acara atau festival tahunan yang dapat menarik wisatawan untuk datang dan tinggal lebih lama, seperti festival musik, kuliner, atau seni yang diadakan secara rutin di daerah tersebut.
- e. Promosi Wisata yang Terintegrasi
- Pemasaran Digital yang Efektif
Meningkatkan promosi melalui platform digital, termasuk media sosial dan situs web pariwisata, untuk menarik perhatian wisatawan dari berbagai negara. Informasi yang menarik dan lengkap dapat mendorong wisatawan untuk merencanakan kunjungan lebih lama.
 - Kerjasama dengan Influencer dan Blogger Wisata
Menggandeng *influencer* atau *blogger* wisata untuk mempromosikan keindahan dan potensi wisata daerah serta kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperpanjang waktu tinggal.
- f. Peningkatan Fasilitas Akomodasi
- Beragam Pilihan Akomodasi
Menyediakan beragam pilihan akomodasi, dari hotel bintang lima hingga penginapan yang lebih terjangkau seperti *homestay*, *guesthouse*, atau *eco-lodges* yang sesuai dengan preferensi wisatawan dari berbagai kalangan.
 - Peningkatan Kualitas Layanan Akomodasi

Meningkatkan kualitas layanan penginapan agar wisatawan merasa nyaman dan betah tinggal lebih lama, dengan pelayanan ramah, fasilitas lengkap, dan suasana yang mendukung.

g. Pengembangan Wisata Kesehatan dan *Wellness*

- Wisata Kesehatan

Mengembangkan wisata berbasis kesehatan seperti spa, yoga, meditasi, atau terapi kesehatan yang dapat membuat wisatawan menghabiskan waktu lebih lama untuk relaksasi dan pemulihan.

- Wisata *Wellness*

Menyediakan paket wisata *wellness* yang menggabungkan relaksasi fisik dan mental, seperti retreat kesehatan atau perjalanan spiritual yang dapat menarik wisatawan untuk tinggal lebih lama.

h. Kolaborasi dengan Sektor Lain

- Kerjasama dengan Industri Lain

Mengintegrasikan sektor pariwisata dengan sektor lain, seperti sektor kuliner, olahraga, atau pendidikan. Misalnya, mengadakan kursus atau pelatihan jangka panjang yang menarik wisatawan untuk tinggal lebih lama di daerah tersebut.

- Pengembangan Wisata MICE (*Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions*)

Menyediakan fasilitas untuk penyelenggaraan konferensi, seminar, atau pameran yang dapat menarik wisatawan bisnis untuk tinggal lebih lama.

i. Penyediaan Program Loyalitas dan Diskon

- Program Loyalitas

Mengembangkan program loyalitas bagi wisatawan yang sering berkunjung dengan memberikan potongan harga atau fasilitas khusus bagi wisatawan yang menginap dalam jangka waktu lama.

- Paket Diskon Jangka Panjang

Menawarkan paket diskon untuk wisatawan yang memesan akomodasi atau tiket wisata untuk durasi yang lebih lama, mendorong mereka untuk memperpanjang masa tinggal.

j. Pelibatan Masyarakat Lokal

- Pengalaman Autentik dengan Masyarakat Lokal

Menawarkan kesempatan bagi wisatawan untuk tinggal di komunitas

lokal, terlibat dalam kegiatan sehari-hari mereka, dan menikmati pengalaman budaya yang otentik. Ini dapat menciptakan alasan bagi wisatawan untuk tinggal lebih lama dan lebih menikmati destinasi.

Dengan mengimplementasikan beberapa atau seluruh rekomendasi ini, diharapkan dapat meningkatkan lama tinggal wisatawan, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata.

X. Sasaran Strategis 10: Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
17.	Opini BPK atas laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
18.	Indeks Pengawasan Kearsipan	B	BB (70,06)	150%
19.	Nilai SAKIP	71	67,60	95,21%

X.1 Opini BPK atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berhasil mendapat prediket wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2009 atau selama lima belas tahun berturut-turut. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 76/S-HP/XVIII.PDG/04/2024 tanggal 25 April 2024 menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar secara Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan opini tersebut, maka bisa dikatakan bahwa secara keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah bebas dari temuan yang material.

Capaian indikator “Opini BPK atas laporan keuangan” dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir selalu mendapatkan opini WTP sehingga diasumsikan, meskipun hasil audit belum keluar, capaian tahun 2024 diperkirakan akan sama dengan tahun sebelumnya, yaitu WTP.

Dalam rangka mempertahankan Opini BPK pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah melakukan beberapa hal, diantaranya:

1. Seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkomitmen dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah.
2. Upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan

keuangan dan aset daerah, perbaikan dan penyempurnaan secara berkelanjutan terhadap sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi para pengelola keuangan dan aset daerah.

Tabel Capaian Opini BPK tahun 2022-2023

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	2022	WTP	WTP	100%
2.	2023	WTP	WTP	100%
3.	2024	WTP	WTP	100%



Kegiatan Entry Meeting pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun anggaran 2024 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar)

X.2 Indeks Pengawasan Kearsipan

Capaian indikator berikutnya, yaitu “ **Indeks Pengawasan Kearsipan**”, meskipun secara umum nilai/skor yang diperoleh terus meningkat setiap tahun, namun masih belum mencapai target akhir RPJMD, yaitu “A”. Pada tahun 2024, nilai yang diraih adalah 70,06 dan masuk ke dalam kategori “BB” dengan kategori Baik untuk Indeks Pengawasan Kearsipan tahun 2024. Dimana nilai ini melebihi dari target yaitu B. Pencapaian ini tidak terlepas dari pengawasan kearsipan Kabupaten Tanah Datar pada setiap perangkat daerah sehingga dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

Berikut perkembangan data Indeks Pengawasan Kearsipan Tahun 2022-2024.

Tabel 3.17
Indeks Pengawasan Kearsipan Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	2022	B	C	50%
2.	2023	B	B	100%
3.	2024	B	BB (70,06)	150%

Permasalahan yang masih dihadapi sampai saat ini adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum mempunyai Gedung penyimpanan arsip yang memenuhi standar, pengelolaan arsip pada perangkat daerah belum semuanya menerapkan standar yang baku dan tenaga arsiparis sendiri jumlahnya masih belum sesuai dengan kebutuhan.

Faktor pendukung capaian kinerja indikator Indeks Pengawasan Kearsipan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan yaitu pengawasan terhadap perangkat daerah dan nagari dengan melakukan sosialisasi serta penilaian setiap tahun dan pemberian reward (berkelanjutan),
2. Peningkatan nilai IPK yaitu pelatihan terhadap SDM (tenaga arsiparis),
3. Pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip,
4. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pemeliharaan arsip pada Depo arsip yang menjadi salah satu aspek penilaian dalam pengawasan kearsipan eksternal, serta lembaga kearsipan daerah melengkapi regulasi kearsipan sesuai dengan instrument yang telah ada.

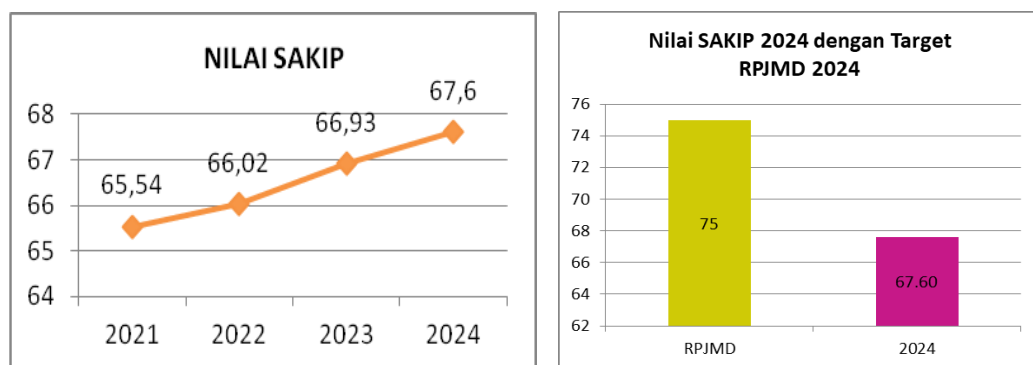


Rapat Koordinasi Kearsipan dan Pemberian Reward kepada Perangkat Daerah

X.3 Nilai SAKIP

Capaian indikator berikutnya, yaitu “Nilai SAKIP”, meskipun secara umum nilai/skor yang diperoleh terus meningkat setiap tahun, namun masih belum mencapai target akhir RPJMD, yaitu “A”. Pada tahun 2024, nilai yang diraih adalah 67,60 dan masuk ke dalam kategori “B”. Berikut adalah grafik perkembangan nilai SAKIP dari tahun 2021 – 2024 dan perbandingan nilai SAKIP Tahun 2024 dengan target akhir RPJMD.

Grafik 3.17
Perkembangan Capaian Indikator Nilai SAKIP



Upaya untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja melalui penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan terus dilakukan. Verifikasi dan revidi atas dokumen perencanaan perangkat daerah untuk menjamin konsistensi dan keselarasan dengan dokumen perencanaan Kabupaten secara konsisten terus dilakukan. Monitoring dan pengawasan terkait pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja dilaksanakan dalam berbagai bentuk. Namun demikian, capaian nilai SAKIP ini belum bisa beranjak dari “B” ke “BB” atau bahkan ke “A”.

Faktor yang menyebabkan belum tercapainya target nilai SAKIP adalah sebagai berikut:

1. Belum ada implementasi integrasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan akuntabilitas kinerja. Saat ini, sistem yang digunakan adalah SIPD yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun, SIPD baru mengintegrasikan antara perencanaan dengan keuangan, belum mengakomodasi kebutuhan pengelolaan akuntabilitas kinerja.
2. Belum seluruh elemen berada pada level komitmen yang sama dalam penyelenggaraan SAKIP.
3. Masih dijumpai pimpinan perangkat daerah yang tidak terlibat secara

intensif dalam penyelenggaraan SAKIP, khususnya dalam penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja.

4. Sumber Daya Manusia aparatur yang menangani atau bertanggung jawab pada perencanaan belum seluruhnya mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitasnya, baik secara akademik maupun secara teknis.
5. Melakukan Sharing Informasi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung



Sharing Informasi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat



Sharing Informasi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ke Pemerintah Kota Bandung

Strategi peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sangat penting untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik. Berikut beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan implementasi SAKIP:

- a. Peningkatan Pemahaman dan Komitmen Pimpinan.
Pimpinan instansi pemerintah perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya SAKIP. Komitmen pimpinan dalam memimpin perubahan dan memastikan bahwa SAKIP diimplementasikan dengan baik sangat penting untuk mendorong seluruh jajaran pemerintah untuk menerapkan prinsip akuntabilitas.
- b. Penyusunan Rencana Aksi yang Jelas.
Setiap instansi perlu memiliki rencana aksi yang terstruktur dengan baik. Ini mencakup penetapan tujuan kinerja yang terukur, indikator kinerja, dan sasaran yang realistis, serta mekanisme monitoring yang efektif.
- c. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Melatih dan mengembangkan kompetensi aparatur pemerintah agar lebih memahami dan mampu mengelola proses perencanaan dan pengukuran kinerja secara tepat sangat penting. Pelatihan dalam penyusunan laporan kinerja dan pengelolaan data juga perlu dilakukan secara berkelanjutan.
- d. Sistem Pengawasan dan Evaluasi yang Efektif.
Membangun mekanisme pengawasan dan evaluasi yang baik untuk memastikan bahwa seluruh program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang berbasis pada hasil (*outcome-based monitoring*) akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
- e. Pemanfaatan Teknologi Informasi.
Teknologi informasi dapat digunakan untuk mempermudah proses pelaporan dan pemantauan kinerja. Pengembangan sistem informasi manajemen kinerja (SIMK) yang terintegrasi dan mudah diakses akan memudahkan instansi dalam melaksanakan SAKIP secara efisien.
- f. Keterlibatan Stakeholder.
Melibatkan berbagai stakeholder, baik internal (pegawai) maupun eksternal (masyarakat, lembaga pengawas) dalam proses evaluasi dan perencanaan kinerja dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi, yang pada gilirannya mendorong perbaikan dalam implementasi SAKIP.
- g. Penerapan Penghargaan dan Sanksi.
Memberikan penghargaan bagi instansi yang berhasil menerapkan SAKIP dengan baik serta menerapkan sanksi bagi instansi yang tidak memenuhi target atau mengabaikan prinsip akuntabilitas dapat mendorong persaingan yang sehat dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
- h. Kolaborasi Antar Instansi.
Mengadakan forum kolaborasi antar instansi untuk berbagi pengalaman,

tantangan, dan solusi dalam implementasi SAKIP dapat meningkatkan pemahaman serta menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program pemerintah.

i. Evaluasi dan Penyempurnaan Berkelanjutan.

Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi SAKIP dan menyempurnakan proses yang ada berdasarkan temuan dan *feedback* akan membantu memperbaiki kelemahan dan meningkatkan efektivitas SAKIP secara keseluruhan.

Implementasi SAKIP yang efektif membutuhkan kerja keras dari semua pihak dalam meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pelayanan kepada masyarakat.

XI. Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
20.	Indeks SPBE	3,22	2,81	87,27%
21.	Indeks Profesionalitas ASN	79,8	84.56	105.96%
22.	Skor dan status kinerja pemerintah daerah	3,2	3,2	100%

XI.1 Indeks SPBE

Indeks SPBE merupakan hasil pengukuran terhadap tingkat kematangan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Capaian indikator “Indeks SPBE” pada tahun 2024 adalah 2,81 terjadi penurunan dari capaian tahun 2023 sebesar 3,22. Beberapa penyebab terjadi penurunan Indeks SPBE yaitu Pemerintah Kabupaten Tanah Datar masih belum memiliki kebijakan internal arsitektur dan peta rencana SPBE serta Pemerintah Kabupaten Tanah Datar belum menerapkan manajemen SPBE yang terencana dan terarah. Dalam pengukuran Indeks SPBE salah satu indikator yang harus dipenuhi adanya regulasi yang mengikat Perangkat Daerah atau masyarakat yang berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan SPBE yaitu dikeluarkannya Peraturan Daerah pendukung SPBE.

Untuk melayani kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, hingga akhir tahun 2024 tercatat sebanyak 50 aplikasi layanan administrasi Pemerintahan dan layanan publik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana daftar berikut:

Tabel 3.18
Aplikasi yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

No.	Nama Aplikasi	Fungsi
1	LAPOR SP4N	Layanan pengaduan publik
2	SPSE	Layanan pengadaan barang/jasa
3	SIRUP	Informasi rencana umum pengadaan
4	SIPD	Perencanaan, penganggaran dan keuangan daerah
5	SIKAK	Layanan administrasi kependudukan pusat
6	SRIKANDI	Layanan kearsipan
7	SIDEKA	Website dan layanan desa
8	OSS	Layanan perizinan pusat
9	SIMBG	Izin mendirikan bangunan
10	Dapodik	Informasi profil pendidikan
11	Prodeskel	Profil Nagari
12	Siskeudes	Pengelolaan keuangan nagari
13	Simda BMD	Pengelolaan aset daerah
14	Sim Gaji	Pembuatan daftar gaji ASN
15	JDIH	Informasi produk hukum
16	PPID	Layanan informasi publik
17	Portal Tanah Datar	Website Tanah Datar versi mobile
18	Whistleblower	Layanan pengaduan daerah
19	Portal Data	Informasi data daerah
20	Geoportal	Informasi geospasial daerah
21	Diruang data	Informasi pemanfaatan ruang
22	E-Sakip	Informasi capaian kinerja perangkat daerah
23	Sitampun	Kinerja ASN
24	Abon	Absensi online ASN
25	Silamak	Layanan manajemen kepegawaian bagi ASN
26	Sijabri	Analisa jabatan
27	Sipintar	Layanan perizinan daerah
28	Oasedukcapil	Layanan administrasi kependudukan daerah
29	PPDB Online	Penerimaan peserta didik baru
30	Tanda Preneur	Pemberdayaan calon usahawan baru
31	Bajak Gratis	Layanan bajak gratis
32	Jelita	Informasi harga komoditas pertanian
33	Sidinda	Pengendalian inflasi daerah
34	Simbangda	Monitoring evaluasi kegiatan
35	Dashboard	Informasi penggunaan anggaran pengadaan dan data capaian kinerja
36	IPKD	Informasi indeks pengelolaan keuangan daerah
37	E-Perben	Monitoring realisasi keuangan
38	PBB	Pengelolaan PBB
39	BPHTB	Pengelolaan BPHTB
40	Sipena	Perlindungan anak
41	SIAPPKK	Informasi dasawisma PKK

No.	Nama Aplikasi	Fungsi
42	SIMRS GOS	Manajemen rumah sakit
43	Siduri	Sistem informasi data Pustu dan Poskesri.
44	Khanza	Layanan rekam medis Puskesmas
45	QR Code Pariwisata	Informasi inventori wisata
46	Aplikasi KIR	Pengelolaan KIR Kendaraan
47	Menara	Database menara seluler
48	Buku Tamu	Administrasi bagi tamu
49	Antrian MPP	Sistem antrian pada Mal Pelayanan Publik
50	Antrian Dukcapil	Sistem antrian pada Dinas Dukcapil

Aplikasi yang telah terintegrasi hingga akhir 2024 tercatat sebanyak 23 aplikasi sebagaimana daftar berikut:

Tabel 3.19
Aplikasi yang telah terintegrasi

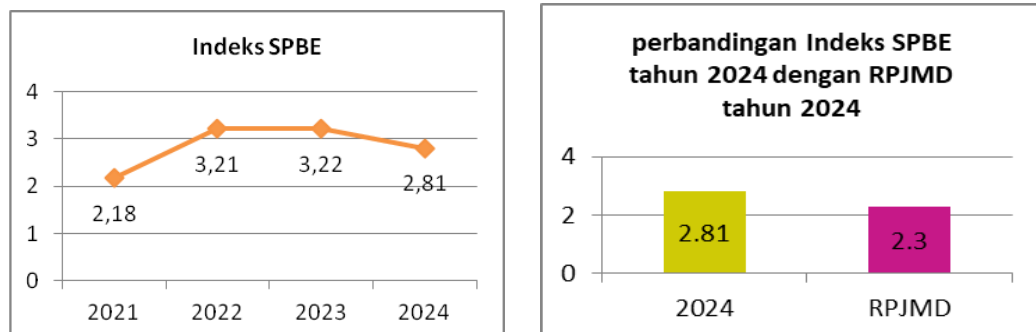
No.	Nama Aplikasi	Fungsi/Kegunaan	Integrasi
1.	SIPD	Perencanaan, penganggaran, keuangan	Terintegrasi dalam 1 aplikasi
2.	Portal Data	Informasi data daerah	Portal data nasional
3.	SPSE	Pengadaan barang/Jasa	SIRUP dari LKPP
4.	Simbangda	Monitoring Evaluasi Kegiatan	Simbangda Provinsi
5.	OASE Dukcapil	Layanan adminduk	SIAC
6.	SIAC	Layanan Adminduk	Datawarehouse Kemendagri
7.	Sipintar	Pelayanan perizinan	SIAC dan KWSP Dirjen Pajak
8.	OSS	Pelayanan perizinan	SIAC dan KWSP Dirjen Pajak
9.	SIMBG	Izin mendirikan bangunan	OSS
10.	PPID	Layanan informasi	PPID Nagari
11.	JDIH	Layanan informasi hukum/peraturan perundang- undangan	BPHN Kemenkumham
12.	Diruang Data	Informasi Pemanfaatan ruang	Silamak
13.	PPDB Online	Penerimaan Peserta didik Baru	Portal SPLP
14.	Aplikasi PBB	Layanan PBB	Aplikasi Bank Nagari
15.	Aplikasi BPHTB	Layanan BPHTB	Aplikasi BPN
16.	Silamak	Layanan Manajemen Kepegawaian bagi ASN	Abon, PPID, JDIH, WBS, dll
17.	Abon	Absensi online	Sitampun

No.	Nama Aplikasi	Fungsi/Kegunaan	Integrasi
18.	Khanza	Layanan Puskesmas	Satu Sehat
19.	Portal Tanah Datar	Website Tanah Data versi mobile	WebsiteTanah Datar
20.	Geoportal	Informasi Geospasial Daerah	Diruang data
21.	Dashboard	Informasi penggunaan anggaran pengadaan dan data capaian kinerja	Simbangda, Sakip, Sipedal
22.	E-Sakip	Informasi capaian kinerja perangkat daerah	Silamak
23.	IKPD	Informasi indeks pengelolaan keuangan daerah	PPID

Keberhasilan capaian sasaran strategis “Meningkatnya birokrasi yang kapabel” dapat dilihat dari capaian indikator-indikator sebagai berikut:

Grafik 3.18

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel



Peningkatan nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sangat penting untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan nilai SPBE:

- a. Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
 - Penguatan Infrastruktur Jaringan
Memastikan jaringan internet yang stabil, cepat, dan dapat diakses secara merata, termasuk di daerah terpencil, untuk mendukung implementasi SPBE di seluruh wilayah.
 - Pemeliharaan dan Pembaruan Infrastruktur
Secara rutin memelihara dan memperbarui perangkat keras dan perangkat lunak agar tetap sesuai dengan perkembangan teknologi

dan kebutuhan sistem pemerintahan.

- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Pelatihan Berkelanjutan untuk Aparatur
Memberikan pelatihan rutin bagi pegawai pemerintah untuk menguasai teknologi terbaru, serta memahami prinsip-prinsip dasar dan teknis terkait SPBE.
 - Pengembangan Kompetensi TIK
Memperkuat kemampuan teknis, manajerial, dan kebijakan terkait TIK pada setiap level pemerintahan untuk memastikan implementasi yang efektif.
- c. Penguatan Kebijakan dan Regulasi Terkait SPBE
 - Penyusunan dan Pembaruan Kebijakan
Mengembangkan kebijakan yang mendukung penerapan SPBE, termasuk standar keamanan data, *interoperabilitas*, serta kebijakan terkait privasi dan perlindungan data pribadi.
 - Penguatan Regulasi
Meningkatkan penerapan regulasi dan pedoman yang jelas terkait SPBE, termasuk sanksi bagi instansi yang tidak mengimplementasikan SPBE sesuai dengan ketentuan yang ada.
- d. Interoperabilitas Antar Sistem
 - Integrasi Sistem Antar Instansi
Memastikan bahwa berbagai sistem yang digunakan oleh instansi pemerintah dapat saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain dengan lancar (*interoperabilitas*), guna mempercepat proses layanan publik dan berbagi data secara efektif.
 - Pembangunan Platform Terpadu
Mengembangkan platform yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah untuk memudahkan akses bagi masyarakat dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data pemerintah.
- e. Peningkatan Keamanan Informasi dan Perlindungan Data
 - Perlindungan Data dan Privasi
Mengimplementasikan kebijakan dan sistem yang kuat untuk melindungi data pribadi dan informasi sensitif yang dikelola oleh pemerintah, serta memastikan bahwa data tersebut hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.
 - Penguatan Keamanan Cyber
Memperkuat sistem keamanan siber untuk mencegah ancaman

peretasan dan kebocoran data yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat.

f. Pengembangan Layanan Publik Digital

- Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan

Meningkatkan kualitas layanan publik berbasis elektronik dengan fokus pada kenyamanan, kemudahan, dan kecepatan akses bagi masyarakat, seperti layanan administrasi kependudukan, perizinan, atau pengajuan keluhan publik.

- Meningkatkan Layanan E-Government

Mengoptimalkan penerapan e-government dengan menyediakan portal online untuk layanan publik yang lebih luas, seperti *e-budgeting*, *e-planning*, dan *e-monitoring*.

g. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

- Akses Informasi yang Terbuka

Membuka akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memantau kebijakan, anggaran, dan kinerja pemerintah melalui platform digital yang transparan.

- Pemanfaatan Big Data dan Analitik

Menggunakan big data dan analitik untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan berbasis data dan memperbaiki kinerja pemerintahan.

h. Pendekatan Kolaboratif dan Partisipatif

- Kolaborasi Antar Instansi Pemerintah

Meningkatkan kerjasama antar instansi pemerintah dalam pengembangan dan implementasi SPBE untuk menciptakan ekosistem yang terintegrasi dan efisien.

- Partisipasi Publik dalam Pengembangan SPBE

Melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam pengembangan dan evaluasi layanan SPBE untuk memastikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat terakomodasi dengan baik.

i. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan

- Evaluasi Kinerja SPBE

Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi SPBE di setiap instansi untuk mengidentifikasi kekurangan dan mencari solusi perbaikan yang diperlukan.

- Peningkatan Sistem Monitoring

Mengembangkan sistem monitoring yang dapat memantau kinerja

sistem SPBE secara real-time untuk memastikan bahwa SPBE berfungsi dengan baik dan efisien.

- j. Penggunaan Teknologi Terkini
- Penerapan Teknologi Baru
Menerapkan teknologi terkini, seperti kecerdasan buatan (*AI*), *blockchain*, dan analitik data besar, untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penyampaian layanan publik berbasis elektronik.
 - Inovasi Layanan Digital
Terus berinovasi dengan menciptakan aplikasi dan sistem baru yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti aplikasi berbasis mobile untuk mengakses layanan pemerintah.

Dengan mengikuti rekomendasi-rekomendasi di atas, SPBE dapat berkembang lebih baik, mempermudah akses pelayanan publik, dan mendukung transparansi serta akuntabilitas pemerintahan. Peningkatan nilai SPBE yang berkelanjutan akan berkontribusi pada efisiensi birokrasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

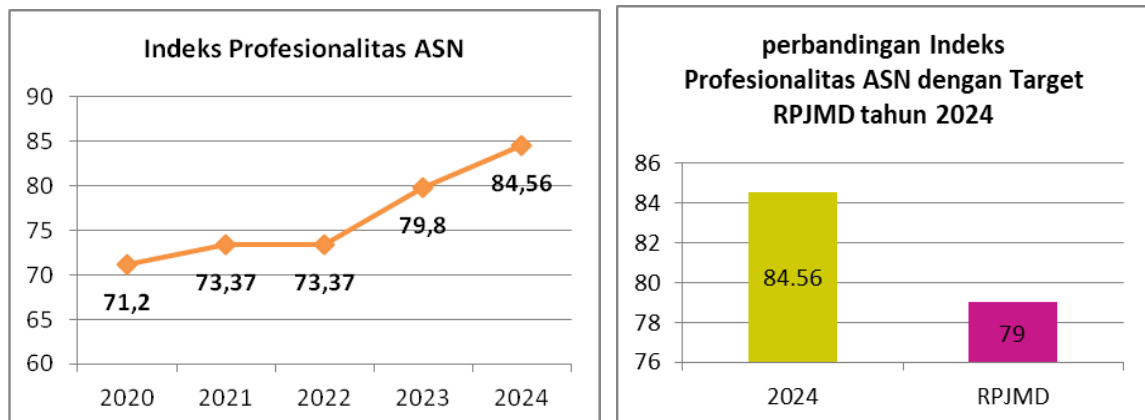
XI.2 Indeks Profesionalitas ASN

Indikator “Indeks Profesionalitas ASN” digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan SDM Aparatur di Kabupaten Tanah Datar. Pada tahun 2024, nilai IP ASN Kabupaten Tanah Datar adalah 84,56, meningkat dari nilai Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 (79,80). Nilai Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu 79,80. Untuk mencapai target kinerja ini, telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan kualifikasi Pendidikan
 - a. Proses pemberian izin belajar dan tugas belajar kepada 77 orang PNS.
 - b. Pemberian bantuan pendidikan bagi 2 orang PNS.
 - c. Pemberian beasiswa pendidikan S2 bagi 5 orang PNS melalui system cost sharing antara Pemerintah Daerah dan Bappenas.
 - d. 10 mahasiswa STTD melalui jalur ikatan dinas berdasarkan MoU antara Pemerintah Daerah dengan STTD.
 - e. Pemakaian/penyesuaian gelar akademik sebanyak 55 orang PNS.
2. Peningkatan kompetensi ASN
 - a. Diklat Pelatihan Dasar bagi CPNS sebanyak 5 orang.
 - b. Pengiriman peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) sebanyak 2 orang

- c. Pengiriman peserta pelatihan kepamongprajaan bagi Camat sebanyak 1 orang
 - d. Pengiriman peserta pelatihan perencanaan sebanyak 1 orang.
 - e. Orientasi PPPK formasi tahun 2024 sebanyak 888.
3. Peningkatan kinerja ASN
- Pada tahun 2024 evaluasi kinerja ASN melalui aplikasi e-Kinerja BKPSDM melaksanaka evaluasi terkait kepatuhandalam penyusunan dan penilaian kinerja pada aplikasi e-Kinerja secara secara rutin per triwulan.
4. Peningkatan disiplin ASN
- a. Sosialisasi Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
 - b. Monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kedisiplinan ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Grafik 3.19
Indeks Profesionalitas ASN



XI.3 Skor dan Status Kinerja Pemerintah Daerah

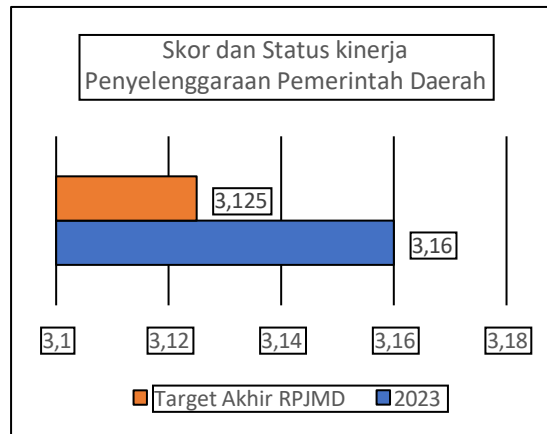
Skor dan Status Kinerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai tolak ukur Kualitas pemerintahan daerah dan memberikan masukan bagi perbaikan dan pengembangan kebijakan di tingkat daerah. Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021 mendapatkan skor 2,62 dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 3,16 untuk hasil tahun 2023 masih menunggu Keputusan Menteri Dalam Negeri. Sementara dalam RPJMD target untuk Skor dan Status Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 3,125. Untuk meningkatkan kinerja ini ada beberapa hal yang dilakukan seperti:

1. Memberikan penjelasan langsung dengan mengundang OPD ke Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tanah Datar tentang penyusunan LPPD

Perangkat Daerah untuk meminimalisir kesalahan yang berulang.

2. Kedepannya direncanakan untuk mengadakan Sosialisasi kepada OPD untuk penyusunan LPPD pada instansi masing-masing.

Grafik 3.19
Skor dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah



Memberikan Penjelasan langsung ke perangkat daerah dalam penyusunan LPPD

XII. Sasaran Strategis 12: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
23.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	95,27	100,28%

12.1 Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian indikator indeks kepuasan masyarakat dihitung berdasarkan hasil survey di seluruh unit pelayanan publik, dengan hasil IKM Tahun 2024 adalah 95,27 (Sangat Baik), meningkat dari capaian tahun 2023 (94,57 atau Sangat Baik). Untuk mendukung upaya tersebut, sepanjang tahun 2024 telah dilaksanakan pembinaan dan evaluasi atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Pada tahun 2024, berdasarkan evaluasi dari Ombudsman RI, hasil penilaian kepatuhan

penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan nilai 93,51 (zona hijau) masuk kategori A (kualitas tertinggi). Pada tahun 2024 sebanyak enam (6) unit layanan di lingkungan pemerintah kabupaten Tanah Datar yang di evaluasi oleh Ombudsman RI, adapun hasil evaluasi penilaian kepatuhan tersebut yaitu: Puskesmas Sungayang dengan nilai 97,59 (Kategori A, zona Hijau, opini Kualitas Tertinggi), Puskesmas Tanjung Emas dengan nilai 93,98 (Kategori A, zona Hijau, opini Kualitas Tertinggi), Dinas Pendidikan dengan nilai 93,45 (Kategori A, zona Hijau, opini Kualitas Tertinggi), Dinas Sosial dengan nilai 92,95 (Kategori A, zona Hijau, opini Kualitas Tertinggi), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai 92,15 (Kategori A, zona Hijau, opini Kualitas Tertinggi), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nilai 90,97 (Kategori A, zona Hijau, opini Kualitas Tertinggi).



Gambar Kegiatan Entry Meeting SKM dengan LPPM Unand

Pelaksanaan penilaian Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 melalui pihak eksternal, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas yang dilaksanakan pada 41 perangkat daerah. Pada tahun 2024 juga dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh Kementerian PANRB, Dimana ada tiga (3) Unit Lokus Evaluasi (ULE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yaitu Dinas Sosial sebagai cerminan pelayanan barang dengan nilai 3,86. Rumah Sakit Umum Daerah M Ali Hanafiah SM Batusangkar sebagai perwakilan pelayanan jasa dengan nilai 4,40. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai perwakilan pelayanan administrasi dengan nilai 4,53. Maka hasil Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 adalah 4,26. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ini berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik Kabupaten Tanah Datar yang dinilai oleh Kementerian PANRB dengan nilai A- dan hasil penilaian oleh Ombudsman RI.



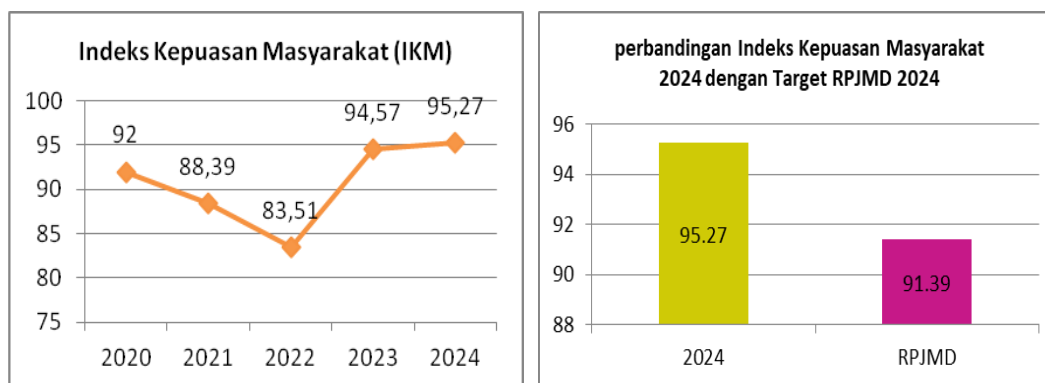
Gambar Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik oleh Kemenpan RB



Gambar Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI

Grafik 3.21

Perkembangan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat



Berikut Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Pekppp) Kabupaten Dan Kota Se Sumatera Barat Tahun 2024

NO.	KABUPATEN/KOTA	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KAB/KOTA	KATEGORI
1.	Kota Payakumbuh	4,51	4,48	4,51	4,50	A-
2.	Kabupaten Pesisir Selatan	4,53	4,39	4,47	4,46	A-

NO.	KABUPATEN/KOTA	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KAB/KOTA	KATEGORI
3.	Kabupaten Solok	4,51	4,32	4,55	4,46	A-
4.	Kabupaten Sijunjung	4,41	4,42	4,25	4,36	A-
5.	Kota Pariaman	4,22	4,21	4,52	4,32	A-
6.	Kabupaten Padang Pariaman	4,23	4,47	4,17	4,29	A-
7.	Kabupaten Lima Puluh Kota	4,52	4,32	3,96	4,27	A-
8.	Kabupaten Tanah Datar	3,86	4,40	4,53	4,26	A-
9.	Kota Padang Panjang	3,51	4,45	4,56	4,17	A-
10.	Kabupaten Pasaman	3,68	4,16	4,54	4,13	A-
11.	Kota Bukittinggi	3,62	4,44	4,33	4,13	A-
12.	Kota Solok	3,9	*NA	4,26	4,06	A-
13.	Kabupaten Solok Selatan	3,52	4,22	3,77	3,84	B
14.	Kabupaten Pasaman Barat	3,57	3,16	3,77	3,50	B-
15.	Kota Padang	2,98	3,68	3,67	3,44	B-
16.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	3,41	3,49	2,9	3,27	B-
17.	Kabupaten Agam	3,26	3,82	2,66	3,25	B-
18.	Kabupaten Dharmasraya	4,20	2,41	3,03	3,21	B-
19.	Kota Sawahlunto	2,67	3,09	3,77	3,18	B-

XIII. Sasaran Strategis 13: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
24.	Persentase infrastruktur wilayah yang berkualitas	76,78%	73,16%	95,29%

XIII.1 Persentase Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas

Indikator presentase infrastruktur wilayah yang berkualitas diukur dari persentase panjang jalan dalam kondisi baik, persentase ketersediaan jembatan kondisi baik, persentase luas areal irigasi dalam kondisi baik, Persentase cakupan pelayanan air minum, dan Persentase penduduk dengan akses sanitasi layak. Untuk target tahun 2024 Indikator presentase infrastruktur wilayah yang berkualitas sebesar 76,78 % dengan realisasi 73,16 % Dengan capaian persentase Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas sebesar 95,29%.

Berikut tabel indikator Persentase Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Tingkat Capaian(%)
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	81,39	69,89	85,87
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	90,00	87,24	96,93
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi	Persentase Luas Areal Irigasi Dalam Kondisi Baik	71,29	57,28	80,35
3	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum	Persentase cakupan pelayanan air minum	80,50	76,55	95,09
4	Meningkatnya kuantitas jaringan sanitasi	Persentase penduduk dengan akses sanitasi layak	78,05	74,84	95,89
TOTAL			80.25	73,16	90,83

Panjang jalan kabupaten 1.138.66 km dan sepanjang 838.79 km berada dalam kondisi baik (baik-sedang). Target persentase panjang jalan dalam kondisi baik tahun 2024 81,39 % dan realisasi 69,89% dengan tingkat capaian kerja 85,87%.

Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya pada indikator persentase panjang jalan dalam kondisi baik yaitu Kondisi Kabupaten Tanah Datar yang memiliki bentang alam bervariasi seperti posisinya yang berada pada dua gunung yang masih aktif yaitu Gunung Marapi dan Tandikek, morfologi bergelombang, banyak dilalui sungai-sungai besar serta dilalui sesar besar jalur Sumatera (sesar semangko) menyebabkan Kabupaten Tanah Datar rentan terhadap bencana, yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan.

Target Persentase ketersediaan jembatan kondisi baik pada tahun 2024 adalah 90% dari jumlah kabupaten sebanyak 200 unit, jembatan dalam kondisi baik dan rusak ringan 253 unit atau 87.24% dengan tingkat capaian kinerja 96.93%.

Faktor penyebab tidak tercapainya target untuk persentase jembatan berkategori baik karena curah hujan yang tinggi dan terjadinya Banjir Bandang pada tanggal 11 Juni 2024 yang mengakibatkan 22 unit jembatan putus dan 2 unit rusak berat.

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kegiatan jalan dan jembatan dengan kondisi baik adalah:

- a. Melakukan survei terhadap kondisi jalan dan jembatan untuk mengetahui existing jalan saat ini yang dijadikan dasar perencanaan ditahun selanjutnya agar bisa menentukan prioritas perbaikan jalan yang akan dikerjakan.
- b. Melakukan pemeliharaan jalan dan jembatan secara rutin untuk mencegah kerusakan yang lebih berat.
- c. Mengupayakan untuk mendapatkan program pembangunan bidang jalan ke pemerintah pusat dan propinsi.

Target Persentase luas areal irigasi dalam kondisi baik tahun 2024 adalah 71,29% (seluas 29.003 ha), luas areal irigasi yang berkondisi baik 1.613,6 Ha dengan tingkat capaian 57,28 % dengan tingkat capaian kinerja sebesar 80,35%. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya untuk irigasi dalam kondisi baik karena curah hujan yang sangat tinggi dan erupsi gunung merapi menyebabkan banjir bandang yang merusak jaringan irigasi, tanggul, sungai dan pendangkalan sungai akibat terimbun material. Untuk mengatasi permasalahan ini maka dilakukan upaya mengoptimalkan penjaga pintu air, melakukan pembinaan terhadap petani pamakai untuk pemeliharaan jaringan irigasi permukaan.

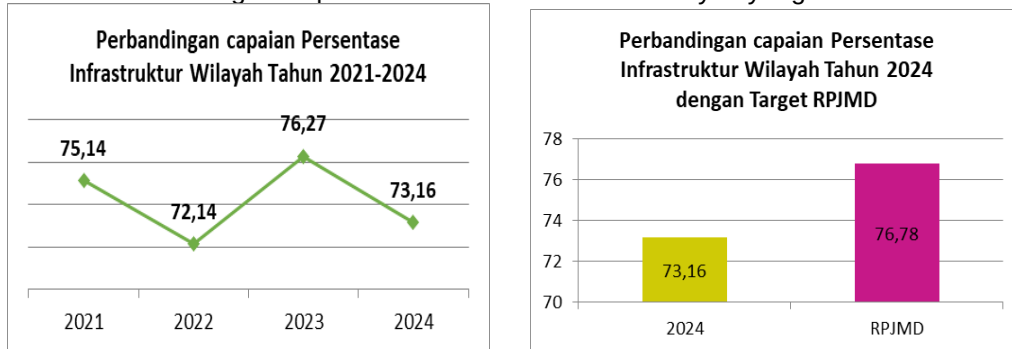
Target Persentase cakupan pelayanan air minum tahun 2024 adalah 80.50% (95,324 rumah tangga dari 124.527 rumah tangga) atau 76,55%. Tingkat capaian Persentase cakupan pelayanan air minum adalah 95.09%. Faktor tidak tercapainya Persentase cakupan pelayanan air minum ini adalah karena terjadinya bencana alam banjir bandang yang menyebabkan kerusakan pada sumber air, bak penampung dan sambungan rumah air minum di 20 titik lokasi.

Target Pada tahun 2024, jumlah penduduk yang sudah memiliki akses sanitasi sebesar 78,05% dari 380.727 jiwa jumlah penduduk. Capaian kinerja indikator persentase penduduk dengan akses sanitasi layak adalah 74,84%. Realisasi capaian yang tidak mencapai 95,89%.

Berikut adalah perkembangan capaian indikator “Persentase infrastruktur wilayah yang berkualitas”:

Grafik 3.22

Perkembangan Capaian Indikator Infrastruktur Wilayah yang berkualitas



Galeri Pembangunan Infrastruktur Jalan Tahun 2024



Galeri Pembangunan Infrastruktur Jembatan Tahun 2024



Galeri Pembangunan Infrastruktur Irigasi Tahun 2024



Galeri Cakupan Pelayanan Air Minum Tahun 2024



Galeri Kuantitas Jaringan Sanitasi Tahun 2024

Peningkatan infrastruktur berkualitas sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan daya saing sebuah negara. Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan infrastruktur berkualitas baik:

- a. Perencanaan Infrastruktur yang Tepat dan Berkelanjutan
 - Studi Kelayakan yang Mendalam:*
Setiap proyek infrastruktur harus dimulai dengan studi kelayakan yang mendalam, melibatkan analisis kebutuhan jangka panjang dan dampak terhadap lingkungan dan sosial.
 - Perencanaan Berkelanjutan
Pastikan bahwa infrastruktur yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan masa depan dan perubahan kondisi sosial, ekonomi, serta teknologi.
- b. Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi
 - Smart Infrastructure
Penggunaan teknologi digital dan sistem berbasis *IoT (Internet of Things)* untuk mengelola infrastruktur, seperti sistem pengelolaan lalu lintas pintar, pengawasan kualitas udara, serta pemantauan energi

yang lebih efisien.

- Building Information Modeling (BIM)

Teknologi BIM dapat meningkatkan perencanaan, desain, dan pengelolaan infrastruktur dengan memberikan gambaran visual yang lebih baik dan akurasi tinggi untuk merencanakan pembangunan.

- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)*

- Pelatihan dan Sertifikasi Profesional

Meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang terlibat dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur melalui pelatihan dan sertifikasi sesuai dengan standar internasional.

- Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi

Berkolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk menghasilkan tenaga ahli di bidang teknik dan manajemen infrastruktur.

- d. Fokus pada Kualitas dan Keberlanjutan

- Pemilihan Material yang Berkualitas

Gunakan material berkualitas tinggi yang tahan lama dan ramah lingkungan untuk memastikan keberlanjutan infrastruktur dalam jangka panjang.

- Desain Ramah Lingkungan

Bangun infrastruktur yang mengutamakan prinsip-prinsip ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah, serta mempertimbangkan pengurangan emisi karbon.

- e. Pendanaan Infrastruktur yang Efektif

- Diversifikasi Sumber Pembiayaan

Pemanfaatan berbagai sumber pendanaan, seperti skema pembiayaan publik-swasta (PPP), obligasi infrastruktur, serta dana internasional yang dapat mendukung proyek-proyek besar.

- Prioritas Pembiayaan

Tentukan prioritas pembiayaan dengan memetakan proyek-proyek yang paling urgent dan memberikan dampak paling besar bagi perekonomian dan masyarakat.

- f. Penguatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta

- Kemitraan Publik-Swasta (PPP)

Kerjasama dengan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan menyeimbangkan antara kepentingan publik dan keuntungan swasta.

- Transparansi dan Akuntabilitas\

Pastikan bahwa kerjasama antara pemerintah dan swasta berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat.

g. Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah

- Pembangunan Infrastruktur Transportasi

Fokus pada pembangunan jaringan transportasi yang menghubungkan kota besar dan daerah terpencil untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pemerataan pembangunan.

- Pengembangan Infrastruktur Logistik

Perkuat sistem logistik untuk mempercepat distribusi barang dan mengurangi biaya logistik yang tinggi.

h. Pemeliharaan dan Perbaikan Berkala

- Rencana Pemeliharaan Terjadwal

Infrastruktur yang telah dibangun harus dipelihara secara teratur untuk memastikan keandalannya dalam jangka panjang. Buat rencana pemeliharaan yang jelas dan implementasikan secara konsisten.

- Investasi dalam Infrastruktur Pemeliharaan

Pemeliharaan seringkali terabaikan, tetapi harus menjadi prioritas dengan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menjaga kualitas dan umur panjang infrastruktur.

i. Keterlibatan Masyarakat dan Stakeholder

- Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan

Libatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan infrastruktur untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan dan tidak menimbulkan dampak negatif.

- Konsultasi dengan Stakeholder Terkait

Selain masyarakat, pastikan bahwa proyek infrastruktur juga melibatkan sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah untuk mendapatkan masukan yang beragam.

j. Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi

- Pengawasan yang Ketat

Tingkatkan pengawasan dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan, untuk mencegah penyimpangan atau korupsi.

- Evaluasi Kinerja Infrastruktur

Lakukan evaluasi berkala terhadap kinerja infrastruktur yang telah dibangun untuk memastikan bahwa infrastruktur tersebut memenuhi standar kualitas dan dapat berfungsi secara optimal.

Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, peningkatan infrastruktur berkualitas baik dapat dilakukan, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

XIV. Sasaran Strategis 14: Meningkatnya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
25.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	65,32	90,72%

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dihitung dengan menggunakan data Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Berikut adalah data IKA, IKU dan IKL tahun 2024:

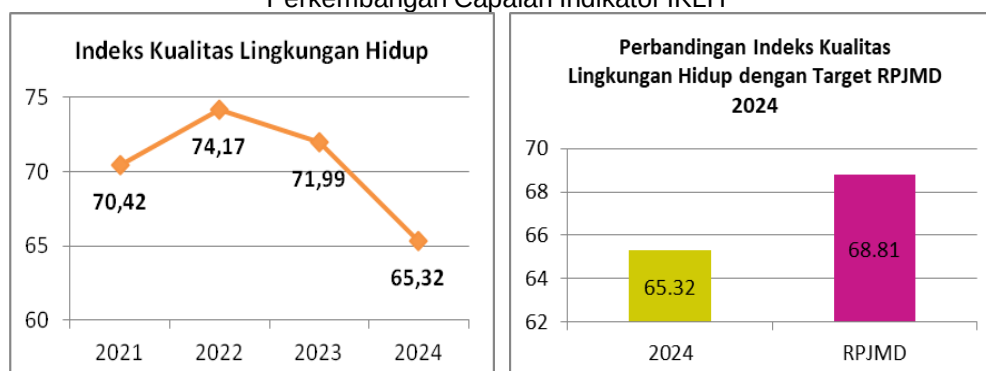
Tabel 3.20
Indikator IKLH 2024

	Target 2024	Realisasi
Indeks Kualitas Air (IKA)	60,87	40,71
Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,74	91,82
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	58,26	58,59
IKLH	72	65,32

Nilai IKLH dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 IKLH &= (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL) \\
 &= 0,376 \times 40,71 + 0,405 \times 91,82 + 0,219 \times 58,59 \\
 &= 65,32
 \end{aligned}$$

Grafik 3.20
Perkembangan Capaian Indikator IKLH



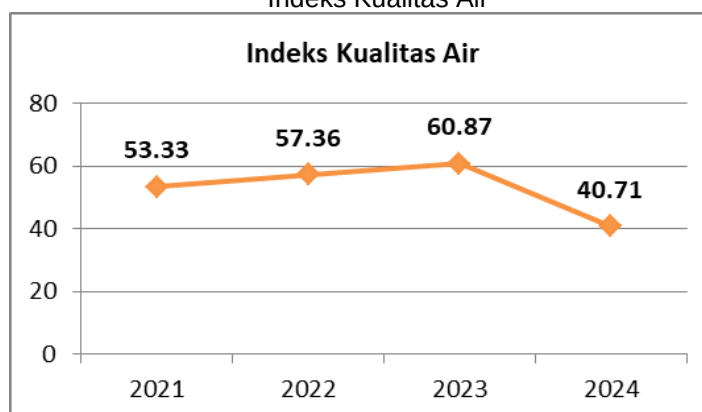
Kegiatan indeks kualitas lingkungan hidup terdiri atas :

- a. Uji kualitas air di 2 sungai masing-masing dengan 3 titik sampling yang diambil pada musim hujan dan musim kemarau.
- b. Uji kualitas air limbah TPA Bukik Sangiang dengan 2 titik outlet kolam lindi dan 1 titik sumur pantau.
- c. Uji kualitas air hujan di Pagaruyung yang diambil pada musim hujan. Disamping melakukan pengujian kualitas air juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan DLH Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.21
Target dan Realisasi Indeks Kualitas Air

No	Indikator	Target	Realisasi
1	Indeks Kualitas Air	60,87	40,71

Grafik 3.23
Indeks Kualitas Air



Target Indek kualitas air tahun 2024 terjadi penurunan dari target tahun 2023, ini disebabkan Sungai yang ditetapkan sebagai titik pantau terdampak banjir bandang yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2024. Kegiatan uji kualitas air dilakukan pada 2 titik sample/ Sungai dengan titik pantau pada hulu, tengah dan hilir sungai yaitu pada :

1. Sungai Batang Bangkahan
2. Sungai Batang Malana

Pemantauan kualitas air dilakukan pada 2 periode yaitu :

1. Musim kemarau berkisar pada bulan Januari sd Juni
2. Musim hujan berkisar pada bulan Juli sd Desember

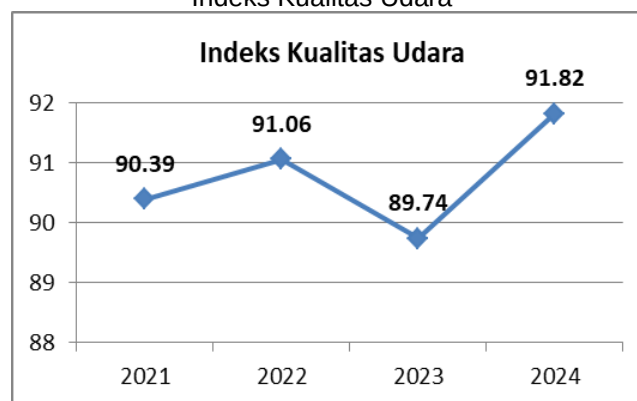
Gambar Kegiatan Pengambilan Sample Pengujian Air



Tabel 3.22
Target dan Realisasi Indeks Kualitas Udara

No	Indikator	Target	Realisasi
1	Indeks Kualitas Udara	89,74	91,82

Grafik 3.24
Indeks Kualitas Udara



Kondisi kualitas udara di Kabupaten Tanah Datar dikategorikan baik. capaian indikator ini apabila dibandingkan dengan kinerja tahun lalu mengalami kenaikan. Untuk pencapaian target indikator yang telah ditetapkan perlu adanya peran berbagai pihak dan melibatkan multi sektor dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Dalam pemenuhan pencapaian target Indeks Kualitas Udara bukan hanya pada aspek pemantauan dan pengukuran kualitas lingkungan hidup saja tetapi juga diperlukan program/kegiatan yang dilakukan dalam rangka upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan lingkungan. Pemantauan kualitas udara dilakukan pada 4 lokasi/titik sampel dengan menggunakan *Metode Passive Sampler* yaitu:

1. Kompleks perkantoran pada halaman depan Kantor Bupati Tanah Datar
2. Kompleks industri di depan Industri Kopi Rangkang Kaum Malana Ponco
3. Kompleks Perumahan Dobok Indah
4. Jalan raya/transportasi di Jalan Soekarno Hatta depan kantor Dinas Dukcapil Tanah Datar

Gambar Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara

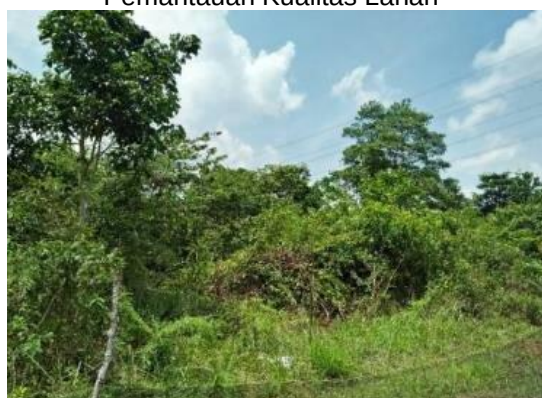


Tabel 3.23
Target dan Realisasi Indeks Kualitas Lahan

No	Indikator	Target	Realisasi
1	Indeks Kualitas Lahan	58,26	58,59

Capaian indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian tahun 2023, hal ini dipengaruhi oleh peningkatan luas tutupan vegetasi terutama luas tutupan lahan dan luas lahan. Hal ini menunjukkan adanya upaya pengolahan, rehabilitasi serta pengendalian ekosistem di Kabupaten Tanah Datar serta adanya peran serta pemangku kepentingan dalam upaya pengelolaan kualitas lahan.

Gambar 3.9
Pemantauan Kualitas Lahan



Peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah langkah penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan mendukung kualitas hidup masyarakat. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai IKLH:

- a. Pengendalian Pencemaran Udara
 - Pengurangan Emisi Kendaraan Bermotor
 - Memperketat regulasi emisi kendaraan bermotor dan mendorong

penggunaan transportasi ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik dan transportasi umum.

- Penerapan Teknologi Bersih
Menggunakan teknologi yang lebih bersih di sektor industri dan pembangkit listrik untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan polutan lainnya.
- Peningkatan Pemantauan Kualitas Udara
Memperbanyak stasiun pemantauan kualitas udara dan memastikan data yang akurat serta transparan agar masyarakat dapat memantau kondisi udara secara real-time.

b. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

- Konservasi Hutan dan Sumber Daya Alam
Melakukan penanaman kembali (reboisasi) di daerah yang terdegradasi dan meminimalkan konversi lahan hutan menjadi lahan non-pertanian.
- Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Terpadu
Mengembangkan program yang mengintegrasikan konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, misalnya dalam sektor pertanian dan perikanan.

c. Pengelolaan Limbah yang Efisien

- Recycling dan Pengurangan Sampah
Mendorong masyarakat untuk mendaur ulang sampah, serta menyediakan fasilitas yang memadai untuk pengolahan sampah rumah tangga dan industri.
- Pengelolaan Sampah Plastik
Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan kebijakan pelarangan atau pengurangan penggunaan plastik dan menggantinya dengan alternatif ramah lingkungan.
- Sistem Pengelolaan Sampah yang Terintegrasi
Meningkatkan pengelolaan sampah dengan cara yang lebih efektif, seperti mengoptimalkan sistem pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah di tingkat lokal.

d. Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Air

- Pengelolaan Sumber Daya Air yang Bijaksana
Melakukan konservasi air dengan cara efisien menggunakan teknologi untuk mengurangi pemborosan air dan memperbaiki infrastruktur pengelolaan air.

- Pengolahan Air Limbah yang Efektif
Memastikan bahwa limbah domestik dan industri diproses dengan benar sebelum dibuang ke sungai atau laut agar tidak mencemari sumber air.
- Perbaikan Infrastruktur Pengelolaan Air Bersih
Meningkatkan sistem distribusi air bersih ke seluruh wilayah, terutama daerah yang belum terjangkau.
- e. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
 - Edukasi Lingkungan untuk Masyarakat
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup, dengan program edukasi yang berkelanjutan terkait pengelolaan sampah, penghematan energi, dan perlindungan alam.
 - Pemberdayaan Komunitas Lokal
Memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan, seperti program kebersihan lingkungan, penghijauan, dan konservasi alam.
- f. Penguatan Kebijakan dan Regulasi Lingkungan
 - Penegakan Hukum yang Tegas
Memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup, termasuk terhadap industri yang tidak mematuhi standar emisi atau pengelolaan limbah.
 - Pengembangan Kebijakan Lingkungan yang Inklusif
Mengembangkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi, serta melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan.
 - Insentif untuk Praktik Ramah Lingkungan
Memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik ramah lingkungan, seperti teknologi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
- g. Pembangunan Infrastruktur Ramah Lingkungan
 - *Green Building*
Mendorong pembangunan gedung dan infrastruktur yang menggunakan teknologi ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan air hujan, dan material bangunan yang berkelanjutan.
 - Transportasi Ramah Lingkungan

Meningkatkan infrastruktur transportasi publik yang efisien, terjangkau, dan ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

h. Peningkatan Keanekaragaman Hayati

- Konservasi Keanekaragaman Hayati

Melindungi dan melestarikan spesies langka dan habitat alam, serta mengelola kawasan konservasi secara efektif untuk mendukung ekosistem alami.

- Restorasi Ekosistem yang Terdegradasi

Melakukan rehabilitasi ekosistem yang rusak, seperti mangrove, terumbu karang, dan hutan, untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan mendukung keseimbangan ekosistem.

i. Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan

- Sistem Pemantauan Lingkungan yang Terintegrasi\

Membangun dan memperkuat sistem pemantauan yang terintegrasi untuk mengevaluasi kualitas lingkungan secara real-time di berbagai sektor, termasuk kualitas udara, air, tanah, dan biodiversitas.

- Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan

Secara berkala melakukan evaluasi kebijakan dan program lingkungan hidup yang ada, dan melakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi tersebut untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan.

j. Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan

- Kolaborasi Lintas Sektor

Menjalin kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan organisasi lingkungan untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

- Kerjasama Internasional

Berpartisipasi dalam inisiatif global untuk menangani isu-isu lingkungan hidup, seperti perubahan iklim, polusi plastik, dan konservasi keanekaragaman hayati.

Dengan menerapkan langkah-langkah di atas secara sinergis, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

XV. Sasaran Strategis 15: Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
26.	Persentase bencana yang Ditangani	100%	100%	100%

Persentase Bencana yang Ditangani bisa tercapai 100% karena bencana yang dilaporkan bisa tertangani 100%, Dengan Formulasi penghitungannya adalah :

$$\frac{\text{Jumlah kejadian bencana Tahun 2024}}{\text{Jumlah kejadian yang ditangani}} 100\%$$

Data kejadian bencana pada Tahun 2024 adalah sebanyak 213 kejadian, dengan penetapan status tanggap darurat sebanyak 3 kali dan seluruhnya dapat tertangani dengan baik. Formulasi penghitungan indikator ini adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk penanganan bencana dengan target paling lama 12 jam. Ini merupakan kecepatan terhadap respon bencana yang ditindaklanjuti dimulai dari laporan kejadian bencana yang diterima. Artinya BPBD selalu merespon dan menindaklanjuti setiap kejadian bencana dibawah waktu 12 jam. Namun kurangnya sarana prasarana dalam penanganan bencana yang bisa membuat penanganan bencana menjadi lambat. Target indikator Persentase Bencana yang Ditangani tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi kejadian 213 bencana dan dapat ditangani seluruhnya.

Tabel 3.24
Jumlah Bencana yang Ditangani Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Jumlah Bencana yang ditangani	100% (81 Kejadian)	100% (89 Kejadian)	100% (124 kejadian)	100% (213 kejadian)

Berikut adalah upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk capaian indikator Persentase Bencana yang Ditangani.

1. Merespon seluruh laporan kejadian bencana yang masuk baik dari masyarakat atau dari pihak lain dan melakukan penanganan kejadian bencana dengan semaksimal mungkin dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait serta satgas nagari bencana.

2. Dikembangkan dan diterapkan Inovasi yang telah dilakukan oleh BPBD adalah membuat aplikasi SIPELANA (Sistem Pelayanan Kebencanaan) yang merupakan aplikasi untuk memudahkan dalam penanganan kebencanaan. Aplikasi ini pada Tahun 2024 telah coba digunakan, tetapi masih ada kendala dalam pengaplikasiannya seperti dalam mengakses formulir laporan bencana masih membingungkan bagi masyarakat.
3. Untuk Program Penanggulangan Bencana terjadi penambahan anggaran APBD Perubahan 2024 sebesar Rp 981.416.500,- berupa Belanja Konsultansi Perencana dan Konsultansi Pengawasan untuk 10 paket pekerjaan Rekontruksi Jalan dan Jembatan yang rusak akibat banjir bandang, sementara belanja fisiknya dianggarkan pada APBN melalui mekanisme dana siap pakai untuk pekerjaan sebagai berikut:

No.	Lokasi	Nama Pekerjaan
1.	Nagari Sungai Jambu	Perbaikan Darurat Jembatan Aro
2.	Nagari Sungai Jambu	Perbaikan Darurat Jembatan Lona Ompang
3.	Nagari Sungai Jambu	Perbaikan Darurat Jembatan Pulai
4.	Nagari Koto Laweh	Perbaikan Darurat Jembatan Lurah Air Kalek
5.	Nagari Singgalang	Perbaikan Darurat Jembatan Lubuk Mata Kucing
6.	Nagari Koto Laweh	Perbaikan Darurat Jembatan Guguak Puti Saidu
7.	Nagari Batipuah Baru	Perbaikan Darurat Jembatan Sungai Maruok
8.	Nagari Tanjung Alam	Perbaikan Darurat Jembatan Sipopak
9.	Nagari Sungai Patai	Perbaikan Darurat Ruas Jalan Tali Agung-Sungai Patai

Foto Kegiatan Penanganan Banjir Bandang



B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 sebagai ditetapkan dalam Perubahan APBD TA 2024 adalah sebesar Rp. 1.352.808.437.874,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.266.769.592.678,- atau sebesar 93,64% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.25

Program dan Realisasi Anggaran Pembangunan Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN APBD 2024	APBD-P 2024	REALISASI 2024
		1.299.969.192.850	1.353.250.990.374	1.266.769.592.678
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	706.710.915.477	725.989.947.699	363.015.369.052
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	85.268.591.701	89.345.363.701	76.626.070.969
3.	Program Pengembangan Kurikulum	102.993.000	102.993.000	25.236.150
4.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Keseha	103.440.778.492	103.644.228.531	515.515.428
5.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	603.904.000	603.904.000	548.673.414
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	735.303.000	3.755.805.321	3.471.159.659
7.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	5.076.748.299	5.571.313.599	14.216.554.464,00
8.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.150.000.000	1.896.956.844	1.324.808.265
9.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.595.000.000	1.583.999.600	834.852.712
10.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	900.000.000	954.691.860	1.333.880.363
11.	Program Penataan Bangunan Gedung	570.000.000	3.774.947.140	3.041.060.983
12.	Program Penyelenggaraan Jalan	61.377.100.836	63.501.553.885	90.651.438.049
13.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	56.000.000	45.490.460	750.750
14.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.043.731.360	357.095.866	353.571.752
15.	Program Pengembangan Perumahan	122.447.000	32.447.000	58.685.285

NO	PROGRAM	ANGGARAN APBD 2024	APBD-P 2024	REALISASI 2024
16.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	87.000.000	5.382.990	999.900
17.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.214.564.400	1.215.799.400	1.014.888.750
18.	Program Penanggulangan Bencana	772.216.141	22.496.591	864.188.712
19.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.867.767.600	1.722.672.300	1.232.318.990
20.	Program Pemberdayaan Sosial	249.340.211	235.103.415	73.472.500
21.	Program Rehabilitasi Sosial	1.244.704.819	27.709.574.799	16.366.959.250
22.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.629.437.440	746.504.467	635.996.700
23.	Program Penanganan Bencana	128.800.000	121.644.000	39.688.000
24.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	35.000.000	33.220.800	18.776.000
25.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	390.900.000	388.900.000	475.298.972
26.	Program Penempatan Tenaga Kerja	51.376.800	51.376.800	52.765.050
27.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	769.900.000	856.365.500	509.434.126
28.	Program Perlindungan Perempuan	23.150.000	19.985.000	62.569.250
29.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	22.430.200	19.530.640	7.541.850
30.	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	46.804.500	42.256.800	15.076.800
31.	Program Perlindungan Khusus Anak	62.126.700	8.259.800	353.304.587

NO	PROGRAM	ANGGARAN APBD 2024	APBD-P 2024	REALISASI 2024
32.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	183.000.000	111.081.016	180.468.484
33.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	67.350.000	62.763.200	32.158.230
34.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	40.000.000	37.541.800	5.582.600
35.	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	307.943.200	266.108.140	293.236.648
36.	Program Penatagunaan Tanah	120.501.000	85.413.200	21.355.000,00
37.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	200.000.000	200.000.000	206.373.700
38.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	35.000.000	35.000.000	1.386.369.100
39.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	497.174.300	497.174.300	420.702.400
40.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	35.865.000	35.865.000	2.709.100
41.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	14.000.000	314.000.000	1.249.800
42.	Program Pengelolaan Persampahan	5.979.800.965	5.979.800.965	5.799.955.084
43.	Program Pendaftaran Penduduk	395.500.000	415.402.500	378.913.410
44.	Program Pencatatan Sipil	145.000.000	144.913.000	130.554.680
45.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20.000.000	19.964.500	8.199.750,00
46.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	10.000.000	9.821.800	892.000
47.	Program Peningkatan Kerja	15.000.000	-	1.461.600

NO	PROGRAM	ANGGARAN APBD 2024	APBD-P 2024	REALISASI 2024
	Sama Desa			
48.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.947.252.705	4.066.877.625	124.531.422
49.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.795.787.500	3.385.297.808	3.605.613.942
50.	Program Pengendalian Penduduk	64.649.900	43.008.840	9.117.500,00
51.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	4.847.940.200	5.244.089.515	4.395.786.767
52.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2.799.165.265	.386.828.371	2.274.889.440
53.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	10.379.174.218	13.927.125.818	12.945.442.494
54.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.104.285.829	1.631.503.618	1.546.298.503
55.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	875.699.173	861.733.858	786.146.374
56.	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	10.000.000	9.000.000	12.274.931
57.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	140.125.000	140.125.000	164.100.000
58.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	30.000.000	32.000.000	30.036.200
59.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	462.199.125	321.020.000	451.338.900
60.	Program Pengembangan Umkm	5.469.688.640	731.128.200	207.065.583
61.	Program Promosi Penanaman Modal	44.000.000	110.275.000	152.303.050
62.	Program Pelayanan Penanaman Modal	208.983.750	172.298.850	500.247.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN APBD 2024	APBD-P 2024	REALISASI 2024
63.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	460.600.000	460.600.000	699.778.700
64.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	245.897.670	240.554.370	14.628.800
65.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	997.790.000	1.082.790.000	44.595.599
66.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	10.526.000.000	10.559.000.000	1.912.286.079
67.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	750.000.000	750.000.000	672.694.335
68.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	128.294.400	80.408.628	69.741.800
69.	Program Pengembangan Kebudayaan	49.032.000	149.032.000	832.040.525
70.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	390.000.000	815.000.000	842.104.106
71.	Program Pembinaan Sejarah	69.560.000	89.560.000	18.476.950
72.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	126.260.000	126.260.000	3.150.000
73.	Program Pembinaan Perpustakaan	373.216.400	376.746.600	321.473.410
74.	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	150.000.000	146.469.800	1.875.400
75.	Program Pengelolaan Arsip	94.000.000	76.399.379	44.879.550
76.	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	31.000.000	30.970.000	8.961.250
77.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	65.884.524	59.802.167	4.402.300
78.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	488.674.147	59.937.983	347.942.050
79.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	52.687.050	45.730.725	184.807.300,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN APBD 2024	APBD-P 2024	REALISASI 2024
80.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5.025.277.151	7.148.498.151	5.361.884.929
81.	Program Pemasaran Pariwisata	1.938.642.743	1.722.789.293	1.482.145.417
82.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.513.685.000	1.537.623.600	44.644.200
83.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	7.115.952.020	7.544.593.917	15.776.911.646
84.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.239.078.709	2.549.630.661	6.487.161.358
85.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.535.729.404	1.560.729.404	1.427.088.195
86.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	145.000.000	247.459.500	214.313.500
87.	Program Penyuluhan Pertanian	876.753.600	1.124.753.600	1.288.163.880,00
88.	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	2.000.000	2.000.000	3.000.000
89.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	450.822.285	373.302.326	254.968.405
90.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	81.690.000	73.009.687	80.539.110
91.	Program Pengembangan Ekspor	24.362.500	31.162.500	1.489.150
92.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	94.285.000	86.179.020	67.740.329
93.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	124.815.000	70.444.300	69.624.060
94.	Program Perencanaan Dan Pembangunan	7.283.850.320	7.620.680.085	10.348.483.414

NO	PROGRAM	ANGGARAN APBD 2024	APBD-P 2024	REALISASI 2024
	Industri			
95.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	29.529.156.494	7.011.193.233	4.350.927.957
96.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.679.077.416	1.303.476.805	628.157.275
97.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	22.468.875.075	17.477.221.669	21.965.649.085
98.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	574.198.345	549.881.465	360.225.996
99.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	650.994.599	440.356.014	342.783.645
100.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	169.934.966.330	176.256.410.166	1.782.378.742
101.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.302.470.925	1.383.685.390	1.702.891.841
102.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	969.072.388	808.738.557	779.816.691
103.	Program Kepegawaian Daerah	1.951.703.545	1.366.569.329	975.569.353
104.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	479.173.700	473.899.700	340.451.143
105.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	845.275.735	1.200.275.735	671.717.078
106.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	40.000.000	30.450.000	89.764.554
107.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	792.085.073	725.352.423	22.687.900

NO	PROGRAM	ANGGARAN APBD 2024	APBD-P 2024	REALISASI 2024
108.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	117.013.600	111.823.800	1.980.000
109.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	61.898.900	51.017.000	0,00
110.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	518.140.526	461.775.477	40.492.500
111.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	761.379.130	609.133.897	27.138.350
112.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	50.000.000	83.282.000	150.597.050
113.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.686.297.120	16.473.459.590	28.032.850.162
114.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.000.000	1.870.000	26.172.755
115.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	16.322.880	1.197.280	1.445.000
116.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	514.064.400	705.702.790	864.816.788

BAB IV PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang cukup baik, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 dapat dinyatakan “berhasil”, karena realisasi 13 dari 26 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis mencapai 100% ke atas dan rata-rata capaian 98,65%, dengan rincian:

5. Capaian realisasi di atas 100% dengan kategori “Sangat Memuaskan” sebanyak 12 indikator (46,15%).
6. Capaian realisasi sampai dengan 100% dengan kategori “Sangat Baik” sebanyak 12 indikator (46,15%).
7. Capaian realisasi sampai dengan 70% dengan kategori “Sedang” sebanyak 1 indikator (3,85%).
8. Capaian realiasi sampai dengan 55% dengan kategori “Kurang Baik” sebanyak 1 indikator (3,85%)

Secara keseluruhan capaian Kinerja Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Terhadap capaian realisasi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 yang belum mencapai kategori “sangat baik” akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai perangkat daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap perangkat daerah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat memperoleh gambaran kinerja yang dicapai dari

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan oleh Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024. Dimasa mendatang, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar akan melakukan langkah-langkah perbaikan yang terus menerus (*continuous improvement*) melalui penguatan manajemen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tanah Datar, dengan menciptakan keselarasan dan integrasi sistem perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran yang berbasis kinerja, guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, yang didukung dengan implementasi sistem E-SAKIP yang handal dan *reliable*.

LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

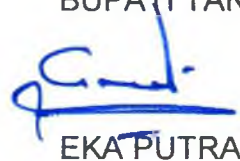
Nama : EKA PUTRA, SE, MM
Jabatan : BUPATI TANAH DATAR

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Batusangkar, Februari 2024

BUPATI TANAH DATAR



EKA PUTRA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Sasaran Strategis		Indikator		Kondisi Capaian Tahun 2023	Target 2024 (RPJMD)
1.	Meningkatnya pembangunan keagamaan masyarakat	1.	Jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda	9.174	10.000
		2.	Jumlah peningkatan nilai zakat yang diterima oleh amil zakat	Rp. 10.508.322.486	Rp. 11.540.498.673
2.	Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS SBK	3.	Persentase peningkatan lembaga adat dan budaya yang aktif	90,45%	95%
3.	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor penggerak utama perekonomian	4.	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	27,61%	30,19%
		5.	Nilai Tukar Petani/NTP	115,36	>100
4.	Meningkatnya daya saing UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif	6.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	13,8%	14%
		7.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	13,83%	13,95%
5.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	8.	Jumlah wirausaha baru	993	1.000
6.	Meningkatnya mutu pendidikan	9.	Rata-rata lama sekolah	9,02	9,02 tahun
7.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	10.	Umur harapan hidup	74,19	74,19 tahun
		11.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	16,4%	14%
8.	Meningkatnya kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	12.	Angka kemiskinan	4,16	4,06
		13.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	58,53	60
		14.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,62	98,9
9.	Peningkatan daya saing pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi potensial	15.	Jumlah kunjungan wisatawan	1.135.317 orang	1.200.000 orang
		16.	Lama tinggal wisatawan (hari)	1 hari	2 hari
10.	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	17.	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP
		18.	Indeks Pengawasan Kearsipan	B	B
		19.	Nilai SAKIP	66,93 (B)	71 (BB)

Sasaran Strategis		Indikator		Kondisi Capaian Tahun 2023	Target 2024 (RPJMD)
11.	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	20.	Indeks SPBE	3,22	3,22
		21.	Indeks Profesionalitas ASN	79,8	79,8
		22.	Skor dan status kinerja pemerintah daerah	3,16	3,2
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	23.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,57	95
13.	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	24.	Persentase infrastruktur wilayah yang berkualitas baik	76,27%	76,78
14.	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	25.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,99	72
15.	Meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan menghadapi bencana	26.	Persentase bencana yang ditangani	100%	100%

No.	Program	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	79.078.206.452
2.	Program Pengembangan Kurikulum	33.577.500
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.931.379.173
4.	Program Pengembangan Kebudayaan	885.487.500
5.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	553.425.000
6.	Program Pembinaan Sejarah	21.262.500
7.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	50.155.000
8.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	53.799.940.821
9.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	568.329.400
10.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.050.930.092
11.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	12.593.640.695
12.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.502.184.308
13.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	821.597.500
14.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	977.309.700
15.	Program Penataan Bangunan Gedung	1.803.793.750
16.	Program Penyelenggaraan Jalan	69.010.099.770
17.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	41.192.250
18.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	827.793.280
19.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	14.595.000
20.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	10.300.000
21.	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	299.618.400
22.	Program Penatagunaan Tanah	23.000.000
23.	Program Pengembangan Perumahan	62.500.000
24.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1.000.000
25.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	200.000.000
26.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.413.552.500

No.	Program	Anggaran
27.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	352.042.940
28.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	3.500.000
29.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.250.000
30.	Program Pengelolaan Persampahan	5.143.402.733
31.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	971.992.455
32.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.738.213.180
33.	Program Penanggulangan Bencana	511.465.299
34.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Bangsa	12.000.000
35.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	29.991.233.276
36.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.200.000
37.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.499.500
38.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	537.211.520
39.	Program Pemberdayaan Sosial	109.119.600
40.	Program Rehabilitasi Sosial	15.035.008.922
41.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	588.226.600
42.	Program Penanganan Bencana	56.850.000
43.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	12.000.000
44.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	453.727.800
45.	Program Perlindungan Perempuan	76.819.800
46.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	7.559.800
47.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	15.089.700
48.	Program Perlindungan Khusus Anak	376.564.200
49.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	429.190.700
50.	Program Penempatan Tenaga Kerja	52.876.800
51.	Program Hubungan Industrial	23.104.000
52.	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	3.000.000
53.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	11.566.009.580
54.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	37.024.000
55.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	33.299.200
56.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.462.400
57.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	331.385.547
58.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	200.000.000
59.	Program Pendaftaran Penduduk	373.330.400
60.	Program Pencatatan Sipil	131.942.000
61.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8.200.000
62.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	892.000
63.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	1.500.000
64.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	41.413.500
65.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3.253.230.820
66.	Program Pengendalian Penduduk	9.408.230
67.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.636.034.692

No.	Program	Anggaran
68.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.330.438.750
69.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	13.118.152.160
70.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	893.092.584
71.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	815.965.682
72.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	61.664.400
73.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	3.000.000
74.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	7.275.000
75.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	192.000.000
76.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	497.625.236
77.	Program Pengembangan UMKM	602.056.820
78.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	255.357.819
79.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	54.259.530
80.	Program Pengembangan Ekspor	1.500.000
81.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	62.028.520
82.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	87.748.800
83.	Program Promosi Penanaman Modal	117.325.000
84.	Program Pelayanan Penanaman Modal	506.692.420
85.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	791.987.000
86.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	15.757.500
87.	Program Pembinaan Perpustakaan	323.194.100
88.	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	4.607.500
89.	Program Pengelolaan Arsip	21.173.580
90.	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	5.732.500
91.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	30.000.000
92.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.571.741.600
93.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	750.000.000
94.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	6.412.777.320
95.	Program Pemasaran Pariwisata	2.539.000.000
96.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	31.000.000
97.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	15.769.120.210
98.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.126.287.550
99.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.278.858.350
100.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	238.263.000
101.	Program Penyuluhan Pertanian	1.429.590.400
102.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	5.401.049.348
103.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	510.765.886
104.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	33.923.436.012
105.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	355.288.700
106.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	210.219.725
107.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	338.727.500
108.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	169.722.536.951
109.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.061.544.729

No.	Program	Anggaran
110.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	688.061.150
111.	Program Kepegawaian Daerah	1.112.828.214
112.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	379.174.751
113.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	10.000.000
114.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	636.674.812
115.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	36.745.402
116.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.550.000
117.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	.392.700.312
118.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	485.551.713
	JUMLAH	1.398.919.280.321

Batusangkar, Februari 2024
BUPATI TANAH DATAR


EKA PUTRA



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EKA PUTRA, SE., MM
Jabatan : BUPATI TANAH DATAR

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Batusangkar, 24 September 2024

BUPATI TANAH DATAR,

EKA PUTRA

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**

Sasaran Strategis		Indikator		Target Awal 2024	Target Setelah Perubahan
1.	Meningkatnya pembangunan keagamaan masyarakat	1.	Jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda	10.000	10.000
		2.	Jumlah peningkatan nilai zakat yang diterima oleh amil zakat	Rp. 11.540.498.673	Rp. 11.540.498.673
2.	Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS SBK	3.	Persentase peningkatan lembaga adat dan budaya yang aktif	95%	95%
3.	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor penggerak utama perekonomian	4.	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	30,19%	30,19%
		5.	Nilai Tukar Petani/NTP	>100	>100
4.	Meningkatnya daya saing UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif	6.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	14%	14%
		7.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	13,95%	13,95%
5.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	8.	Jumlah wirausaha baru	1.000	1.000
6.	Meningkatnya mutu pendidikan	9.	Rata-rata lama sekolah	9,02 tahun	9,02 tahun
7.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	10.	Umur harapan hidup	74,19 tahun	74,19 tahun
		11.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14%	14%
8.	Meningkatnya kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	12.	Angka kemiskinan	4,06	4,06
		13.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60	60
		14.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,9	98,9
9.	Peningkatan daya saing pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi potensial	15.	Jumlah kunjungan wisatawan	1.200.000 orang	1.200.000 orang
		16.	Lama tinggal wisatawan (hari)	2 hari	2 hari
10.	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	17.	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP

Sasaran Strategis		Indikator		Target Awal 2024	Target Setelah Perubahan
		18.	Indeks Pengawasan Kearsipan	B	B
		19.	Nilai SAKIP	71 (BB)	71 (BB)
11.	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	20.	Indeks SPBE	3,22	3,22
		21.	Indeks Profesionalitas ASN	79,8	79,8
		22.	Skor dan status kinerja pemerintah daerah	3,2	3,2
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	23.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	95
13.	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	24.	Persentase infrastruktur wilayah yang berkualitas baik	76,78	76,78
14.	Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup	25.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
15.	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana	26.	Persentase bencana yang ditangani	100%	100%

No.	Program	APDB 2024	APBD-P 2024	+/-
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	79.078.206.452	81.009.046.452	1.930.840.000
2.	Program Pengembangan Kurikulum	33.577.500	33.577.500	0
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.931.379.173	23.938.027.461	4.006.648.288
4.	Program Pengembangan Kebudayaan	885.487.500	865.487.500	(20.000.000)
5.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	553.425.000	850.925.000	297.500.000
6.	Program Pembinaan Sejarah	21.262.500	21.293.700	31.200
7.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	50.155.000	50.155.000	0
8.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	53.799.940.821	57.214.600.776	3.414.659.955
9.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	568.329.400	568.329.400	0
10.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.050.930.092	3.600.930.092	550.000.000
11.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	12.593.640.695	14.331.345.595	1.737.704.900
12.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	1.502.184.308	1.418.184.308	(84.000.000)

No.	Program	APDB 2024	APBD-P 2024	+/-
	Penyediaan Air Minum			
13.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	821.597.500	846.597.500	25.000.000
14.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	977.309.700	1.345.309.700	368.000.000
15.	Program Penataan Bangunan Gedung	1.803.793.750	3.262.769.914	1.458.976.164
16.	Program Penyelenggaraan Jalan	69.010.099.770	91.980.158.682	22.970.058.912
17.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	41.192.250	41.192.250	0
18.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	827.793.280	732.809.452	(94.983.828)
19.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	14.595.000	14.595.000	0
20.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	10.300.000	10.300.000	0
21.	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	299.618.400	299.618.400	0
22.	Program Penatagunaan Tanah	23.000.000	23.000.000	0
23.	Program Pengembangan Perumahan	62.500.000	62.500.000	0
24.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1.000.000	1.000.000	0
25.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	200.000.000	2.08.000.000	8.000.000
26.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.413.552.500	1.413.552.500	0
27.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	352.042.940	424.442.940	72.400.000
28.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	3.500.000	3.500.000	0
29.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.250.000	1.250.000	0
30.	Program Pengelolaan Persampahan	5.143.402.733	5.984.787.233	841.384.500
31.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	971.992.455	1.023.264.955	51.272.500
32.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.738.213.180	1.570.841.080	(167.372.100)
33.	Program Penanggulangan Bencana	511.465.299	1.492.881.799	981.416.500

No.	Program	APDB 2024	APBD-P 2024	+/-
34.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	12.000.000	158.945.000	146.945.000
35.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	29.991.233.276	28.039.238.476	(1.951.994.800)
36.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.200.000	26.200.000	25.000.000
37.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.499.500	1.499.500	0
38.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	537.211.520	871.811.520	334.600.000
39.	Program Pemberdayaan Sosial	109.119.600	79.119.600	(30.000.000)
40.	Program Rehabilitasi Sosial	15.035.008.922	18.324.080.552	3.289.071.630
41.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	588.226.600	748.167.298	159.940.698
42.	Program Penanganan Bencana	56.850.000	56.850.000	0
43.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	12.000.000	18.800.000	6.800.000
44.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	453.727.800	523.727.800	70.000.000
45.	Program Perlindungan Perempuan	76.819.800	81.619.800	4.800.000
46.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	7.559.800	7.559.800	0
47.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	15.089.700	15.089.700	0
48.	Program Perlindungan Khusus Anak	376.564.200	377.866.700	0
49.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	429.190.700	477.294.700	48.104.000
50.	Program Penempatan Tenaga Kerja	52.876.800	52.876.800	0
51.	Program Hubungan Industrial	23.104.000	0,00	0
52.	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	3.000.000	3.000.000	0
53.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	11.566.009.580	11.373.087.080	(192.922.500)
54.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	37.024.000	181.009.000	143.985.000
55.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	33.299.200	33.299.200	0

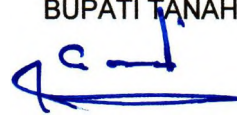
No.	Program	APDB 2024	APBD-P 2024	+/-
56.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.462.400	4.462.400	0
57.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	331.385.547	356.385.547	25.000.000
58.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	200.000.000	200.000.000	0
59.	Program Pendaftaran Penduduk	373.330.400	385.090.602	11.760.202
60.	Program Pencatatan Sipil	131.942.000	131.942.000	0
61.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8.200.000	8.200.000	0
62.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	892.000	892.000	0
63.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	1.500.000	1.500.000	0
64.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	41.413.500	151.413.500	110.000.000
65.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3.253.230.820	3.660.830.820	407.600.000
66.	Program Pengendalian Penduduk	9.408.230	9.408.230	0
67.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.636.034.692	4.700.834.692	64.800.000
68.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.330.438.750	2.330.438.750	0
69.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	13.118.152.160	13.203.952.160	85.800.000
70.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	893.092.584	1.699.092.584	806.000.000
71.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	815.965.682	835.965.682	20.000.000
72.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	61.664.400	71.664.400	10.000.000
73.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	3.000.000	3.000.000	0
74.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	7.275.000	12.275.000	5.000.000
75.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	192.000.000	192.000.000	0
76.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	497.625.236	497.625.236	0
77.	Program Pengembangan UMKM	602.056.820	602.056.820	0
78.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	255.357.819	268.557.819	13.200.000
79.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	54.259.530	80.759.530	26.500.000

No.	Program	APDB 2024	APBD-P 2024	+/-
80.	Program Pengembangan Ekspor	1.500.000	1.500.000	0
81.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	62.028.520	77.028.520	15.000.000
82.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	87.748.800	103.198.800	15.450.000
83.	Program Promosi Penanaman Modal	117.325.000	152.325.000	35.000.000
84.	Program Pelayanan Penanaman Modal	506.692.420	507.932.420	1.2
85.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	791.987.000	791.987.000	0
86.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	15.757.500	15.757.500	0
87.	Program Pembinaan Perpustakaan	323.194.100	324.694.100	1.500.000
88.	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	4.607.500	4.607.500	0
89.	Program Pengelolaan Arsip	21.173.580	50.983.580	29.810.000
90.	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	5.732.500	9.122.500	3.390.000
91.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	30.000.000	45.000.000	15.000.000
92.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.571.741.600	1.941.741.600	370.000.000
93.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	750.000.000	750.000.000	0
94.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	6.412.777.320	6.442.777.320	30.000.000
95.	Program Pemasaran Pariwisata	2.539.000.000	2.449.000.000	(90.000.000)
96.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	31.000.000	46.000.000	15.000.000
97.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	15.769.120.210	16.166.620.210	397.500.000
98.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.126.287.550	6.559.114.681	432.827.131
99.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.278.858.350	2.278.858.350	0
100.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	238.263.000	263.263.000	25.000.000
101.	Program Penyuluhan Pertanian	1.429.590.400	1.329.590.400	(100.000.000)
102.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	5.401.049.348	5.691.049.348	290.000.000

No.	Program	APDB 2024	APBD-P 2024	+/-
103.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	510.765.886	644.215.886	133.450.000
104.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	33.923.436.012	26.098.104.212	(7.825.331.800)
105.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	355.288.700	385.788.700	30.500.000
106.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	210.219.725	362.720.725	152.501.000
107.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	338.727.500	408.727.500	70.000.000
108.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	169.722.536.951	171.748.383.577	2.025.846.626
109.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.061.544.729	1.710.967.903	649.423.174
110.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	688.061.150	841.557.127	153.495.97
111.	Program Kepegawaian Daerah	1.112.828.214	1.041.792.614	(71.035.600)
112.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	379.174.751	672.674.751	293.500.000
113.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	10.000.000	90.000.000	80.000.000
114.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	636.674.812	614.455.611	(22.219.201)
115.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	36.745.402	35.845.402	(900.000)
116.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.550.000	1.550.000	0
117.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.392.700.312	1.396.593.912	3.893.600
118.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	485.551.713	515.051.713	29.500.000
	JUMLAH	1.398.919.280.321	1.444.187.319.890	45.268.039.569

Batusangkar, 24 September 2024

BUPATI TANAH DATAR



EKA PUTRA